

Oleh: TEAM

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

PARIWISATA KOTA BONTANG TAHUN 2018-2025

DRAFT NASKAH AKADEMIK

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Akhir Kegiatan “Penyusunan Naskah Akademik, RAPERDA KEPARIWISATAAN Kota Bontang Tahun Anggaran 2018” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Akhir ini merupakan tahap terakhir pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kegiatan “Penyusunan NASKAH AKADEMIK, RAPERDA & RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (RIPPAR) Kota Bontang Tahun Anggaran 2018”.

Laporan Akhir (*Final*) ini merupakan Laporan Akhir hasil perbaikan setelah memperoleh masukan berupa tanggapan dan sumbang saran/pendapat dalam FGD yang dilaksanakan di Kota Bontang.

Atas masukan oleh Stake holders dan dukungan serta bantuan berbagai pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Samarinda, Oktober 2018

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc530715865)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc530715866)

[DAFTAR TABEL v](#_Toc530715867)

[DAFTAR GAMBAR vi](#_Toc530715868)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc530715869)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc530715870)

[B. Identifikasi Masalah 5](#_Toc530715871)

[C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 5](#_Toc530715872)

[D. Metode Penelitian 6](#_Toc530715873)

[BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 7](#_Toc530715874)

[A. Kajian Teoritis 7](#_Toc530715875)

[1. Konsep Pariwisata 7](#_Toc530715876)

[2. Konsep Industri Pariwisata 11](#_Toc530715877)

[3. Prasarana dan Sarana Pariwisata 13](#_Toc530715878)

[4. Jenis Usaha Jasa dan Usaha Sarana Wisata 19](#_Toc530715879)

[5. Jenis-Jenis Sarana Pariwisata 23](#_Toc530715880)

[B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 26](#_Toc530715881)

[1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 27](#_Toc530715882)

[2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 33](#_Toc530715883)

[3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah 35](#_Toc530715884)

[C. Kajian Terhadap Praktik Empiris 40](#_Toc530715885)

[1. Kondisi Wilayah Kota Bontang 40](#_Toc530715886)

[2. Kependudukan 42](#_Toc530715887)

[3. Ekonomi Wilayah 44](#_Toc530715888)

[4. Presentase Penduduk di Atas garis Kemiskinan 49](#_Toc530715889)

[5. Keadaan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 51](#_Toc530715890)

[D. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan Sistem Tata Ruang 55](#_Toc530715891)

[E. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan RTRWN dan RTRWP 56](#_Toc530715892)

[F. Kepariwisataan Kota Bontang dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional 58](#_Toc530715893)

[G. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan RIPPAR Provinsi Kalimantan Timur 60](#_Toc530715894)

[H. Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan dalam Struktur Ruang Wilayah Kota Bontang 61](#_Toc530715895)

[1. BWP Kecamatan Bontang Selatan 62](#_Toc530715896)

[2. BWP Kecamatan Bontang Barat 68](#_Toc530715897)

[3. BWP Kecamatan Bontang Utara 78](#_Toc530715898)

[I. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kota Bontang 83](#_Toc530715899)

[J. Usaha Pariwisata 86](#_Toc530715900)

[K. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata 88](#_Toc530715901)

[L. Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan 91](#_Toc530715902)

[M. Karakteristik Pasar Wisatawan 93](#_Toc530715903)

[1. Pola Perjalanan 93](#_Toc530715904)

[2. Karakteristik Wisatawan 94](#_Toc530715905)

[3. Jumlah Kunjungan Wasatawan ke Kalimantan Timur dan Kota Bontang 96](#_Toc530715906)

[4. Jumlah Proyeksi Kunjungan Wisatawan 97](#_Toc530715907)

[5. Daya Saing Produk Pariwisata 98](#_Toc530715908)

[N. Upaya Pemasaran Yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang 100](#_Toc530715909)

[O. Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata 104](#_Toc530715910)

[1. Pemetaan Kegiatan Wisata dalam Struktur Wilayah Pengembangan Kota Bontang 104](#_Toc530715911)

[2. Wilayah Pengembangan Pariwisata 105](#_Toc530715912)

[P. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Prioritas 108](#_Toc530715913)

[1. Potensi dan Pengelompokkan Daya Tarik Wisata 108](#_Toc530715914)

[2. Penentuan Kawasan Wisata Prioritas 111](#_Toc530715915)

[3. Rencana Pengembangan Aksesibilitas 118](#_Toc530715916)

[4. Rencana Pengembangan Jalur Wisata 120](#_Toc530715917)

[5. Rencana Jalur Wisata Industri dan Budaya Bontang 123](#_Toc530715918)

[6. Rencana Jalur Wisata Rekreasi Edukatif Bontang Lestari 125](#_Toc530715919)

[Q. Program Dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisaaan 125](#_Toc530715920)

[1. Visi Pengembangan Pariwisata Kota Bontang 125](#_Toc530715921)

[2. Misi Pengembangan Pariwisata Kota Bontang 126](#_Toc530715922)

[3. Tujuan Dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Kota Bontang 127](#_Toc530715923)

[4. Mitigasi Dampak Pengembangan Pariwisata Kota Bontang 128](#_Toc530715924)

[5. Program Pengembangan Pariwisata Kota Bontang 129](#_Toc530715925)

[R. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan 134](#_Toc530715926)

[BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 156](#_Toc530715927)

[A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 156](#_Toc530715928)

[B. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 159](#_Toc530715929)

[C. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 161](#_Toc530715930)

[D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 161](#_Toc530715931)

[E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 162](#_Toc530715932)

[F. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan. 163](#_Toc530715933)

[BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 165](#_Toc530715934)

[A. Landasan Filosofis 165](#_Toc530715935)

[B. Landasan Sosiologis 167](#_Toc530715936)

[1. Potensi Alam 168](#_Toc530715937)

[2. Potensi Kebudayaan 168](#_Toc530715938)

[3. Potensi Manusia 168](#_Toc530715939)

[C. Landasan Yuridis 173](#_Toc530715940)

[BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 181](#_Toc530715941)

[A. Sasaran yang Akan Diwujudkan 181](#_Toc530715942)

[B. Jangkauan dan Arah Pengaturan 181](#_Toc530715943)

[C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah. 181](#_Toc530715944)

[BAB VI PENUTUP 183](#_Toc530715945)

[A. Kesimpulan 183](#_Toc530715946)

[B. SARAN 184](#_Toc530715947)

[DAFTAR PUSTAKA 185](#_Toc530715948)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1. Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli 9](#_Toc524894815)

[Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap Kelurahan di Kota Bontang 41](#_Toc524894816)

[Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2016 43](#_Toc524894817)

[Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010-2016 43](#_Toc524894818)

[Tabel 2.4. Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang Tahun 2010-2016\*) 46](#_Toc524894819)

[Tabel 2.5. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Bontang (persen) 2013-2016 47](#_Toc524894820)

[Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontnang (Juta Rupiah), 2013-2016 48](#_Toc524894821)

[Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik RegionalBruto Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut lapangan Usaha di Kota Bontang (persen), 2013-2016 49](#_Toc524894822)

[Tabel 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk di Atas Garis Kemiskinan 50](#_Toc524894823)

[Tabel 2.9. Total Panjang Jalan, Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kota Bontang 2012-2016 (Km) 51](#_Toc524894824)

[Tabel 2.10. Panjang Jalan Kota berdasarkan jenis Permukaan di Kota Bontang 2010–2016 (Km) 52](#_Toc524894825)

[Tabel 2.11. Sarana Air Bersih di Kota Bontang 2006-2016 52](#_Toc524894826)

[Tabel 2.12. Penyaluran Gas Rumah Tangga di Kota Bontang Tahun 2015-2016 53](#_Toc524894827)

[Tabel 2.13. Banyaknya Hotel, Berbintang Dan Non Bintang Tahun 2011-2016 54](#_Toc524894828)

[Tabel 2.14. Banyaknya Hotel/Penginapan, Kamar Dan Tempat Tidur Tahun 2011-2016 54](#_Toc524894829)

[Tabel 2.15. Jumlah Sarana Gedung/Tempat Kesenian Menurut Kecamatan Di Kota Bontang Tahun 2011-2016 55](#_Toc524894830)

[Tabel 2.16. Jumlah Kelompok Kesenian Menurut Kecamatan Di Kota Bontang Tahun 2012-2016 55](#_Toc524894831)

[Tabel 2.17. Komponen Destinasi Tenggarong 59](#_Toc524894832)

[Tabel 2.18. Paket Wisata Bahari Kota Bontang 85](#_Toc524894833)

[Tabel 2.19. Kunjungan wisatawan Nusantara Ke Prov. Kaltim dan Kota Bontang Tahun 2012-2017 97](#_Toc524894834)

[Tabel 2.20. Kunjungan wisatawan Mancanegara ke Indonesia, Prov. Kaltim dan Kota Bontang 2009-2016 97](#_Toc524894835)

[Tabel 2.21. Proyeksi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bontang 98](#_Toc524894836)

[Tabel 2.22. Perkembangan kegiatan wisata dalam wilayah pengembangan dan peruntukan lahan 105](#_Toc524894837)

[Tabel 2.23. Potensi dan Pengelompokkan Daya Tarik Wisata 108](#_Toc524894838)

[Tabel 2.24. Penilaian Kawasan Wisata di Kota Bontang 112](#_Toc524894839)

[Tabel 2.25. Kawasan wisata Bontang Kuala 113](#_Toc524894840)

[Tabel 2.26. Kawasan wisata Berbas Pantai 114](#_Toc524894841)

[Tabel 2.27. Kawasan wisata Cibodas Dsk 115](#_Toc524894842)

[Tabel 2.28. Kawasan wisata Guntung 116](#_Toc524894843)

[Tabel 2.29. Kawasan Taman Nasional Kutai 117](#_Toc524894844)

[Tabel 2.30. Kawasan wisata Pantai Tanjung Laut Indah 118](#_Toc524894845)

[Tabel 2.31. Rencana Jalur Wisata Budaya Bahari Bontang 121](#_Toc524894846)

[Tabel 2.32. Rencana Jalur Wisata Industri dan Budaya Bontang 123](#_Toc524894847)

[Tabel 2.33. Rencana Jalur Wisata Rekreasi Edukatif Bontang Lestari 125](#_Toc524894848)

[Tabel 2.34. Kebijakan Industri Pariwisata 147](#_Toc524894849)

[Tabel 2.35. Kebijakan Kelembagaan Pariwisata 154](#_Toc524894850)

[Tabel 2.36. Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Kepariwisataan. 163](#_Toc524894851)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 2.1. Posisi Provinsi Kaltim Dalam RIPPARNAS Tahun 2010-2025 61](#_Toc524894860)

[Gambar 2.2. Peta rencana perwilayahan pengembangan pariwisata (WPP) Kota Bontang 107](file:///D:\Datatik\DRAFT%20NASKAH%20AKADEMIK%20Pariwisata%20edit%202.docx#_Toc524894861)

[Gambar 2.3. Sebaran Kawasan Wisata di Kota Bontang 110](file:///D:\Datatik\DRAFT%20NASKAH%20AKADEMIK%20Pariwisata%20edit%202.docx#_Toc524894862)

[Gambar 2.4. Peta Rencana Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata di Kota Bontang 119](file:///D:\Datatik\DRAFT%20NASKAH%20AKADEMIK%20Pariwisata%20edit%202.docx#_Toc524894863)

[Gambar 2.5. Peta Rencana Jalur Wisata 1 122](file:///D:\Datatik\DRAFT%20NASKAH%20AKADEMIK%20Pariwisata%20edit%202.docx#_Toc524894864)

[Gambar 2.6. Peta Rencana Jalur Wisata 2 124](file:///D:\Datatik\DRAFT%20NASKAH%20AKADEMIK%20Pariwisata%20edit%202.docx#_Toc524894865)

[Gambar 2.7. Keterkaitan dan sinergi antar pemangku kepentingan dan dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan 169](#_Toc524894866)

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di Era Globalisasi saat ini pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan suatu negara. Pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menciptatakan daya saing yang tinggi di saat ini. Pariwisata yang mencakup nilai-nilai luhur dipertahankan menjadi suatu cita dalam suatu negara. Perkembangan dunia Pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Di Indonesia Pariwisata telah menampilkan peranannya dengan nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Kesempatan kerja bagi orang-orang terampil di bidang ini makin bertambah jumlahnya, pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa semakin bertambah, keadaan sosial masyarakat yang terlibat dalam sektor ini makin baik, kebudayaan bangsa makin memperoleh apresiasi. Indonesia adalah bangunan keanekaragaman budaya dan anugrah alam yang kaya dan mempesona. Kekuatan lintas wilayah, suku, adat istiadat, ornamen kultural, tradisionalitas, rangkaian sejarah serta paduan eksotika alam yang elok harusnya menjadikan Indonesia ‘surga wisata’ dunia.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada kepala daerah dalam kewenangan yang diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dioptimalkan dengan menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset dan sumberdaya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu setiap daerah harus mencermati sektor-sektor strategis dan potensial, dalam hal ini pariwisata, untuk dikembangkan secara produktif dan dapat membantu menopang pembangunan daerah, memberikan nilai manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi bagi pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata dikembangkan dengan berbagai alasan, salah satu hal yang utama adalah dapat menghasilkan peningkatan ekonomi dan devisa bagi negara, serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Selain itu pariwisata juga dapat mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya setempat, disamping juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan, diantaranya degradasi lingkungan, dampak terhadap sosial budaya masyarakat setempat, dan lain-lain.

Kota Bontang sendiri merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pariwisata, terutama pariwisata bahari. Keberadaan luas wilayah lautan yang lebih besar (70,30 %) dari wilayah daratan (29,70 %) serta keterbatasan penggunaan dan pemanfaatan lahan di wilayah daratan menghasilkan adanya kesempatan untuk mengembangkan potensi pariwisata bahari. Hal ini didukung oleh potensi daya tarik wisata bahari dengan keberadaan Pulau Beras Basah dengan keindahan pantai pasir putih dan keragaman terumbu karangnya, Pulau Kedindingan dengan keindahan hutan mangrove, serta kawasan hutan mangrove sepanjang pesisir Tanjung Limau, Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah sampai ke Berebas Tanjung.

Produksi perikanan kelautan Kota Bontang cukup menjanjikan seperti tangkapan ikan laut, budidaya karamba, maupun produksi rumput laut serta keberadaan perkampungan nelayan di Bontang Kuala, Selangan, Melahing, Tihik-tihik, dan lainnya serta dapat menjadi potensi pariwisata bahari yang mengedepankan aspek marinkultur dan budaya. Potensi lainnya yang dimiliki Kota Bontang antara lain:

1. Daya tarik wisata alam lainnya, seperti kawasan hutan lindung yang menyambung dengan Taman Nasional Kutai Timur, maupun hutan kota/hutan rakyat di kawasan Bontang Lestari, serta Danau Kanaan dengan keindahan panorama waduknya.
2. Daya tarik wisata budaya, seperti Erau Guntung, Makam Toraja, dan event Pesta Laut Bontang Kuala.
3. Daya tarik wisata industri, seperti Kawasan Pabrik LNG Badak yang ditunjang oleh keindahan Pantai Marina-nya.

Potensi-potensi pariwisata ini harus direncanakan dan dikelola dengan baik agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah pasca migas atau minyak dan gas bumi yang merupakan SDA tidak terbarukan (*non-renewable natural resource).* Sektor pariwisata pada masa yang akan datang dapat dijadikan kontributor andalan dan generator aktivitas pembangunan kota Bontang setelah pasca migas.

Untuk pengembangan dan pembangunannya, diperlukan kegiatan perencanaan pariwisata Kota Bontang yang menyeluruh dan terintegrasi diantaranya dengan penyusunan RIPPARDA atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Penyusunan RIPPARDA didukung oleh berbagai alasan berikut:

1. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah dan umumnya daerah tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana induk yang terpadu dan menyeluruh, dapat memberikan arahan pada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan yang dimaksud.
2. Pariwisata bersifat kompleks, multi sektor, dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, perikanan, perhutanan, dan lain-lain. Perencanaan pariwisata dapat mengorganisasikan komponen-komponen tersebut sebagai layaknya seorang dirigen sehingga pengembangannya dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.

Pariwisata juga akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sekaligus merupakan sektor yang relatif lebih ramah lingkungan. Selain itu, penyusunan RIPPARDA Kota Bontang dalam konteks yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Provinsi Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya dibandingkan dengan negara-negara pesaing di tingkat regional, khususnya terkait dengan indikator manajemen produk, infrastruktur, SDM, pemasaran, lingkungan, dan sebagainya. Pengembangan pariwisata di Kota Bontang juga diharapkan dapat menjadi generator yang turut meminimalisir kesenjangan perkembangan pariwisata di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tentunya harus didukung oleh kesiapan destinasi pariwisata diantaranya dengan adanya dukungan aksesibilitas ke dan internal destinasi, kualitas pelayanan yang bagus, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyebaran investasi pariwisata yang selama ini masih terkonsentrasi pada kawasan seputar Bali.

Secara Administratif Kota Bontang mempunyai luas wilayah yang hanya 159,0303 km2 tersebut terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km2 (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km2 (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 109,24 km2, Kecamatan Bontang Utara seluas 31,85 km2, dan Bontang Barat seluas 17,93 km2. Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 87,20 km2.

Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana ini memuat arahan keempat pilar pembangunan kepariwisataan yang tercakup dalam Pasal 7 UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan yang mencakup pengembangan industri kepariwisataan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran, serta pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Rencana Induk Penyelenggaraan Pariwisata di Kota Bontang?

2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Pariwisata?

3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Pariwisata?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1) Merumuskan Rencana Induk Penyelenggaraan Pariwisata di Kota Bontang dalam rangka mengatasi permasalahan .

2) Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio-legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosio-legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian noramtif atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti terhadap rencana induk penyelenggaraan pariwisata Kota Bontang

# BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## A. Kajian Teoritis

### 1. Konsep Pariwisata

Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati serta dilindungi. Hal inilah yang akhirnya membuat berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia dan *World Tourism Organization* (WTO), mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.

Pariwisata itu sendiri, secara sederhana sering diartikan sebagai perjalanan untuk bersenang-senang. Namun, secara *etymologis* kata “pariwisata” berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari tiga suku kata sebagai berikut :

*Pari* : berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata paripurna)

*Wis (man)* : berarti rumah poperti, kampung, komunitas

*Ata* : berarti pergi terus-menerus, mengembara *(roaming about).*

Berdasarkan pengertian di atas, “pariwisata” berarti bepergian sepenuhnya meninggalkan rumah, kampung halaman, tempat tinggalnya untuk berkeliling. Istilah pariwisata di Indonesia muncul pada awal tahun 1960 yang merupakan usulan presiden Soekarno kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku Ketua Dewan Tourisme Indonesia (DTI).

Pengertian atau definisi “pariwisata” berkembang dengan berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada keinginan manusia untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang didorong oleh rasa ingin tahu untuk merasakan atau mengalami sendiri keindahan suatu objek wisata. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pengutamaan bagian tertentu dari definisi tersebut berdasarkan sudut pandang atau kepentingannya.

Herman V. Schulalard, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Austria memberikan batasan akan pengertian pariwisata sebagai berikut : *“Tourism is the sun of operations, mainly of an economic nature, which directly related to the entry, stay and movemet of foreigner inside certain country, city or region”.* Menurut pendapatnya, yang dimaksud dengan pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan datangnya, menetapnya, dan bergeraknya wisatawan dalam suatu kota, daerah atau negara. Karena batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka sifatnya lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapi tidak secara tegas menunjukan aspek-aspek sosiologis, psikologis, seni-budaya maupun aspek geografis kepariwisataan.

Pengertian yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf sebagai berikut : *“Tourism is the totally of the relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers (Ortsfremde), provide the stay does not imply the establishment of a permanent resident”.* Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh suatu perjalanan dan menetapnya orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, di mana hal tersebut tidak bersifat permanen dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang dilakukanya. Batasan yang diberikan oleh Prof. Huzieker dan Prof. K. Krapf merupakan pengertian yang dapat diterima secara resmi oleh *The Association International des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST).*

Menurut Prof. Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul *An Introduction on Tourism Theory* mengemukakan bahwa pengertianpariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: manusia *(man),* orang-orang yang melakukan perjalanan wisata; ruang *(space),* daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan; dan waktu *(time),* waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Tabel 1.1. Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Ahli** | **Definisi** |
| 1 | R.G Soekadijo | Segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan |
| 2 | A.J Burkat dan S. Medik | Perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangkauan waktu pendek ke tujuan–tujuan di luar tempat mereka biasa hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama di tempat tujuan itu. |
| 3 | Prof. Hans Buchli | Perpindahan tempat untuk sementara waktu dan mereka yang melakukan perjalanan tersebut memperoleh pelayanan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata. |
| 4 | Prof. Kurt Morgenroth | Pariwisata dalam arti sempit adalah lalu lintas orang- orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu dan berpesiar di tempat lain, semata-mata sebagai *konsumen* dari peradaban budaya dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam. |
| 5 | Dr. Hubert Gulden | Suatu seni dari lalu lintas masyarakat, di mana orang- orang berdiam di suatu tempat asing untuk maksud tertentu, tetapi keberadaannya tidak dimaksudkan untuk tinggal menetap. |
| 6 | Dr. R. Gluckman | Keseluruhan hubungan antar manusia yang hanya berada sementara waktu dalam suatu tempat dan berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. |

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa pada dasarnya pariwisata mencakup segala bentuk/macam perjalanan yang berhubungan dengan kegiatan rekreasi/*pleasure*. Pengertian-pengertian tersebut menunjukan adanya suatu karakteristik khusus atau faktor-faktor pembentuk pariwisata sebagai berikut :

a. Perjalanan dilakukan untuk sementara waktu

b. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya

c. Perjalanan (apapun bentuknya) harus selalu dikaitkan dengan rekreasi.

d. Orang yang melakukan perjalanan tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai *konsumen* di tempat tersebut.

Pariwisata berdasarkan faktor-faktor di atas, diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha *(business)* atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi hanya untuk bersenang-senang dan memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 2 Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;

b. kekeluargaan;

c. adil dan merata;

d. keseimbangan;

e. kemandirian;

f. kelestarian;

g. partisipatif;

h. berkelanjutan;

i. demokratis;

j. kesetaraan; dan

k. kesatuan.

Fungsi kepariwisataan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu didalam Pasal 4, ditentukan bahwa Kepariwisataan bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c. menghapus kemiskinan;

d. mengatasi pengangguran;

e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;

f. memajukan kebudayaan;

g. mengangkat citra bangsa;

h. memupuk rasa cinta tanah air;

i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan

j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Mengenai Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

e. memberdayakan masyarakat setempat;

f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan

h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Konsep Industri Pariwisata

Bila meninjau pariwisata dari segi ekonomi, seperti misalnya dari segi permintaan *(demand)* dan penawaran *(supply),* maka menurut G. Janata pariwisata dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu : *dynamic sector* dan *static sector. Dynamic sector* adalah kegiatan yang berhubungan dengan *travel agent, tour operator,* angkutan atau transportasi wisata dan pelayanan lain yang berkaitan. Sedangkan yang dimaksud dengan *static sector* adalah perusahaan akomodasi, *catering services,* transportasi (secara umum), *entertaiment, souvenir-shop,* dan lain-lain. Banyak aktivitas lain yang dapat menciptakan permintaan akan pelayanan perusahaan-perusahaan di atas. Fenomena ini ternyata berkesinambungan dan terjadi secara terus menerus. Setiap ada satu kegiatan yang mendorong terjadinya kegiatan perjalanan wisata, maka selalu ada permintaan akan jasa-jasa pelayanan yang sifatnya menyatu/tergabung (walupun produknya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda). Proses dari fenomena secara keseluruhan, sebagai akibat dari adanya orang-orang yang melakukan perjalanan dengan macam-macam tujuan, dapat menciptakan permintaan *(demand)* akan beragam jasa pelayanan dari macam-macam perusahaan yang berbeda. Hal tersebut dapat disebut dengan istilah “industri pariwisata”.

Para ahli umumnya memberikan batasan pengertian kata “industri” sebagai berikut :

* Industri, adalah segala usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. Industri, adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sejenis atau serupa
* Industri, adalah kumpulan dari bermacam-macam perusahaan *(firms)* yang menggunakan bahan mentah yang sama.
* Industri, adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan *(firms)* yang mempunyai proses yang sama.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “industri” adalah segala usaha yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasikan barang-barang atau jasa-jasa melalui suatu proses prosuksi. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, dan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata.

Menurut McIntos (1980) pariwisata adalah gabungan kegiatan, pelayanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, pertokoan, fasilitas kegiatan hiburan, dan pelayanan lainnya yang tersedia bagi individu atau kelompok yang melakukan.

Pariwisata merupakan suatu usaha yang komplek, hal ini dikarenakan terdapat banyak kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya seperti usaha perho telan (home stay), usaha kerajinan/cinderamata, usaha perjalanan, dan usaha – usaha lainnya. Usaha pariwisata dapat dapat dikaitkan dengan sarana pokok kepariwisataan yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata (Yoeti, 1996).

### 3. Prasarana dan Sarana Pariwisata

#### a. Prasarana Pariwisata

Prasarana *(infrastructures)* adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Prof. Salah Wahab dalam bukunya *Tourism Management,* membagi prasarana ke dalam tiga bagian, yaitu: prasarana umum *(general infrastructures),* kebutuhan masyarakat banyak *(basic needs of civilized life),* dan prasarana kepariwisataan.

1) Prasarana Umum *(General nfrastructures)* Prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak yang pengadaannya bertujuan untuk membantu kelancaran roda perekonomian, yaitu:

* + - Pembangkit tenaga listrik dan sumber energi lainnya
    - Sistem penyediaan air bersih
    - Sistem jaringan jalan raya dan jalur kereta api
    - Sistem irigasi
    - Perhubungan dan Telekumuniksi

2) Kebutuhan Masyarakat Banyak *(Basic Needs of Civilized Life)*

Prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak, seperti halnya rumah sakit, apotik, bank, kantor pos, pompa bensin, dan administrasi pemerintahan (polisi, pengadilan, badan legislatif, dan lain-lain).

3) Prasarana Kepariwisataan

a) *Receptive Tourist Plant*

Segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata, yaitu: Perusahaan yang kegiatannya adalah merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi orang yang akan melakukan perjalanan wisata *(tour operator and travel agent).* Badan atau organisasi yang memberikan penerangan, penjelasan, promosi dan propaganda tentang suatu daerah tujuan wisata (*Tourist Information Center* yang terdapat di *airport,* terminal, pelabuhan, atau suatu *resort*).

b) *Residental Tourist Plant*

Semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah semua bentuk akomodasi yang diperuntukan bagi wisatawan dan juga segala bentuk rumah makan dan restoran yang ada. Misalnya hotel, motor hotel (motel), wisma, *homestay, cottages, camping, youth hostel,* serta rumah makan, restoran, *self-services, cafetaria, coffee shop, grill room, bar, tavern,* dan lain-lain.

c) *Recreative and Sportive Plant*

Semua Fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah fasilitas untuk bermain golf, kolam renang, *boating, surfing, fishing, tennis court,* dan fasilitas lainnya.

#### b. Sarana Pariwisata

Sarana Pariwisata *(tourism superstructures)* adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupan perusahaan tersebut sangat tergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana Pariwisata dapat di bagi ke dalam tiga bagian, yaitu : sarana pokok pariwisata, sarana pelengkap pariwisata, dan sarana penunjang pariwisata,

1) Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures)

Sarana pokok pariwisata adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, yaitu: Travel Agent and Tour Operator, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar dan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata dan atraksi wisata.

Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan fasilitas minimal yang harus ada pada suatu daerah tujuan wisata, jika salah satu tidak ada maka dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan. Sarana pokok pariwisata ini oleh Nyoman S. Pendit disebut dengan istilah “perusahaan utama yang langsung” yang terbagi ke dalam Objek Sentra dan Subjek Sentra sebagai berikut: Objek Sentra: termasuk perusahaan akomodasi, perusahaan pengangkutan/ transportasi, tempat peristirahatan yang khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya, perusahaan manufaktur (kerajinan tangan atau barang-barang kesenian), toko-toko souvenir, badan usaha yang menyajikan hiburan-hiburan (EO) atau menyediakan pemandu (*guide*) serta penerjemah, lembaga khusus untuk mempromosikan pariwisata. Subjek Sentra: perusahaan penerbitan pariwisata yang memajukan promosi pariwisata secara umum ataupun khusus, kantor yang membiayai pariwisata (*Travel Bank, Travel Credit, Social Tourism, and Youth Travel*), asuransi pariwisata (seperti kecelakaan, sakit dan biaya rumah sakit saat melakukan perjalanan).

2) Sarana Pelengkap Pariwisata (*Suplementing Tourism Superstructures*)

Sarana pelengkap pariwisata adalah perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok pariwisata, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat wisatawan. Sarana Pariwisata dapat di bagi ke dalam tiga bagian, yaitu: sarana pokok pariwisata, sarana pelengkap pariwisata, dan sarana penunjang pariwisata,

3) Sarana Pokok Pariwisata *(Main Tourism Superstructures)*

Sarana pokok pariwisata adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, yaitu: *Travel Agent and Tour Operator, p*erusahaan-perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar dan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata dan atraksi wisata.

Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan fasilitas minimal yang harus ada pada suatu daerah tujuan wisata, jika salah satu tidak ada maka dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan. Sarana pokok pariwisata ini oleh Nyoman S. Pendit disebut dengan istilah “perusahaan utama yang langsung” yang terbagi ke dalam Objek Sentra dan Subjek Sentra sebagai berikut: *Objek Sentra*: termasuk perusahaan akomodasi, perusahaan pengangkutan/ transportasi, tempat peristirahatan yang khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya, perusahaan manufaktur (kerajinan tangan atau barang-barang kesenian), toko-toko souvenir, badan usaha yang menyajikan hiburan-hiburan *(EO)* atau menyediakan pemandu *(guide)* serta penerjemah, lembaga khusus untuk mempromosikan pariwisata. *Subjek Sentra* : perusahaan penerbitan pariwisata yang memajukan promosi pariwisata secara umum ataupun khusus, kantor yang membiayai pariwisata *(Travel Bank, Travel Credit, Social Tourism, and Youth Travel),* asuransi pariwisata (seperti kecelakaan, sakit dan biaya rumah sakit saat melakukan perjalanan).

4) Sarana Pelengkap Pariwisata *(Suplementing Tourism Superstructures)*

Sarana pelengkap pariwisata adalah perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok pariwisata, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Sarana pelengkap pariwisata oleh Nyoman S. Pendit disebut sebagai “perusahaan pariwisata sekunder”, karena tidak seluruhnya tergantung kepada kedatangan wisatawan tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat setempat yang membutuhkannya. Nyoman S. Pendit memberi contoh perusahaan pariwisata sekunder sebagai berikut: Perusahaan yang membuat kapal khusus untuk wisatawan, seperti: cuiser, gerbong khusus bagi wisatawan, mobil atau bus khusus bagi wisatawan, toko pakaian (*boutiques*), toko perhiasan (*jewellery*), toko kelontongan dan toko foto (cuci-cetak), binatu, salon (barbershop), salon kecantikan, dan lain-lain.

5) Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting Tourism Superstructures)

Sarana penunjang pariwisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok. Selain berfungsi untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, sarana penunjang pariwisata memiliki fungsi yang jauh lebih penting yaitu membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Misalnya night club, casinos, steambaths, dan lain-lain. Adanya sarana pelengkap dan penunjang pariwisata seperti yang telah diuraikan di atas akan mendukung sarana-sarana pokok. Hal ini berarti bahwa ketiga sarana pariwisata tersebut, satu sama lainnya harus saling mengisi dan melengkapi pariwisata sekunder”, karena tidak seluruhnya tergantung kepada kedatangan wisatawan tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat setempat yang membutuhkannya. Nyoman S. Pendit memberi contoh perusahaan pariwisata sekunder sebagai berikut : Perusahaan yang membuat kapal khusus untuk wisatawan, seperti: *cuiser*, gerbong khusus bagi wisatawan, mobil atau bus khusus bagi wisatawan, toko pakaian *(boutiques),* toko perhiasan *(jewellery),* toko kelontongan dan toko foto (cuci-cetak), binatu, salon *(barbershop),* salon kecantikan, dan lain-lain.

6) Sarana Penunjang Pariwisata *(Supporting Tourism Superstructures)*

Sarana penunjang pariwisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok. Selain berfungsi untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, sarana penunjang pariwisata memiliki fungsi yang jauh lebih penting yaitu membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Misalnya *night club, casinos, steambaths,* dan lain-lain. Adanya sarana pelengkap dan penunjang pariwisata seperti yang telah diuraikan di atas akan mendukung sarana-sarana pokok. Hal ini berarti bahwa ketiga sarana pariwisata tersebut, satu sama lainnya harus saling mengisi dan melengkapi.

### 4. Jenis Usaha Jasa dan Usaha Sarana Wisata

Adapun Jenis Usaha Pariwisata antara lain :

1) *Usaha Daya Tarik Wisata*: usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

2) *Usaha Kawasan Pariwisata*: usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

3) *Usaha Jasa Transportasi Pariwisata*: usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

4) *Usaha Jasa Perjalanan Wisata*:

* Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
* Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

5) *Usaha Jasa Makanan Dan Minuman* : usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

* Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
* Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
* Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non- alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
* Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
* Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
* Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

6) *Usaha Penyediaan Akomodasi* : usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk

wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

* Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
* Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
* Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
* Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
* Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

7) *Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi*: usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

* Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
* Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
* Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
* Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
* Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
* Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
* Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
* Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

8) *Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran*: pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

9) *Usaha Jasa Informasi Pariwisata*: usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

10) *Usaha Jasa Konsultan Pariwisata* : usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

11) *Usaha Jasa Pramuwisata*: usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

12) *Usaha Wisata Tirta* yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

* Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
* Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.

13) *Usaha Spa*: usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

### 5. Jenis-Jenis Sarana Pariwisata

1) Penyediaan Akomodasi

Akomodasi adalah suatu tempat yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal wisatawan, misalnya:

* Hotel, merupakan salah satu jenis akomodasi yang paling lengkap dan paling banyak jumlahnya yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
* Motel (Motor Hotel), adalah suatu bentuk bangunan yang di gunakan untuk usaha perhotelan dengan sarana tambahan berupa garasi di setiap kamar. Biasanya motel ini bertingkat dua, bagian atas sebagai kamar untuk beristirahat sedangkan bagian bawah sebagai berupa garasi motor atau mobil. Fasilitas yang disediakan antara lain pompa bensin dan bengkel mobil atau motor. Nama lain untuk motel adalah moberge, motorlodge, motor court, dan motor inn.
* Cottages, adalah suatu bentuk bangunan yang dipergunakan untuk usaha pelayanan akomodasi dengan fasilitas tambahan lainnya, berupa rental sepeda secara gratis untuk kegiatan bersepeda di sekitar cottages.
* Losmen (Hotel Melati), adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap wisatawan sebagai jasa pelayanan.
* Inn, merupakan jenis pelayanan hotel dengan menambahkan fasilitas esktra tanpa dipungut biaya, seperti disediakan guru membatik untuk para tamu tanpa dipungut biaya.
* Bungalow, adalah bangunan atau rumah yang digunakan untuk peristirahatan terakhir, bias terletak dipinggiran kota atau di daerah-daerah luar kota.
* Home stay, adalah bangunan milik pribadi yang digunakan untuk penginapan sementara bagi wisatawan yang ekonominya lemah atau biasa disebut kaum hippies.
* Apartement, adalah penginapan untuk jangka waktu agak lama, misalnya pada waktu musim panas atau musim libur, dimana selain menyediakan kamar tidur juga menyediakan living room, teras, dan kadang-kadang perlengkapan masak- memasak.

2) Restoran atau rumah makan

Restoran adalah industri jasa yang bergerak dibidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Secara umum restoran dibagi dua yaitu: restoran yang berada di dalam hotel dan di luar hotel.

a. Restoran di dalam hotel.

Secara umum restoran didalam hotel terdiri dari 3 macam yaitu:

* + Rotisserie, adalah restoran eksklusif yang memiliki tempat pembakar (Grill) yang dapat dilihat oleh tamu.
  + Grill, adalah restoran untuk chops dibakar menurut selera tamu.
  + Cobaret atau Supper Club, adalah restoran yang mengadakan pertunjukan pada saat makan.

b. Restoran di luar hotel.

* A’la Carte Restaurant: adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan.
* Table D’hotel Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menjual menu table d’hote, yaitu suatu susuna menu yang lengkap (dari hidangan pembuka sampai penutup) dan tertentu.
* Coffee Shop atau Brasserei adalah suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu biasanya berhubungan dengan hotel, pada umumnya system pelayanannya adalah dengan American service dimana yang diutamakan adalah kecepatanya.
* Cafelaria atau Café adalah suatu restoran kecil yang mengutamankan penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.
* Canteen adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan sekolah, tempat dimana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan makan siang atau coffee break, yaitu acara minum kopi disertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupum dalam acara rapat-rapat dan seminar.

3) Transportasi

Transportasi adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan baik darat, laut, maupun udara yang pengelolaannya dapat di lakukan oleh swasta maupun BUMN. Peranan trasnportasi sangat penting di dalam kegiatan pariwisata. Tanpa transportasi wisatawan akan sulit untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat tujuan wisata, jika tidak ada transportasi makan tidak aka nada pariwisata.Jenis-jenis transportasi dalam pariwisata adalah:

a) Transportasi Udara

Penggunaan transportasi udara untuk tujuan perjalanan wisata semakin popular terlebih-lebih untuk perjalanan jarak jauh. Contohnya pesawat terbang.

b) Transportasi laut.

Merupakan jenis transportasi yang bergerak di dalam angkutan laut yang membawa wisatawan melalui jalur laut. Contohnya kapal ferry dan kapal pesiar

c) Transportasi darat

Angkutan darat adalah saran transportasi yang digunakan untuk jalur darat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sepeda motor, mobil, bus, kereta api dan sepeda

4) Objek Wisata

Adalah daya tarik utama wisatawan yang dating berkunjung ke suatu tempat seperti pantai, pegunungan, danau, air terjun dll

5) Atraksi wisata

Suatu kegiatan yang berupa pertunjukan seperti tari, musik dan upacara adat suatu budaya setempat baik tradisional maupun modern.

6) Money Chager

Tempat penukaran mata uang asing atau money changer sekarang ini telah berkembang dengan pesatnya. Penukaran uang tidak hanya dilakukan di bank saja melainkan juga bias dilakukan di perusahaan-perusahaan penukaran uang yang tersebar di daerah-daerah strategis.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Menurut **Sri Soemantri** (1987), pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, asasnya adalah seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan Pemerintah Pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi).

Secara yuridis formal, landasan hukum dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Pasal 18 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan beberapa hal yaitu:

a. Bahwa negara Republik Indonesia terdiri atas daerah Provinsi, daerah Provinsi terdiri atas daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang;

b. Pemerintah Daerah tersebut baik propinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

c. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang UU 23 Tahun 2014 mengartikan Pemerintah Daerah sebagai Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni:

#### a. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi, sebab kata “*de*” mengandung maksud untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya tersebut, arti desentralisasi adalah melepaskan dari pusat (**Koesoemahatinadja**, 1997).

**Amrah Muslimin** (1986) berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah. Dalam suatu Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang Pemerintah Daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya, yang disebut “swatantra” atau otonomi” (**Solly lubis M**, 1983). Secara teoritik, desentralisasi berpangkal dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU 23/2014, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Otonomi Daerah.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan Pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan Pemerintah Pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak Pemerintah Pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut **Hamzah** (2008), pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh Pemerintah Pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

Pada dasarnya tugas pemerintahan semakin banyak yang didesentralisasikan kepada daerah secara berangsur-angsur sesuai dengan peningkatan kemampuan dalam pembangunan daerahnya. Inti dari desentralisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kata “mengatur” dan “mengurus” merupakan dua kata yang memiliki fungsi berbeda terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi kata mengurus ditujukan kepada badan eksekutif daerah yaitu Kepala Daerah dan perangkat daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Kepala daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk khususnya pada Peraturan Daerah. Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan/atau menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Terhadap fungsi mengatur ditujukan kepada badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah yang berlaku dalam lintas daerah masing-masing. Menurut ***The Liang Gie***, (1968) Pentingnya pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

a. dari aspek politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukkan kekuasaan pada satu pihak yang akhirnya dapat menimbulkan tirani;

b. dari aspek demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;

c. dari aspek teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;

d. dari aspek kultural merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu;

e. dari aspek kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.

**Bagir Manan** seperti dikutip oleh **Ateng Syafrudin**, (1991) mengemukakan dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, tujuan desentralisasi adalah antara lain: “meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pusat lebih terfokus pada hal- hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat seperti di daerah. Akan tetapi tidak berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi. Fungsi- fungsi dekonsentrasi dapat dilaksanakan pada alat kelengkapan daerah yang ada seperti selama ini berjalan, yaitu Kepala Daerah. dalam hal demikian, Kepala Daerah merupakan “*de hand van central gouvernement*” di daerah. Kepala Daerah adalah primat desentralisasi, bukan primat dekonsentrasi”.

#### b. Asas Dekonsentrasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan. Urusan Pemerintah Pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah Pusat sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo (**Muhammad Yamin**, 1959) di hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan mengatakan:

"Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada *"doellmatigheid"* berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."

Dalam pengertian yang lain, **Amrah Muslimin** (1986), menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, **Bagir Manan** (2002), berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. **B. Hestu Cipto Handoyo** (2008), memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

#### c. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat diserahi kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

Menurut **Irawan Soejito** (1981), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. **Amrah Muslimin** (1986), menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, **Bagir Manan** (2002), mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang- undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen)* dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal- hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;

b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan;

c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

### 2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan. Saat ini ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi;

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut **Bagir Manan** (1995), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang- undangan itu dinyatakan baik adalah:

a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;

b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis;

c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) dasar pertimbangan yaitu:

1) dasar filosofis, dimana suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.

2) dasar sosiologis, dimana suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

3) dasar yuridis, merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD NRI 1945 menjadi dasar yuridis konstitusional bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang mesti diperhatikan, yaitu:

a. Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;

b. Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan- ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang- undang.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen* dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut *Kelsen* (**Maria Farida Indrati Soeprapto**, 2007) norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*). Berdasarkan teori jenjang norma menurut *Hans Kelsen* mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelengga­ranaan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah (**Bagir Manan**, 2001).

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang- undangan diperlukan sebagai standardisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.

### 3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Perda sebagai produk peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Perda harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UU 12/2011 dan UU 23/2014. Di dalam Pasal 5 UU 12/2011 dan Pasal 137 UU 23/2014 dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1) Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4) Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sisologis.

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut *Modoeng* (**Bagir Manan**, 2001), suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ketepatan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

b. Kesesuaian, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif, peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut *Van der Viles*, (**Hamid Attamimi**, 1990) untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari:

1) Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.

2) Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang- undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3) Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.

4) Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.

5) Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.

6) Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.

7) Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.

8) Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

9) Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.

10) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Mengenai materi muatan Perda dalam UU 12/2011 dijelaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan Perda menurut UU 23/2014 mengandung asas:

1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6) Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## C. Kajian Terhadap Praktik Empiris

### 1. Kondisi Wilayah Kota Bontang

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang–Undang No. 47 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama–sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 159,0303 km2 tersebut terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km2 (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km2 (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 109,24 km2, Kecamatan Bontang Utara seluas 31,85 km2, dan Bontang Barat seluas 17,93 km2. Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 87,20 km2.

Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara. [Wilayah Kota Bontang di sebelah](https://bontangkota.bps.go.id) utara [dan barat berbatasan dengan](https://bontangkota.bps.go.id) Kabupaten [Kutai Timur, sebelah timur](https://bontangkota.bps.go.id) dengan [Selat Makassar, dan sebelah](https://bontangkota.bps.go.id) selatan [dengan Kabupaten Kutai](https://bontangkota.bps.go.id) Kartanegara.

Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat Makasar yang dengan panjang pantai ±24,4 km. Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya membangunan pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum.

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap Kelurahan di Kota Bontang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan / Kelurahan** | | **Luas Wilayah (km2)** | **Jumlah RT** |
| **Bontang Selatan** | | [**109,2422**](https://bontangkota.bps.go.id) |  |
| 1. | Berbas Pantai | [0,5918](https://bontangkota.bps.go.id) | 24 |
| 2. | Berbas Tengah | [0,8835](https://bontangkota.bps.go.id) | 62 |
| 3. | Tanjung Laut Indah | [3,0592](https://bontangkota.bps.go.id) | 33 |
| 4. | Satimpo | [16,1215](https://bontangkota.bps.go.id) | 25 |
| 5. | Tanjung Laut | [1,3774](https://bontangkota.bps.go.id) | 38 |
| 6. | Bontang Lestari | [87,2088](https://bontangkota.bps.go.id) | 19 |
| **Bontang Utara** | | [**31,8542**](https://bontangkota.bps.go.id) | **205** |
| 1. | Api Api | [2,1530](https://bontangkota.bps.go.id) | 42 |
| 2. | Bontang Baru | [2,2163](https://bontangkota.bps.go.id) | 28 |
| 3. | Bontang Kuala | [7,8948](https://bontangkota.bps.go.id) | 20 |
| 4. | Guntung | [11,1869](https://bontangkota.bps.go.id) | 18 |
| 5. | Guntung Elai | [5,0164](https://bontangkota.bps.go.id) | 45 |
| 6. | Loktuan | [3,3868](https://bontangkota.bps.go.id) | 52 |
| **Bontang Barat** | | [**17,9339**](https://bontangkota.bps.go.id) | **93** |
| 1. | Belimbing | [9,6141](https://bontangkota.bps.go.id) | 51 |
| 2. | Kanaan | [6,0167](https://bontangkota.bps.go.id) | 12 |
| 3. | Telihan | [2,3031](https://bontangkota.bps.go.id) | 30 |
|  | **Jumlah** | **159,03** |  |

*Sumber : Kecamatan-Kecamatan Dalam Angka 2017*

Kota Bontang merupakan kota pesisir yang terlihat dari luasan wilayah lautnya yang dominan sekitar 70,30%. Namun demikian dengan melihat karakteristik fisik laut dan banyaknya kegiatan yang sudah ada di wilayah tersebut menjadikan potensi pengembangan wilayah laut sangat sempit. Potensi untuk kegiatan perikanan sekitar 9.384 ha atau sekitar 26,83% dari luas wilayah laut Kota Bontang, sedangkan pengunaan lahan terbesar di wilayah laut Kota Bontang adalah untuk alur pelayaran, baik alur pelayaran swasta, rakyat maupun alur pelayaran nasional.

### 2. Kependudukan

Berdasarkan data BPS, bahwa Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2015 sebesar 163.326 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,32%. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2015 terdapat di Kecamatan Bontang Utara sebesar 2.700 jiwa per km2 disusul Kecamatan Bontang Barat sebesar 1.625 jiwa per km2 dan Kecamatan Bontang Selatan sebesar 619 jiwa per km2.

Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2015 terdiri atas laki-laki 85.522 jiwa dan perempuan 77.804 jiwa. Selama lima tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Sex Rasio atau Rasio jenis kelamin pada tahun 2015 adalah 110 atau dengan kata lain setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki di Kota Bontang. Jumlah penduduk pada tahun 2010-2016 dapat disampaikan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **Laju**  **Pertumbuhan** | **Sex Rasio (%)** |
| 2010 | 75.422 | 68.261 | 143.683 | 4,61 | 110 |
| 2011 | 77.714 | 70.697 | 148.411 | 3,29 | 110 |
| 2012 | 79.723 | 72.366 | 152.089 | 2,48 | 111 |
| 2013 | 81.718 | 74.062 | 155.780 | 2,43 | 110 |
| 2014 | 83.641 | 75.974 | 159.614 | 2,46 | 110 |
| 2015 | 85.522 | 77.804 | 163.326 | 2,33 | 110 |
| 2016 | [87 297](https://bontangkota.bps.go.id) | [79 571](https://bontangkota.bps.go.id) | [166 868](https://bontangkota.bps.go.id) | 2,30 | [109](https://bontangkota.bps.go.id) |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2017

Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin tergambar bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan petumbuhan penduduk perempuan. Ini menjadi petunjuk bahwa banyaknya pendatang yang datang untuk mengadu nasib di Kota Bontang sebagian besar pendatang adalah penduduk laki-laki. Selanjutnya, gambaran perkembangan penduduk berdasarkan kelompok umur dapat disampaikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010-2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Umur /Tahun** | | | **Jumlah** | **RBK** |
| **0 -14** | **15 -64** | **65+** |
| 2010 | 45.942 | 95.806 | 1.591 | 143.683 | 49,61 |
| 2011 | 50.198 | 97.514 | 1.518 | 149.230 | 53,03 |
| 2012 | 49.319 | 102.819 | 1.926 | 154.064 | 49,59 |
| 2013 | 51.141 | 110.432 | 2.078 | 163.651 | 48,20 |
| 2014 | 52.345 | 113.015 | 2.136 | 167.494 | 48,21 |
| 2015 | 49.805 | 111.282 | 2.239 | 163.326 | 47,00 |
| 2016 | 49.640 | 114.784 | 2.442 | 166.868 | 45,37 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Bontang tahun 2010-2015 rata-rata didominasi oleh migrasi penduduk usia produktif. Pertumbuhan tersebut diduga terkait dengan kondisi Kota Bontang yang merupakan daerah industri yang cenderung menjadi tujuan bagi penduduk usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan.

Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik dari segi suku maupun agama. Menurut agama yang dianut, penduduk Kota Bontang mayoritas beragama Islam yang jumlahnya mencapai 88,96%. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8,95%, Katholik sebanyak 1,82 %, Hindu sebanyak 0,20 % dan Budha 0,07 %. Perbedaan suku dan agama tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan daerah.

### 3. Ekonomi Wilayah

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai tambah yang disumbangkan oleh sektor industri pengolahan tidak terlepas dari aktifitas dua perusahaan yaitu PT. Badak LNG sebagai industri pengolah gas alam cair berpengaruh terhadap pembentukan PDRB migas dan PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai produsen pupuk berpengaruh terhadap PDRB tanpa Migas.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Angka sementara nilai PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 tercatat sebesar 59,85 trilyun rupiah. Sedangkan PDRB dengan migas atas dasar harga konstan sebesar 40,24 trilyun rupiah. Berdasarkan komposisi nilai PDRB dengan migas baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Bontang.

PDRB secara sektoral, PDRB tanpa Migas juga sangat di dominasi oleh sektor industri pengolahan dalam hal ini sub sektor industri pengolahan pupuk, amonia dan industri kimia lainnya.

Dilihat dari sisi laju pertumbuhan, perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan dengan tren positif khususnya untuk laju pertumbuhan ekonomi dengan migas. Perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode tahun 2011-2015, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat dari -7,4 persen pada tahun 2011 menjadi tumbuh positif 3,4 persen pada tahun 2015. Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan yang dicapai tertinggi selama sepuluh tahun terakhir dimana pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami pertumbuhan negatif cukup signifikan. Sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.13, pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2015 tumbuh 5,5 persen mengalami peningkatan setelah pada tahun 2014 mengalami pelambatan dengan tingkat pertumbuhan 3,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang cenderung mengalami peningkatan tersebut utamanya ditopang oleh adanya peningkatan kontribusi sektor dominan dalam hal ini sektor industri pengolahan. Berdasarkan data pembangunan Kota Bontang Tahun 2016, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen pada tahun 2015. Tren positif pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat terus dipertahankan agar dapat menopang sektor-sektor ekonomi masyarakat khususnya yang bersentuhan langsung dengan sektor mikro dan UKM.

Tabel 2.4. Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang Tahun 2010-2016\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lapangan Usaha** | [**2013**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2014**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2015x**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2016xx**](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 1 | Pertanian, [Kehutanan, dan Perikanan](https://bontangkota.bps.go.id) | [366 597,49](https://bontangkota.bps.go.id) | [453 171,89](https://bontangkota.bps.go.id) | [514 228,13](https://bontangkota.bps.go.id) | [482 379,82](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 2 | [Pertambangan dan Penggalian](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 432 541,39](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 117 139,80](https://bontangkota.bps.go.id) | [810 849,10](https://bontangkota.bps.go.id) | [360 513,30](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 3 | Industri [Pengolahan](https://bontangkota.bps.go.id) | [48 067 921,86](https://bontangkota.bps.go.id) | [50 518 892,07](https://bontangkota.bps.go.id) | [49 731 812,61](https://bontangkota.bps.go.id) | [45 286 429,16](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 4 | Pengadaan [Listrik dan Gas](https://bontangkota.bps.go.id) | [6 705,76](https://bontangkota.bps.go.id) | [7 599,13](https://bontangkota.bps.go.id) | [12 295,44](https://bontangkota.bps.go.id) | [13 607,13](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 5 | Pengadaan [Air, Pengelolaan Sampah,](https://bontangkota.bps.go.id) Limbah dan Daur Ulang | [8 103,65](https://bontangkota.bps.go.id) | [8 687,23](https://bontangkota.bps.go.id) | [9 289,88](https://bontangkota.bps.go.id) | [10 024,91](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 6 | Konstruksi | [2 230 742,65](https://bontangkota.bps.go.id) | [2 407 377,97](https://bontangkota.bps.go.id) | [2 528 473,04](https://bontangkota.bps.go.id) | [2 590 489,35](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 7 | Perdagangan [Besar dan Eceran; Reparasi](https://bontangkota.bps.go.id) Mobil dan sepeda motor | [1 180 323,20](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 276 902,84](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 365 676,59](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 413 299,15](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 8 | Transportasi [dan Pergudangan](https://bontangkota.bps.go.id) | [552 126,60](https://bontangkota.bps.go.id) | [587 972,51](https://bontangkota.bps.go.id) | [618 703,02](https://bontangkota.bps.go.id) | [654 813,37](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 9 | Penyediaan [Akomodasi dan Makan](https://bontangkota.bps.go.id) | [186 647,77](https://bontangkota.bps.go.id) | [203 618,12](https://bontangkota.bps.go.id) | [219 928,70](https://bontangkota.bps.go.id) | [223 162,47](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 318 264,41 | 348 125,10 | 368 233,97 | 391 721,68 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 358 489,96 | 387 396,91 | 403 136,96 | 420 690,51 |
| 12 | [Real Estate](https://bontangkota.bps.go.id) | [184 504,20](https://bontangkota.bps.go.id) | [198 778,07](https://bontangkota.bps.go.id) | [208 759,22](https://bontangkota.bps.go.id) | [220](https://bontangkota.bps.go.id) 878,55 |
| 13 | [Jasa Perusahaan](https://bontangkota.bps.go.id) | [191 931,02](https://bontangkota.bps.go.id) | [211 229,93](https://bontangkota.bps.go.id) | [219 231,42](https://bontangkota.bps.go.id) | [225](https://bontangkota.bps.go.id) 568,75 |
| 14 | [Administrasi Pemerintahan, Pertahanan](https://bontangkota.bps.go.id) dan jaminan Sosial Wajib | [533 874,92](https://bontangkota.bps.go.id) | [583 551,41](https://bontangkota.bps.go.id) | [655 250,88](https://bontangkota.bps.go.id) | [717](https://bontangkota.bps.go.id) 769,33 |
| 15 | [Jasa Pendidikan](https://bontangkota.bps.go.id) | [323 691,46](https://bontangkota.bps.go.id) | [369 590,83](https://bontangkota.bps.go.id) | [422 869,14](https://bontangkota.bps.go.id) | [464](https://bontangkota.bps.go.id) 711,21 |
| 16 | [Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial](https://bontangkota.bps.go.id) | [228 364,88](https://bontangkota.bps.go.id) | [256 768,49](https://bontangkota.bps.go.id) | [278 208,26](https://bontangkota.bps.go.id) | [303](https://bontangkota.bps.go.id) 153,33 |
| 17 | [Jasa lainnya](https://bontangkota.bps.go.id) | [107 247,53](https://bontangkota.bps.go.id) | [118 511,08](https://bontangkota.bps.go.id) | [135 756,96](https://bontangkota.bps.go.id) | [156](https://bontangkota.bps.go.id) 595,79 |
|  | [**PDRB dengan Migas**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**56 278 078,73**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**59 055 313,39**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**58 502 703,32**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**53 935**](https://bontangkota.bps.go.id) **807,81** |
|  | [**PDRB tanpa Migas**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**20 800 710,07**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**21 155 525,24**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**23 931 760,69**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**24 563**](https://bontangkota.bps.go.id) **777,98** |

*Sumber: BPS Kota Bontang, 2017*

Tabel 2.5. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Bontang (persen) 2013-2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lapangan Usaha** | [**2013**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2014**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2015**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2016**](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 1 | Pertanian, [Kehutanan, dan Perikanan](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,65](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,77](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,88](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,89](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 2 | [Pertambangan dan Penggalian](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,55](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,89](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,39](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,67](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 3 | Industri [Pengolahan](https://bontangkota.bps.go.id) | [85,41](https://bontangkota.bps.go.id) | [85,55](https://bontangkota.bps.go.id) | [85,01](https://bontangkota.bps.go.id) | [83,96](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 4 | Pengadaan [Listrik dan Gas](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,01](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,01](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,02](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,03](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 5 | Pengadaan [Air, Pengelolaan Sampah,](https://bontangkota.bps.go.id) Limbah dan Daur Ulang | [0,01](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,01](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,02](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,02](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 6 | Konstruksi | [3,96](https://bontangkota.bps.go.id) | [4,08](https://bontangkota.bps.go.id) | [4,32](https://bontangkota.bps.go.id) | [4,80](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 7 | Perdagangan [Besar dan Eceran; Reparasi](https://bontangkota.bps.go.id) Mobil dan sepeda motor | [2,10](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,16](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,33](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,62](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 8 | Transportasi [dan Pergudangan](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,98](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,00](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,06](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,21](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 9 | Penyediaan [Akomodasi dan Makan](https://bontangkota.bps.go.id) | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,41 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,73 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | [0,64](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,66](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,69](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,78](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 12 | [Real Estate](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,33](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,34](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,36](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,41](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 13 | [Jasa Perusahaan](https://bontangkota.bps.go.id) |  |  |  |  |
| 14 | [Administrasi Pemerintahan, Pertahanan](https://bontangkota.bps.go.id) dan jaminan Sosial Wajib | [0,95](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,99](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,12](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,33](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 15 | [Jasa Pendidikan](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,58](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,63](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,72](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,86](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 16 | [Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,41](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,43](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,48](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,56](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 17 | [Jasa lainnya](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,19](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,20](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,23](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,29](https://bontangkota.bps.go.id) |
|  | [**PDRB**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**100,00**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**100,00**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**100,00**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**100,00**](https://bontangkota.bps.go.id) |

*Sumber: BPS Kota Bontang, 2017*

Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontnang (Juta Rupiah), 2013-2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lapangan Usaha** | [**2013**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2014**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2015**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2016**](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 1 | Pertanian, [Kehutanan, dan Perikanan](https://bontangkota.bps.go.id) | [294 318,78](https://bontangkota.bps.go.id) | [353 995,35](https://bontangkota.bps.go.id) | [374 762,10](https://bontangkota.bps.go.id) | [352 552,01](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 2 | [Pertambangan dan Penggalian](https://bontangkota.bps.go.id) | [964 493,94](https://bontangkota.bps.go.id) | [665 860,47](https://bontangkota.bps.go.id) | [621 654,10](https://bontangkota.bps.go.id) | [395 075,64](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 3 | Industri [Pengolahan](https://bontangkota.bps.go.id) | [36 256 075,49](https://bontangkota.bps.go.id) | [34 869 242,97](https://bontangkota.bps.go.id) | [36 530 201,98](https://bontangkota.bps.go.id) | [36 081 538,57](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 4 | Pengadaan [Listrik dan Gas](https://bontangkota.bps.go.id) | [7 645,97](https://bontangkota.bps.go.id) | [9 038,30](https://bontangkota.bps.go.id) | [11 852,69](https://bontangkota.bps.go.id) | [12 548,78](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 5 | Pengadaan [Air, Pengelolaan Sampah,](https://bontangkota.bps.go.id) Limbah dan Daur Ulang | [7 247,75](https://bontangkota.bps.go.id) | [7 480,24](https://bontangkota.bps.go.id) | [7 790,20](https://bontangkota.bps.go.id) | [8 215,68](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 6 | Konstruksi | [1 950 847,19](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 991 244,34](https://bontangkota.bps.go.id) | [2 029 310,53](https://bontangkota.bps.go.id) | [2 000 216,95](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 7 | Perdagangan [Besar dan Eceran; Reparasi](https://bontangkota.bps.go.id) Mobil dan sepeda motor | [999 537,87](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 039 278,32](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 068 436,46](https://bontangkota.bps.go.id) | [1 052 298,36](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 8 | Transportasi [dan Pergudangan](https://bontangkota.bps.go.id) | [496 846,30](https://bontangkota.bps.go.id) | [516 466,81](https://bontangkota.bps.go.id) | [529 136,77](https://bontangkota.bps.go.id) | [548 752,76](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 9 | Penyediaan [Akomodasi dan Makan](https://bontangkota.bps.go.id) | [150 709,19](https://bontangkota.bps.go.id) | [155 377,73](https://bontangkota.bps.go.id) | [159 432,26](https://bontangkota.bps.go.id) | [156 437,83](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 312 480,85 | 339 822,49 | 358 143,65 | 379 586,63 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 296 961,30 | 304 999,72 | 305 009,03 | 309 688,18 |
| 12 | [Real Estate](https://bontangkota.bps.go.id) | [169 842,71](https://bontangkota.bps.go.id) | [175 203,28](https://bontangkota.bps.go.id) | [181 384,19](https://bontangkota.bps.go.id) | [187](https://bontangkota.bps.go.id) 691,51 |
| 13 | [Jasa Perusahaan](https://bontangkota.bps.go.id) | [177 556,57](https://bontangkota.bps.go.id) | [192 842,58](https://bontangkota.bps.go.id) | [197 376,94](https://bontangkota.bps.go.id) | [197](https://bontangkota.bps.go.id) 261,20 |
| 14 | [Administrasi Pemerintahan, Pertahanan](https://bontangkota.bps.go.id) dan jaminan Sosial Wajib | [406 625,56](https://bontangkota.bps.go.id) | [428 262,12](https://bontangkota.bps.go.id) | [451 576,78](https://bontangkota.bps.go.id) | [459](https://bontangkota.bps.go.id) 150,60 |
| 15 | [Jasa Pendidikan](https://bontangkota.bps.go.id) | [245 132,86](https://bontangkota.bps.go.id) | [277 125,45](https://bontangkota.bps.go.id) | [302 045,51](https://bontangkota.bps.go.id) | [323](https://bontangkota.bps.go.id) 605,00 |
| 16 | [Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial](https://bontangkota.bps.go.id) | [181 486,11](https://bontangkota.bps.go.id) | [195 058,97](https://bontangkota.bps.go.id) | [199 987,85](https://bontangkota.bps.go.id) | [208](https://bontangkota.bps.go.id) 933,95 |
| 17 | [Jasa lainnya](https://bontangkota.bps.go.id) | [94 527,90](https://bontangkota.bps.go.id) | [100 834,28](https://bontangkota.bps.go.id) | [106 455,34](https://bontangkota.bps.go.id) | [113](https://bontangkota.bps.go.id) 375,96 |
|  | [**PDRB dengan Migas**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**43 012 336,35**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**41 622 133,43**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**43 434 556,36**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**42 786**](https://bontangkota.bps.go.id) **929,62** |
|  | [**PDRB tanpa Migas**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**16 576 778,32**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**17 190 529,54**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**18 196 640,67**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**18 214**](https://bontangkota.bps.go.id) **614,28** |

*Sumber: BPS Kota Bontang, 2017*

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik RegionalBruto Atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut lapangan Usaha di Kota Bontang (persen), 2013-2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lapangan Usaha** | [**2013**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2014**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2015x**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**2016xx**](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 1 | Pertanian, [Kehutanan, dan Perikanan](https://bontangkota.bps.go.id) | [17,91](https://bontangkota.bps.go.id) | [20,28](https://bontangkota.bps.go.id) | [5,87](https://bontangkota.bps.go.id) | [-5,93](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 2 | [Pertambangan dan Penggalian](https://bontangkota.bps.go.id) | [-30,78](https://bontangkota.bps.go.id) | [-30,96](https://bontangkota.bps.go.id) | [-6,64](https://bontangkota.bps.go.id) | [-36,45](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 3 | Industri [Pengolahan](https://bontangkota.bps.go.id) | [-6,39](https://bontangkota.bps.go.id) | [-3,83](https://bontangkota.bps.go.id) | [4,76](https://bontangkota.bps.go.id) | [-1,23](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 4 | Pengadaan [Listrik dan Gas](https://bontangkota.bps.go.id) | [7,95](https://bontangkota.bps.go.id) | [18,21](https://bontangkota.bps.go.id) | [31,14](https://bontangkota.bps.go.id) | [5,87](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 5 | Pengadaan [Air, Pengelolaan Sampah,](https://bontangkota.bps.go.id) Limbah dan Daur Ulang | [0,84](https://bontangkota.bps.go.id) | [3,21](https://bontangkota.bps.go.id) | [4,14](https://bontangkota.bps.go.id) | [5,46](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 6 | Konstruksi | [2,01](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,07](https://bontangkota.bps.go.id) | [1,91](https://bontangkota.bps.go.id) | [-1,43](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 7 | Perdagangan [Besar dan Eceran; Reparasi](https://bontangkota.bps.go.id) Mobil dan sepeda motor | [3,93](https://bontangkota.bps.go.id) | [3,98](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,81](https://bontangkota.bps.go.id) | [-1,51](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 8 | Transportasi [dan Pergudangan](https://bontangkota.bps.go.id) | [4,79](https://bontangkota.bps.go.id) | [3,95](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,45](https://bontangkota.bps.go.id) | [3,71](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 9 | Penyediaan [Akomodasi dan Makan](https://bontangkota.bps.go.id) | 4,02 | 3,10 | 2,61 | -1,88 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,10 | 8,75 | 5,39 | 5,99 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | [9,51](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,71](https://bontangkota.bps.go.id) | [0,00](https://bontangkota.bps.go.id) | 1,53 |
| 12 | [Real Estate](https://bontangkota.bps.go.id) | [5,58](https://bontangkota.bps.go.id) | [3,16](https://bontangkota.bps.go.id) | [3,53](https://bontangkota.bps.go.id) | 3,48 |
| 13 | [Jasa Perusahaan](https://bontangkota.bps.go.id) | [10,80](https://bontangkota.bps.go.id) | [8,61](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,35](https://bontangkota.bps.go.id) | [-](https://bontangkota.bps.go.id)0,06 |
| 14 | [Administrasi Pemerintahan, Pertahanan](https://bontangkota.bps.go.id) dan jaminan Sosial Wajib | [5,76](https://bontangkota.bps.go.id) | [5,32](https://bontangkota.bps.go.id) | [5,44](https://bontangkota.bps.go.id) | 1,68 |
| 15 | [Jasa Pendidikan](https://bontangkota.bps.go.id) | [16,14](https://bontangkota.bps.go.id) | [13,05](https://bontangkota.bps.go.id) | [8,99](https://bontangkota.bps.go.id) | 7,14 |
| 16 | [Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial](https://bontangkota.bps.go.id) | [4,14](https://bontangkota.bps.go.id) | [7,48](https://bontangkota.bps.go.id) | [2,53](https://bontangkota.bps.go.id) | 4,47 |
| 17 | [Jasa lainnya](https://bontangkota.bps.go.id) | [7,09](https://bontangkota.bps.go.id) | [6,67](https://bontangkota.bps.go.id) | [5,57](https://bontangkota.bps.go.id) | 6,50 |
|  | [**PDRB dengan Migas**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**-5,72**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**-3,23**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**4,35**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**-**](https://bontangkota.bps.go.id)**1,49** |
|  | [**PDRB tanpa Migas**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**8,64**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**3,70**](https://bontangkota.bps.go.id) | [**5,85**](https://bontangkota.bps.go.id) | **0,10** |

Sumber: BPS Kota Bontang, 2017

### 4. Presentase Penduduk di Atas garis Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan Kota Bontang yang masih sangat memerlukan penanganan serius dari Pemerintah Kota Bontang. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit di banding kabupaten/kota lainnya, persentase penduduk miskin menjadi relatif tinggi. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Hingga tahun 2014 menurut perhitungan BPS, persentase penduduk miskin Kota Bontang secara perlahan terus mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dimana pada tahun 2014 telah mencapai 94,85%. Dibandingkan data tahun 2011 persentase penduduk di atas garis kemiskinan mengalami peningkatan lebih dari satu persen.

Selama periode tahun 2016-2017. Garis kemiskinan dalam dua tahun terakhir naik sebesar 5,80 persen, pada tahun 2017 menjadi Rp542.985,- per kapita per bulan dari Rp 513.205,- per kapita per bulan pada tahun 2016. Garis kemiskinan Penduduk Kota Bontang pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 542.985,- perkapita per bulan, naik sebesar Rp.29.780,-(5,80%) dari sebesar Rp.513.205,- tahun 2016. Selama 10 tahun terakhir (periode 2007-2017) garis kemiskinan di Kota Bontang telah naik sebesar Rp.327.878,- atau rata-rata sebesar 9,70% per tahun. Sejalan dengan kenaikan harga-harga dari 52 jenis komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 51 jenis komoditi Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan dalam periode tujuh tahun terakhir (2010- 2017) naik sebesar Rp. 229.267,- atau ada kemaikan garis kemskinan rata-rata per tahun sebesar 8,15%.

Berikut ditampilkan data perkembangan penduduk Kota Bontang yang berada di atas garis kemiskinan periode 2011-2017.

Tabel 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2017** |
| 1 | Garis Kemiskinan (Rp.) | 335.764 | 383.200 | 422.951 | 454.392 | - | 542.985 |
| 2 | Jumlah Penduduk diatas Garis Kemiskinan | 139.141 | 143.989 | 147.862 | 151.399 | *-* | - |
| 3 | Persentase | 93,75 | 94,67 | 94,85 | 94.85 | - | - |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)*

### 5. Keadaan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Keberadaan nfrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan daerah:

#### a. Perhubungan

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Bontang memiliki wilayah dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat terbatas. Oleh karenanya, pengembangan industri dan jasa merupakan sektor yang potensial untuk jangka panjang. Untuk mendukung upaya tersebut maka transportasi perlu dikembangkan untuk memudahkan arus barang dan penumpang masuk dan keluar Kota Bontang.

Pada tahun 2016 panjang jalan mencapai 206,399 km, panjang jalan kewenangannya ada pada negara sepanjang 9,073 km dan panjang jalan kota 197,326 km. Jumlah kendaraan yang terdaftar di kota Bontang roda 4 (empat) sebanyak 3.335 buah dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 769 buah. Penambahan roda 4 baru sebanyak 770 buah, roda 2 (dua) 223 buah.

Tabel 2.9. Total Panjang Jalan, Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kota Bontang 2012-2016 (Km)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Data** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. | Total Panjang Jalan | 203,492 | 203,492 | 204,193 | [206,399](https://bontangkota.bps.go.id) | [206,399](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 2. | Panjang Jalan Negara | 9,036 | 9,036 | 9,036 | 9,073 | 9,073 |
| 3. | Panjang Jalan Provinsi | - | - | - | - | - |
| 4. | Panjang Jalan Kabupaten/Kota | 194,456 | 194,456 | 195,157 | [197,326](https://bontangkota.bps.go.id) | [197,326](https://bontangkota.bps.go.id) |
| 5. | Panjang Jalan Usaha Tani | - | - | - | - | - |
| 6. | Pertumbuhan Panjang Jalan(%) | 0 | 0 | 0.701 | - | - |

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, 2017

Tabel 2.10. Panjang Jalan Kota berdasarkan jenis Permukaan di Kota Bontang 2010–2016 (Km)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jalan Kab/Kota** | | | | **Jumlah** |
| **Aspal** | **Kerikil** | **Tanah** | **Lainnya** |
| 2010 | 73.288 | 1.486 | 21.827 | 97.855 | 194.456 |
| 2011 | 71.444 | 1.485 | 21.300 | 100.227 | 194.456 |
| 2012 | 70.582 | 1.485 | 21.300 | 101.089 | 194.456 |
| 2013 | 71.444 | 1.485 | 21.300 | 100.227 | 194.456 |
| 2014 | 93.445 | 1.485 | 20.694 | 79.533 | 195.157 |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2016 | 70.829 | - | - | 136 110 | 206 399 |

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, 2017

#### b. Air Bersih

Penyediaan air yang bersih dan layak digunakan untuk keperluan sehari-hari dapat dipenuhi dengan tersedianya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan PDAM Kota Bontang pada tahun 2016 mencapai 23.411 pelanggan, mengalami [peningkatan sebesar 8,36%](https://bontangkota.bps.go.id) dibandingkan [dengan tahun sebelum](https://bontangkota.bps.go.id)nya. [Seiring dengan peningkatan jumlah](https://bontangkota.bps.go.id) pelanggan, [banyaknya air minum yang](https://bontangkota.bps.go.id) disalurkan [pada PDAM Kota Bontang](https://bontangkota.bps.go.id) juga [mengalami peningkatan sebesar](https://bontangkota.bps.go.id) 15,19%.

Tabel 2.11. Sarana Air Bersih di Kota Bontang 2006-2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Air Baku Utama**  **(m3)** | **Jumlah Pelanggan** | **Kapasitas**  **Produksi**  **(Liter/detik)** | **Jumlah Air**  **Disalurkan**  **(M3)** | **Tingkat bocor**  **(%)** | **Layanan**  **Rumah Tangga (%)** |
| 2006 | 4,459,867.00 | 9,053.00 | 143.39 | 4,163,250.00 | 6.65 | 45.79 |
| 2007 | 4,833,235.00 | 9,795.00 | 215.48 | 4,468,222.00 | 7.55 | 47.63 |
| 2008 | 5,066,672.00 | 10,784.00 | 196.81 | 4,693,910.00 | 7.36 | 50.72 |
| 2009 | 5,227,348.00 | 11,567.00 | 243.05 | 4,854,458.00 | 7.13 | 52.72 |
| 2010 | 5,396,500.00 | 12,087.00 | 233.51 | 4,963,173.00 | 8.03 | 52.57 |
| 2011 | 5,789,495.00 | 12,622.00 | 251.06 | 5,254,410.00 | 9.24 | 53.09 |
| 2012 | 5,690,016.00 | 15,170.00 | 180.81 | 5,803,454.00 | -4.13 | 60.82 |
| 2013 | 4,989,534.46 | 17,055.00 | 182.09 | 5,433,147.00 | -9.24 | 54.60 |
| 2014 | 4,156,744.00 | 18,245.00 | 221.32 | 3,929,920.00 | 5.18 | 64.01 |
| 2015 | 8,304,795,00 | [21 604](https://bontangkota.bps.go.id).00 | - | 7,313,699,00 | 11,94 | - |
| 2016 | 10,218,626,00 | 23.411.00 | - | 8,425,010,00 | 17,05 | - |

Sumber: PDAM Kota Bontang, 2017

#### c. Jaringan Gas Kota

Penyediaan jaringan gas kota untuk konsumsi rumah tangga di layani oleh badan usaha PT. Gas dan Energi Bontang yang disalurkan ke rumah tangga baik rumah tangga kecil, menengah dan besar (RT-1 dan RT-2). Perkembangan pemasokan gas kota dari tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Penyaluran Gas Rumah Tangga di Kota Bontang Tahun 2015-2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kecamatan** | **Tahun** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Bontang Utara | - | 3.603 | 3.611 |
| 2 | Bontang Selatan | - | - |  |
| 3 | Bontang Barat | - | 1.399 | 1.441 |
|  | **Jumlah** | **-** | **5.002** | **5.052** |

Sumber: BPS Kota Bontang, Tahun 2017

#### d. Hotel dan Pariwisata

Fasilitas hotel sebagai elemen kepariwisataan di Kota Bontang perkembangannya dari tahun 2011 sampai tahun 2016 yang berstandar bintang tidak mengalami penambahan jumlah kecuali pada tahun 2011 Bontang memiliki 2 buah hotel bintang 3 meningkat menjadi 3 buah hotel pada tahun 2012, demikian pula penginapan non bintang tidak mengalami perubahan jumlah nya hanya 24 buah. Demikian pula jumlah kamar dan tempat tidur perkembangannya fluktuatif selama periode 2011-2016 rata-rata memiliki 816 kamar dan 1.231 tempat tidur. Perkembangan banyaknya hotel di Bontang disajikan pada Tabel 2.13. dan Tabel 2.14.

Tabel 2.13. Banyaknya Hotel, Berbintang Dan Non Bintang Tahun 2011-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Bintang** | **Non Bintang** | **Jumlah** |
| 2011 | 2 | 24 | 26 |
| 2012 | 3 | 22 | 25 |
| 2013 | 3 | 25 | 28 |
| 2014 | 3 | 24 | 27 |
| 2015 | 3 | 24 | 27 |
| 2016 | 3 | 22 | 25 |

Sumber: Bontang Dalam Angka, 2017

Tabel 2.14. Banyaknya Hotel/Penginapan, Kamar Dan Tempat Tidur Tahun 2011-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Hotel/Penginapan** | **Kamar** | **Tempat Tidur** |
| 2011 | 26 | 685 | 1.042 |
| 2012 | 25 | 671 | 968 |
| 2013 | 28 | 891 | 1.283 |
| 2014 | 27 | 898 | 1.405 |
| 2015 | 27 | 898 | 1.405 |
| 2016 | 25 | 853 | 1.287 |

Sumber: Bontang Dalam Angka, 2017

#### e. Sarana Tempat Kesenian dan Kelompok Kesenian

Sarana tempat kesenian dan banyaknya kelompok kesenian merupakan salah satu potensi yang mendukung kegiatan kepariwisataan Kota Bontang. Adapun jumlah fasilitas sarana tempat kesenian pada tahun 2011-2016 di Kota Bontang perkembangannya mengalami naik turun pada tahun 2011 hanya 3 unit, meningkat menjadi 5 unit tahun 2012-2013, sejak tahun 2014-2015 menjadi 11 unit menurun menjadi 6 unit pada tahun 2016.

Kegiatan kesenian yang terdiri seni tari, seni suara dan seni musik, serta seneme dan lainnya, pada tahun terakhir 2016 hanya seni tari sebanyak 25 kelompok dan seni musik 26 kelompok. Sebagaimana dapat disajikan pada tabel 2.15. dan tabel 2.16.

Tabel 2.15. Jumlah Sarana Gedung/Tempat Kesenian Menurut Kecamatan Di Kota Bontang Tahun 2011-2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Bontang Selatan** | **Bontang Utara** | **Bontang Barat** | **Bontang** |
| 2011 | - | 2 | 1 | 3 |
| 2012 | - | 4 | 1 | 5 |
| 2013 | - | 4 | 1 | 5 |
| 2014 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 2015 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 2016 | 1 | 4 | 1 | 6 |

Sumber: Tahun 2011-2012 : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang

Tabel 2.16. Jumlah Kelompok Kesenian Menurut Kecamatan Di Kota Bontang Tahun 2012-2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Seni Tari** | **Seni Suara** | **Seni Musik** | **Musik & Tari** | **Seni Seneme** | **Lainnya** |
| 2012 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2013 | 39 | 8 | 45 | - | 8 | 18 |
| 2014 | 39 | 4 | 22 | - | 2 | 6 |
| 2015 | 34 | 4 | 22 | - | 3 | 8 |
| 2016 | 25 | 2 | 26 | 1 | - | 1 |

Sumber: - Tahun 2012-2015 : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang

## D. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan Sistem Tata Ruang

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan dalam sistem penataan ruang, adalah merupakan bagian integral dari sistem rencana tata ruang diatasnya. Berdasarkan UUPR No. 26 Tahun 2007 Hirarki Rencana tata Ruang meliputi; RTRWN, RTRWP, RTRWK, (Kabupaten/Kota), RTRW Kecamatan, RDTR serta Rencana Terperinci. Kaitan dengan RIPPARDA, maka harus menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan yang tertuang dalam RTRW merupakan acuan bagi perencanaan di bawahnya termasuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (RIPPARDA).

## E. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan RTRWN dan RTRWP

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain; tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien. RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional.

Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, system jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan system jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diatas, dalam Sistem Perkotaan Nasional Kota Bontang, salah satu kota yang termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) selain Balikpapan, Tenggarong dan Samarinda, artinya Kota Bontang sebagai kawasan kota yang direkomendasikan sebagai simpul utama kegiatan ekspor dan impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Demikian pula Kota Bontang sebagai salah kawasan andalan tingkat nasional maupun provinsi meliputi; kawasan Bontang-Samarinda-Tenggarong, Balikpapan, Penajam dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata. Adapun sektor unggulan kota Bontang adalah; Perikanan dan Pariwisata.

Keterkaitan RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dijabarkan dalam paradigma pembangunan kepariwisataan Provisi Kalimantan Timur yang menekankan pada konsep; Pembangunan pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*), Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab *(Responsible Marketing),* Pariwisata dan Ekonomi Hijau (*Green Economy and Tourism).* Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Tata Kelola yang baik *(Good Tourism Governance)* dan Keterpaduan Kepariwisataan.

Wilayah Kota Bontang, dalam kawasan pengembangan Pariwisata (KPP) di Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam KPP 1 meliputi; kawasan Perkotaan (Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang). Daya tarik Pariwisata KPP1 dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu; daya tarik wisata berbasis alam, daya tarik wisata berbasis wisata sejarah dan budaya, serta daya tarik wisata berbasis buatan.

## F. Kepariwisataan Kota Bontang dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Menurut RIPPARNAS 2010-2025, dalam konstelasi destinasi kepariwisataan yang lebih luas, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang termasuk ke dalam Destinasi Tenggarong dan sekitarnya, bersama-sama dengan Kawasan Tanjung Isuy, Kawasan Tenggarong, Kawasan Samarinda Kota, Kawasan Balikpapan-Samboja, dan Kawasan Bontang-Sangatta. *Destination brand* yang diusung oleh Destinasi Tenggarong adalah *Journey To The Heart of Borneo* (Perjalanan ke Jantung Borneo/Kalimantan). *Brand* ini tampaknya diaplikasikan bagi seluruh destinasi di Pulau Kalimantan, diantaranya Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah tabel penjabaran komponen Destinasi Tenggarong.

Tabel 2.17. Komponen Destinasi Tenggarong

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cakupan Komponen Destinasi** | **Jabaran Komponen Destinasi** | **Tema Produk** | |
| **Core** | **Supporting** |
| 1. Kawasan Tanjung Isuy | * DW: Tanjung Isuy * Akses/hub: Bandara Sepinggan, Bandara Long Apari * Fasilitas Pariwisata (*tour base*): Balikpapan, Samarinda, Tenggarong | Destinasi wisata tirta | Destinasi wisata komunitas masyarakat tradisional |
| 1. Kawasan Tenggarong | * DW: Museum Mulawarman, Penangkaran Buaya, Wisata Alam Bukit Bangkirai, Pulau Kumala, Air Terjun Tanah Merah, Istana Kesultanan/Kedaton, makam raja-raja Kutai, Kawasan wisata budaya Pampang, Tahura Bukit Suharto, Sanba-sanga, Muara Muntai, Muara Kamam, Desa Lekaq Kidau, Desa Tabang, Kota Bangun, dll * Akses/hub: Bandara Sepinggan, Bandara Long Apari * Fasilitas Pariwisata (*tour base*): Balikpapan, Samarinda, Tenggarong | Destinasi wisata situs peninggalan sejarah |  |
| 1. Kawasan Samarinda Kota | * DW: Masjid Raya Darussalam, Pusat kerajinan Sarung Samarinda, Kebun Raya UNMUL Samarinda, Kawasan Citra Niaga, dll * Akses/hub: Bandara Sepinggan, Bandara Samarainda * Fasilitas Pariwisata (*tour base*): Balikpapan, Samarinda, Tenggarong | Destinasi wisata kota |  |
| 1. Kawasan Bontang -Sangatta | * DW: Pulau Beras Basah, Pulau Gusung, Pulau Segajah, Pulau Tobo-tobo, Pulau Tihik-tihik, Pulau Selangor, Pulau Kedindingan, Pulau Agar-agar, Pulau Melahing, Pantai Marina, Bontang Kuala, Taman Nasional Kutai, Taman Cibodas * Akses/hub: Bandara Sepinggan, Bandara Samarinda dan Bandara PT. Badak LNG Bontang. * Fasilitas Pariwisata (*tour base*): Balikpapan, Samarinda, Tenggarong | Destinasi wisata hutan alam dan Pesisir |  |
| 1. Kawasan Balikpapan-Samboja | * DW: Pantai Tanah Merah, meriam Jepang, Tugu Australia, Tugu peringatan Jepang, Wanawisata KM 10, Taman Agrowisata, dll * Akses/hub: Bandara Sepinggan, Bandara Long Apari * Fasilitas Pariwisata (*tour base*): Balikpapan, Samarinda, Tenggarong | Destinasi wisata kota | Destinasi wisata MICE |

Sumber: RIPPARNAS 2010-2025

## G. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan RIPPAR Provinsi Kalimantan Timur

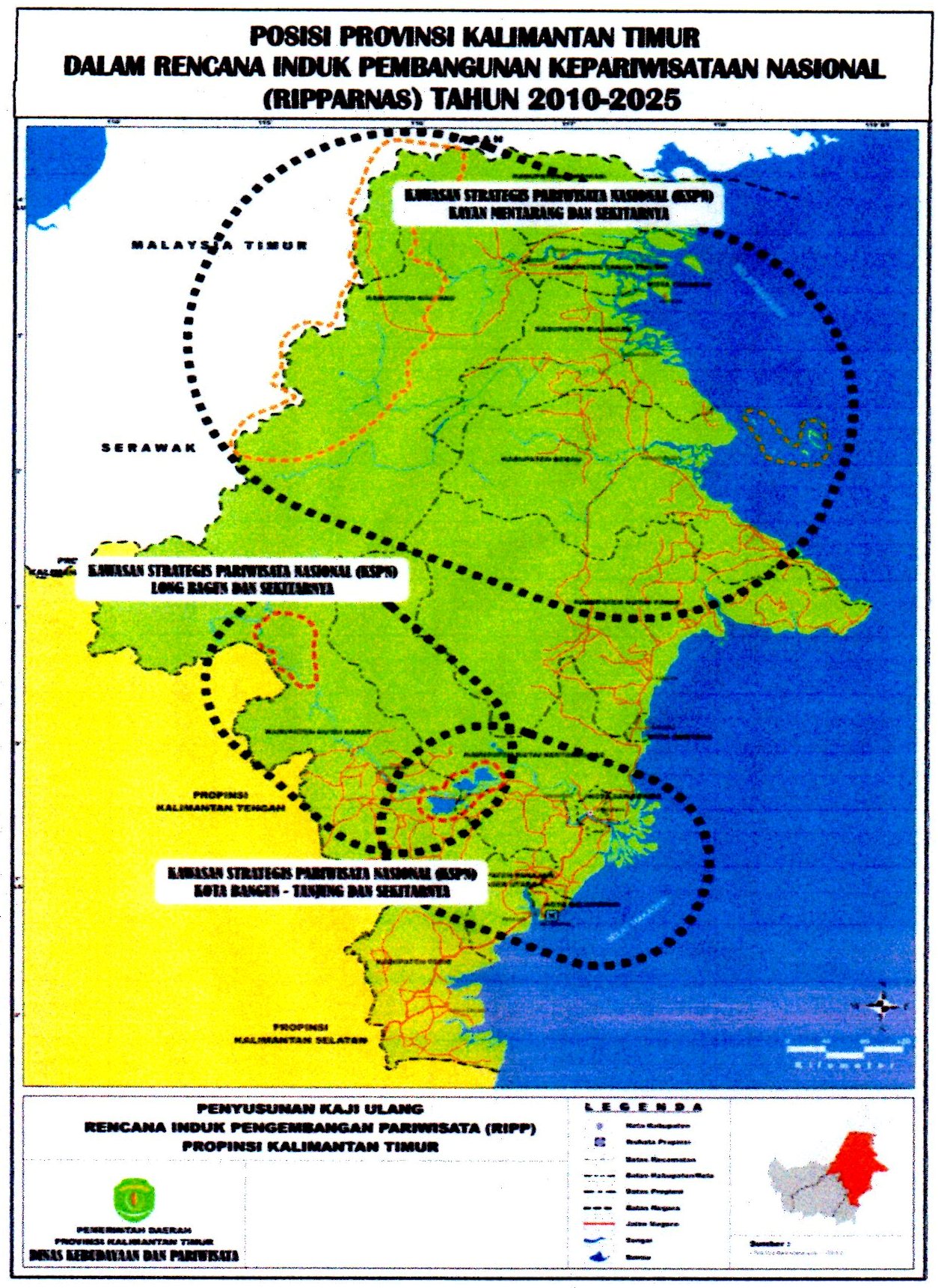
Paradigma pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur, didasakan pada pola pembangunan pariwisata berkelanjutan yang telah menjadi agenda global dalam proses pembangunan.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi kalimantan Timur menggunakan konsep pembagunan pariwisata berkelanjutan yang pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, yaitu :

* Berwawasan lingkungan (*enviromentally sustainable*).
* Diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*).
* Layak secara ekonomi (*economically viable*).
* Memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*).

Keterpaduan kawasan destinasi pariwisata nasional dan provinsi melalui mengintegrasikan KPP 1 Kawasan Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.1. Posisi Provinsi Kaltim Dalam RIPPARNAS Tahun 2010-2025



Sumber: RIPPAR Provinsi Kaltim, 2016-2032

## H. Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan dalam Struktur Ruang Wilayah Kota Bontang

Kebijakan pengembangan kepariwisataan Kota Bontang secara spasial tak dapat dilepaskan dari struktur keruangan wilayah Kota Bontang. Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu pada RDTRK Kota Bontang Tahun 2016-2036 akan menguraikan tentang arahan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kota di Kota Bontang terkait dengan arahan pengembangan di masing-masing kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini;

### 1. BWP Kecamatan Bontang Selatan

#### a. Rencana Struktur Ruang

Arahan rencana struktur ruang kota di Kota Bontang diwujudkan berdasarkan arahan sistem dan fungsi wilayah, hirarki pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Adapun arahan pengembangan Kecamatan Bontang Selatan dalam rencana struktur ruang Kota Bontang adalah sebagai berikut :

**1) Sistem dan Fungsi Wilayah**

Kecamatan Bontang Selatan terbagi menjadi menjadi 6 (enam) wilayah kelurahan, masing-masing wilayah kelurahan masuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWP) yang berbeda-beda. Adapun wilayah kelurahan yang masuk pada setiap bagian wilayah kota (BWP) di Kota Bontang dapat dilihat dibawah ini :

Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Tanjung Laut Indah masuk dalam Bagian Wilayah Kota I (BWP-I), yang mana BWP-I mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan

1. jasa, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung,permukiman, pariwisata, pelabuhan dan perikanan;
2. Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan masuk dalam Bagian Wilayah Kota II (BWP-II) yang mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri strategis kota, pelabuhan dan pergudangan, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung,permukiman, pariwisata, perikanan, militer, alur pelayaran;
3. Kelurahan Bontang Lestari masuk dalam Bagian Wilayah Kota III (BWP-III) yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, industri polusi ringan, dan pusat kegiatan olahraga, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung,permukiman, pariwisata, kawasan lindung, alur pelayaran, perikanan dan bandar udara.

**2) Hirarki Pusat Pelayanan**

Hirarki pusat pelayanan di Kota Bontang terkait dengan kedudukan Kecamatan Bontang Selatan dalam konteks Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan daerah. Untuk itu, di kawasan ini perlu dilengkapi oleh fasilitas berupa perkantoran pemerintahan daerah dan fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya;
2. Kelurahan Tanjung ditetapkan sebagai Sub-Pusat Pelayanan Kota (SPK) yang memiliki fungsi sebagai: sub pusatpelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan dan sebagai pusat perdagangan. Pada SPK ini perlu dilengkapi kantor kecamatan, perkantoran pendukung pemerintah kota, fasilitas SLTA dan pasar;
3. Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Tanjung Laut Indah ditetapkan sebagai Pusat Lingkungan (PL) yang melayani skala lingkungan dan dilengkapi dengan fasilitas pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan persampahan.

**3) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota**

1. Pengembangan jaringan jalan ruas jalan eksisting meliputi ruas jalan arteri primer terdiri dari jalan arteri primer yang menghubungkan Bontang - Samarinda - Sangatta (Trans Kalimantan Timur) dan jalan arteri primer baru sebagai bagian dari Highway Balikpapan-Samarinda-Bontang yang berada di bagian selatan kota melintasi lokasi kawasan pengembangan baru di Kelurahan Bontang Lestari; dan
2. Pengembangan jaringan jalan ruas jalan rencana meliputi pengembangan ruas jalan rencana meliputi pengembangan jalan akses masuk Kota Bontang dari Nyerakat (Kelurahan Bontang Lestari) ke arah Trans Kalimantan Timur, pengembangan jalan kota diarahkan ke Kelurahan Bontang Lestari, dan pengembangan jalan lingkar pesisir (coastal road).
3. Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pengembangan rute angkutan umum diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dan pengembangan angkutan umum yang mengarah kepada angkutan umum massal.
4. Penataan pelabuhan berupa pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut sebagai pelabuhan pengumpan untuk jaringan pengumpul angkutan barang;
5. Penataan pelabuhan berupa pengembangan terminal khusus di Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi sebagai Terminal Khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan/aktivitas industri dan terminal industri batubara;
6. Penataan pelabuhan berupa pengembangan terminal khusus migas di Kelurahan Satimpo berfungsi sebagai Terminal Khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan/aktivitas industri Migas;
7. Pengembangan sistem jaringan transportasi udara oleh Bandar Udara Bontang Lestari sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;
8. Pengembangan jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan yang terdapat di Kelurahan Bontang Lestari dan Kelurahan Satimpo;
9. Pembangunan jaringan fiber optik untuk melayani Kelurahan Bontang Lestari;
10. pengembangan menara telekomunikasi (BTS) diarahkan ke arah Kelurahan Bontang Lestari;
11. Sistem jaringan sumber daya air di Sungai Nyerakat;
12. Pengembangan kolam retensi yang diarahkan pada daerah peralihan dari dataran tinggi ke dataran rendah dan memiliki banyak potensi outlet sungai baik besar maupun kecil di Kelurahan Bontang Lestari;
13. pengerukan rawa-rawa di daerah dataran rendah (Bontang Selatan) yang masih belum berubah menjadi lahan permukiman sebagai daerah tampungan atau kolam retensi;
14. Pengembangan area pelayanan dengan peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan di Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari;
15. Pengembangan prasarana penampungan sampah dengan pengembangan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang meliputi pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur-ulangan, pemrosesan akhir sampah di Kelurahan Bontang Lestari;
16. Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam hal ini pengolahan lumpur tinja akan dilakukan pada setiap perumahan di atas air dan Kelurahan Bontang Lestari;

#### b. Rencana Pola Ruang

Arahan rencana pola ruang kota di Kota Bontang diwujudkan berdasarkan arahan rencana pola ruang kawasan lindung dan arahan rencana pola ruang kawasan budidaya. Adapun arahan pengembangan Kecamatan Bontang Selatan dalam rencana pola ruang Kota Bontang adalah sebagai berikut :

**1) Arahan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung**

Arahan rencana pola ruang kawasan lindung Kota Bontang terhadap Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Kecamatan Bontang Selatan sebagai kawasan hutan lindung di Kota Bontang seluas 5.698,57 hektar (Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Selatan);
2. Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Tanjung Laut Indah ditetapkan sebagai kawasan rawa yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas 23,88 hektar (Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Api-Api dan Kelurahan Loktuan);
3. Kelurahan Berbas Pantai dan Kelurahan Tanjung Laut Indah ditetapkan sebagai sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
4. Penetapan sempadan sungai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter kanan-kiri dihitung dari tepi sungai;
5. Terdapat rencana penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Bontang Selatan seluas 1.044,72 hektar untuk dialokasikan sebagai hutan kota dan taman kota, RTH olahraga seluas 171,65 hektar yang diarahkan di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara, alokasi tempat pemakaman umum (TPU seluas 23,08 hektar yang tersebar di tiga kecamatan;

Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai kawasan rawan gelombang pasang. Sedangkan, Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Satimpo ditetapkan pula sebagai kawasan rawan genangan banjir.

**2) Arahan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya**

Arahan rencana pola ruang kawasan budidaya Kota Bontang terhadap Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Kelurahan Berbas Pantai sebagai kawasan perumahan kepadatan tinggi. Sedangkan, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Satimpo ditetapkan sebagai kawasan perumahan kepadatan sedang. Sementara, Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai kawasan perumahan kepadatanrendah;
2. Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai sentra tradisional sebagai rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
3. Pengembangan kawasan industri besar berupa industri petrokimia dan migas di Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari. Sedangkan, khusus untuk Kelurahan Bontang Lestari selain ditetapkan sebagai kawasan industri besar, juga ditetapkan sebagai kawasan industri sedang, kecil dan kawasan pergudangan umum;
4. Di Kelurahan Berbas Pantai dan Kelurahan Bontang Lestari akan dikembangkan kawasan hutan mangrove;
5. Pengembangan kawasan wisata pendidikan industri di Kelurahan Tanjung Laut Indah;
6. Kelurahan Bontang Lestari ditetapkan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.

#### c. Rencana Kawasan Strategis

Di Kota Bontang, terdapat 2 (dua) kawasan strategis kota yang mencakup Kawasan Strategis Bontang Lestari sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan strategis wilayah pesisir sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan.

Bontang, rencana pola ruang Kota Bontang dan penetapan kawasan strategis terkait dengan kedudukan Kecamatan Bontang Barat. Adapun analisis rinci tentang kedudukan Kecamatan Bontang Barat dalam tata ruang Kota Bontang, dapat dilihat pada uraian berikut ini.

### 2. BWP Kecamatan Bontang Barat

#### a. Rencana Struktur Ruang

Pada sub-bab ini, akan menguraikan rencana sistem pusat-pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan. Berdasarkan analisis RTRW Kota Bontang terkait kedudukan Kecamatan Bontang Barat dalam konteks Kota Bontang, maka dapat diuraikan beberapa arahan rencana sebagai berikut:

**1) Sistem Pusat-Pusat Pelayanan**

Secara umum, di Kota Bontang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian wilayah kota yang masing-masing bagian wilayah kota memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kecamatan Bontang Barat sendiri, masuk dalam bagian wilayah kota II yang notabene memiliki peran dan fungsi sebagai ***Kawasan Industri Strategis Kota, Pelabuhan dan Pergudangan***. Dengan demikian, secara fungsional kawasan BWP II merupakan kawasan integrasi daratan dan lautan sesuai dengan batasan kecamatan yang ada.

Terkait kedudukan Kecamatan Bontang Barat dalam konteks Kota Bontang, Kecamatan Bontang Barat diarahkan sebagai kawasan industry strategis kota, sedangkan untuk fungsi sebagai pelabuhan dan pergudangan diarahkan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara. Selain memiliki peran dan fungsi utama sebagai kawasan industry strategis kota, Kecamatan Bontang Barat memiliki peran dan fungsi penunjang sebagai kawasan Permukiman, Pariwisata, Perikanan, Kawasan Militer, dan Kawasan Lindung/ Konservasi.

Secara hirarki, kelurahan-kelurahan di Kecamatan Bontang Barat (Kelurahan Belimbing, Kelurahan Telihan dan Kelurahan Kanaan) ditetapkan sebagai Pusat Lingkungan yang Permukiman, Pariwisata,Perikanan, Kawasan Militer, dan Kawasan Lindung/Konservasi.

Pelayanan yang dapat dilayani pada pusat lingkungan meliputi :

1. Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan;
2. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga;
3. Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama;
4. Pelayanan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah.

**2) Sistem Transportasi**

Dalam sistem transportasi ini, akan menguraikan tentang sistem transportasi jalan. Sedangkan, untuk sistem transportasi kereta api, sistem transportasi laut, dan sistem transportasi udara tidak akan diuraikan pada sub-bab ini karena tidak ada arahan pengembangan sistem transportasi tersebut yang terkait dengan Kecamatan Bontang Barat. Adapun arahan rencana sistem transprtasi jalan di Kecamatan Bontang Barat dalam konteks Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Arahan pengembangan sistem transportasi jalan di Kecamatan Bontang Barat adalah pengembangan prasarana jalan kota dengan mengembangkan jalan kolektor yang menghubungkan Bontang Baru dengan Belimbing, Perumahan PKT, Tanjung Laut, Berbas Tengah, dan Berbas Pantai.
2. Selain pengembangan jalan kolektor dalam skala kota, ada Pengembangan Terminal tipe B yang ada di Kota Bontang melayani rute-rute perjalanan antar kota dalam provinsi yakni rute Samarinda-Bontang, Bontang-Sangatta, dan Bontang-Balikpapan. Terletak di Kilo Enam di Kelurahan Telihan Bontang Barat;
3. Rencana Pengembangan Terminal tipe C berlokasi di Kelurahan Telihan.

**3) Sistem Jaringan/Saluran Utilitas**

Dalam rencana sistem jaringan/saluran utilitas, akan menguraikan rencana saluran drainase, rencana pengendalian banjir, rencana saluran air limbah, rencana jaringan persampahan, rencana jaringan listrik dan rencana jaringan telepon kabel dan seluler.

1. **Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi**

Rencana Pengembangan Sistem Energi di Kecamatan Bontang Barat terdiri dari rencana jaringan pipa gas bumi yang terdapat di Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Belimbing.

1. **Rencana Saluran Drainase**

Rencana pengembangan saluran drainase di Kecamatan Bontang Barat dalam rencana Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Penambahan kapasitas atau dimensi sungai-sungai besar guna menampung lebih banyak limpasan air hujan terutama saat musim hujan tinggi seperti bulan Desember, Januari dan Pebruari. Sungai besar di Kecamatan Bontang Barat adalah Sungai Bontang dengan dimensi rencana 5 m x 25 m,
2. Penambahan kapasitas atau dimensi sungai-sungai kecil dengan dimensi rencana minimal 3 m x 5 m,
3. Penataan kawasan bantaran sungai terutama yang masuk dalam garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai di Kota Bontang ditetapkan minimal 10 m dari bibir sungai,
4. Pengembangan kolam retensi dengan memanfaatkan lembah-lembah di Kelurahan Kanaan. Kolam retensi ini dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air baku bagi pelayanan air bersih di Kota Bontang,
5. Peningkatan saluran drainase baik sekunder dan tersier di seluruh kawasan Bontang,
6. Pengembangan sistem jaringan drainase kota Bontang, dan
7. Penambahan kapasitas dimensi pada saluran drainase.

#### b. Rencana Pengendalian Banjir

Rencana pengendali banjir terdiri dari arahan-arahan sebagai berikut :

1. Rencana penanganan dalam menanggulangi daya rusak air (banjir) pada Jalur Siagian dengan cara peningkatan Danau Kanaan,
2. Rencana Peningkatan kapasitas bangunan persilangan (gorong-gorong) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Belimbing,
3. Mempertahankan tampungan air sementara (alami) yang berupa daerah depresi dan rawa pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Belimbing,
4. Program pengendalian banjir terpadu pada sistem Bontang dengan normalisasi sungai bontang dan peningkatan bangunan persilangan, peningkatan Danau Kanaan (termasuk pemanfaatan depresi Kanaan), pembuatan bangunan pengendali sedimen (BPS), pembuatan bendali/waduk Sukarahmad, pemasangan pintu pasang-surut dan konservasi lahan kritis maupun konservasi pantai (daerah muara),
5. Program pengendalian banjir terpadu pada sistem belimbing meliputi normalisasi sungai Belimbing, peningkatan bangunan persilangan(gorong-gorong Jl.Pupuk Raya) dan konservasi lahan kritis maupun konservasi pantai (daerah muara).

#### c. Rencana Saluran Air Bersih dan Kawasan Resapan

1. Rencana pengembangan sumber air baku berupa waduk atau kolam retensi sebagai cadangan air dalam jangka panjang yang diarahkan pada di Kelurahan Kanaan, Kelurahan Telihan dan Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat dengan cara memperbesar kapasitas waduk atau kolam untuk menampung air hujan dalam suatu kawasan sehingga tidak menggenangi tempat permukiman atau kawasan terbangun lainnya dan dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan seperti sumber air baku, tempat pariwisata air. Kriteria sebagai lokasin waduk adalah kawasan berupa lembah-lembah yang terdapat di Kecamatan Bontang Barat
2. Rencana pengembangan daerah resapan :
3. Reboisasi lahan Hutan lindung dan Taman Nasional Kutai,
4. Daerah resapan yang harus dilindungi dan harus segera dipulihkan sebagaimana fungsinya,
5. Konservasi dan informasi tentang pentingnya melestarikan daerah resapan, dan
6. Kebijakan pemanfaatan ruang tidak merusak daerah resapan.

#### d. Rencana Saluran Air Limbah

Rencana pengembangan prasarana pengolahan air limbah di Kota Bontang diprioritaskan pada pengembangan tampungan individual yaitu berupa *septic tank* dan sumur resapan. Kondisi kontur atau topografi Bontang yang variatif dan penyebaran penduduk yang belum merata, menyebabkan penggunaan sistem terpadu (*off site*) menjadi mahal. Untuk limbah rumah tangga, masyarakat masih menggunakan cara lama yaitu *septic tank* masih dibuang/dibuatkan bak penampung sendiri. Di Beberapa kawasan ada yang belum memiliki tempat pembuangan (*septic tank*) dan ada juga yang dibuang ke sungai.

#### e. Rencana Persampahan

Rencana persampahan meliputi:

1. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan melalui penyediaan prasarana penampungan dan saran pengangkutan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang Sampah di kawasan industri ditangani sendiri oleh perusahaaan yang bersangkutan, di Kelurahan Belimbing ditangani oleh PT Pupuk Kaltim.
2. Pengembangan area pelayanan
3. Peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan Kecamatan Bontang Barat terutama di Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Kanaan,
4. Peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan dalam hal kecepatan pengangkutan dan frekuensi pengangkutan tiap harinya dari 1-2 kali menjadi 3 kali sehari
5. Pengembangan prasarana penampungan sampah
6. Pembangunan TPS pada tiap kelurahan. Dengan kapasitas tiap TPS sebesar 6 m3, sampai tahun 2027 dibutuhkan minimal 108 TPS
7. Pembangunan TPA terpadu yang dialokasikan di Bontang Lestari. TPA Bontang Lestari saat ini sudah dalam proses pasca konstruksi.
8. Pembangunan penampungan sampah sementara (TPS) di Bontang Lestari

#### f. Rencana Jaringan Listrik

Rencana pengembangan jaringan listrik meliputi:

1. Pengembangan pusat-pusat pembangkit listrik tenaga diesel

Jumlah daya yang dibutuhkan sampai tahun 2027 di Kota Bontang adalah sebesar ± 177,3 MW. Kebutuhan sebanyak itu akan dipenuhi oleh PLTD-PLTD baik eksisting maupun baru disamping dari jaringan listrik regional.

1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga altenatif

Tenaga alternatif dimaksud adalah tenaga gas yang bahan bakunya relatif dekat di sekitar Kota Bontang. Dengan pemanfaatan sumber daya gas, diharapkan biaya tarif dasar listrik dapat ditekan karena biaya bahan bakar gas relatif lebih murah dibanding bahan bakar minyak seperti diesel.

1. Pengembangan sambungan listrik ke konsumen

Jumlah sambungan listrik yang dibutuhkan sampai tahun 2027 sebesar ± 84.753 sambungan baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

#### g. Rencana Jaringan Telepon dan Tower

1. Rencana pengembangan jaringan telepon terutama diarahkan untuk penambahan jumlah sambungan rumah tangga, perdagangan, jasa, perkantoran dan industri. Kebutuhan penambahan sambungan sampai tahun 2027 diperkirakan mencapai 84.753 SST dengan asumsi pelayanan tercapai 100 %,
2. Rencana pengembangan Tower (BTS) ,
3. Perlunya pengawasan dan pemberian ijin khusus terhadap pihak operator yang akan membangun dengan persyaratan yang disepakati secara bersama agar suatu kota tidak menjadi “Kota Tower”.
4. Mempertimbangkan kondisi kontur dan ketinggian, dan letak Tower (BTS) tidak berdekatan dengan permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, dan pusat kota.

#### h. Rencana Pola Ruang

Pada sub-bab ini akan menguraikan tentang rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Adapun uraian rinci mengenai rencana pola ruang di Kecamatan Bontang Barat dalam konteks Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung
2. **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan resapan air berfungsi menjaga dan mempertahankan konservasi air tanah. Termasuk kategori kawasan resapan air adalah sebagai berikut :

(1) Kawasan Rawa

Kawasan rawa yang memiliki fungsi sebagai kawasan perlindungan, berperan juga sebagai kawasan resapan air (catchment area). Kawasan rawa di Kecamatan Bontang Barat terdapat di kelurahan Kanaan.

1. **Kawasan Perlindungan Setempat**

(1) Sempadan danau dan waduk

Dalam Keppres No. 32 tahun 1990 terdapat pasal yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan perlindungan setempat. Kriteria kawasan sekitar danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik/danau antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Kecamatan Bontang Barat terdapat danau/situ. Keberadaan situ – situ tersebut perlu dilindungi agar terjaga kelestarian dan fungsinya. Oleh karena itu, danau/situ yang akan dimanfaatkan dengan tujuan tertentu harus tetap menjaga fungsi pelestariannya. Diharapkan kebutuhan danau tidak bersifat statis, artinya akan bertambah jumlah atau luasnya sesuai dengan perkembangan lahan terbangun kota. Rencana pengembangan danau/situ di Kecamatan Bontang Barat adalah di Danau di Kanaan (BWP II) seluas 17,1 ha.

(2) DAS Pada Wilayah Sungai

Kelurahan Telihan dan Kelurahan Kanaan termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bontang. Dimana DAS Bontang membentang dari kelurahan Bontang Kuala, Api-Api, Kanaan, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Sungai Bontang melayani kawasan di kelurahan Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-Api, Kanaan, Gunung Elai, dan Gunung Telihan dan sekitarnya. Luas DAS Bontang kurang lebih 53,28 Km2 dengan panjang aliran sungai sepanjang 25,62 Km, Lebar sungai antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

1. **Kawasan Rawan Bencana**

Wilayah Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Telihan merupakan wilayah yang merupakan kawasan rawan bencana berupa bencana benjir. Hal ini dikarenakan, kedua wilayah kelurahan tersebut merupakan wilayah yang dilalui DAS Bontang yang pada saat hujan deras air meluap yang menyebabkan banjir.

1. Kawasan Budidaya

Kebijakan rencana pola ruang kawasan budidaya di Kecamatan Bontang Barat terdiri dari peruntukkan lahan untuk kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, objek wisata buatan/objek wisata taman, sarana transportasi dan kawasan non-perkotaan berupa kawasan peternakan. Adapun uraian rinci mengenai masing-masing rencana pola ruang kawasan budidaya di Kecamatan Bontang Barat menurut RTRW Kota Bontang adalah sebagai berikut ini.

1. **Kawasan Perumahan**

Kawasan perumahan di Kecamatan Bontang Barat terdiri dari jenis permukiman industry /pabrik/perdagangan yang diarahkan di Kelurahan Belimbing yaitu KPR BTN PKT dan di Kelurahan Telihan yaitu Indominco.

Selain jenis permukiman industri/ pabrik/ perdagangan, di Kecamatan Bontang Barat juga diarahkan permukiman instansi/ perkantoran swasta/ pemerintahan yang terdapat/ diarahkan di Kelurahan Telihan yaitu Perumahan Disnaker.

1. **Kawasan Perdagangan dan Jasa**

Arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan pada upaya penegasan, reformulasi dan pengendalian arahan RTRW sebelumnya berkaitan dengan upaya pemisahan antara kegiatan perdagangan dan jasa yang memiliki skala pelayanan interregional, regional dan kegiatan perdagangan yang memiliki jangkauan pelayanan internal Kota Bontang dan pelayanan lokal. Arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa di Kecamatan Bontang Barat yaitu Komesrsial Sentra Tradisional yang terdapat dan berpusat di Kelurahan Telihan.

1. **Objek Wisata Buatan/Obyek Wisata Taman**

Wisata Taman Kota adalah suatu lokasi yang sengaja dibuat sebagai ruang terbuka dan dijadikan taman dengan beberapa fasilitas penunjang seperti taman bermain anak, penyediaan untuk pedagang kaki lima. Obyek wisata ini di Kecamatan Bontang Barat terdapat di Kelurahan Kanaan berupa rencana pengembangan Danau Kanaan.

1. **Sarana Transportasi**

Rencana pola ruang kawasan budidaya berupa sarana transportasi darat di Kecamatan Bontang Barat adalah berupa terminal yang terletak di Kelurahan Telihan.

1. **Kawasan Non-Perkotaan (Peternakan)**

Sektor peternakan belum optimal dalam menunjang sektor basis Kota Bontang. Melihat fungsi Kota Bontang sebagai kota jasa maka perlu dipikirkan sebuah rencana pembuatan kawasan/Zona khusus untuk pengembangan, pembibitan ternak dari berbagai macam varietas unggulan, serta direncanakan RPH Kota Bontang. Di kelurahan Kanaan yang mayoritas adalah masyarakat Tator (Sulawesi Selatan) banyak yang memelihara babi dan ada juga lokasi untuk pengemukan sapi/kerbau. Rencana alokasi ruang untuk RPH seluas 14,9 Ha dan Village Breeding Center (VBC) seluas 118 Ha

### 3. BWP Kecamatan Bontang Utara

#### a. Rencana Struktur Ruang

* 1. Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Sistem perwilayahan adalah organisasi wilayah pengembangan berupa Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWP.

BWP mencakup:

1. BWP I terdiri dari 8 (delapan) kelurahan meliputi: Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah;
2. BWP II terdiri dari 6 (enam) kelurahan meliputi: Kelurahan Satimpo, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Guntung; dan
3. BWP III mencakup 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Bontang Lestari.

Fungsi perwilayahan wilayah Kota Bontang mencakup:

1. BWP I mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, pelabuhan, dan perikanan;
2. BWP II mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri, pelabuhan dan pergudangan, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, perikanan, militer, alur pelayaran; dan
3. BWP III mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, industri, dan pusat kegiatan olahraga, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, alur pelayaran, perikanan dan bandar udara.
   1. Hirarki Pusat Pelayanan

Hirarki pusat pelayanan meliputi :

1. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan kota yang ditetapkan di BWP III yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan daerah, yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas mencakup:
2. Perkantoran pemerintahan daerah;
3. Fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya.
4. Sub pusat pelayanan kota berperan sebagai pendukung kegiatan kota, yang ditetapkan dengan ketentuan:
5. Sub pusat pelayanan kota di BWP I terdapat di Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Tanjung Laut memiliki fungsi sebagai: sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan dan sebagai pusat perdagangan, yang dilengkapi dengan fasilitas:

* Kantor kecamatan;
* Perkantoran pendukung pemerintahan kota;
* Sekolah lanjutan tingkat atas;
* Pasar;

1. Sub pusat pelayanan kota di BWP II terdapat di Kelurahan Loktuan memiliki fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan pusat transportasi laut, yang dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan nasional.
2. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan skala lingkungan tersebar di 15 (lima belas) kelurahan yakni Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Gunung Elai,Kelurahan Loktuan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Gunung Telihan, dan Kelurahan Kanaan, yang ditetapkan meliputi:
3. pelayanan pemerintahan;
4. pelayanan kesehatan;
5. pelayanan pendidikan; dan
6. pelayanan persampahan.
   1. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota
7. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
8. Rencana Jaringan Jalan

* Rencana peningkatan kualitas permukaan jalan dari jalan S. Parman sampai jalan Jl. KH. Ahmad Dahlan.
* Pengembangan jalan baru 2 lajur di tepian pantai *(coastal road)* yang menghubungkan antara kawasan pelabuhan Lhok Tuan sampai ke Bontang Kuala (ROW 20 m).

1. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut
2. Rencana Pelabuhan Laut

* Penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai pelabuhan pengumpul berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar propinsi.
* Pengembangan terminal khusus terminal industri di Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan.

1. Pengembangan Alur Pelayaran

* Pelebaran dan pengerukan alur pelayaran menuju pelabuhan Lhok Tuan, Pelabuhan PPI Tanjung Limau, dengan lebar minimal diharapkan 45 m dengan kedalaman minimal 7 m.

1. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

* Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota Bontang salah satunya Sungai Guntung
* Pembuatan sungai-sungai kecil buatan yang menghubungkan antara kawasan-kawasan rendah, cekungan atau lembah ke Sungai Guntung dan Sungai Bontang
* Penanganan terhadap daerah genangan di Kota Bontang yang salah satunya adalah pengerukan rawa-rawa di daerah dataran rendah (Bontang Utara) yang masih belum berubah menjadi lahan permukiman sebagai daerah tampungan atau kolam retensi.

1. Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

* Pengembangan drainase kota secara terpadu
* Perbaikan saluran drainase sekunder dan tersier
* Penambahan dimensi pada saluran drainase
* Pembangunan TPS pada tiap kelurahan
* Pengembangan sistem jaringan komunal yang berfungsi untuk melayani sebagian kelompok masyarakat atau sebagian wilayah kota
* Pengembangan sistem buangan komunal air limbah yang dikembangkan pada kawasan perumahan yang akan dikembangkan serta pada kawasan perumahan atas air Bontang Kuala

1. Sistem Jaringan Energi

Rencana Pengembangan Pipa Gas Bumi di Kota Bontang yang terdapat diwilayah studi sebagai berikut:

* Jaringan Pipa Gas untuk melayani Perusahaan yang salah satunya terdapat di Kelurahan Guntung
* Pembangunan prasarana jaringan gas yaitu Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara sebanyak 6.163 Kepala Keluarga (KK), dan Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara sebanyak 8.352 KK.

#### b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah yang terdapat di Kawasan Kota Bontang antara lain diuraikan sebagai berikut :

**Kawasan Lindung**

Kawasan lindung yang berada di kawasan Kota Bontang terdiri atas:

1. **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahanya adalah kawasan rawa yang terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-api dan Kelurahan Loktuan.

1. **Kawasan perlindungan setempat**

Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kawasan Kota Bontang antara lain sempadan pantai, kawasan pantai dengan vegetasi mangrove serta sempadan sungai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1. **Kawasan suaka alam dan cagar budaya**

Kawasan suaka alam dan cagar budaya yang berada di Kawasan Kota Bontang Meliputi kawasan Taman Nasional Kutai dan kawasan Cagar Budaya yang terdapat di perumahan atas air di Kelurahan Bontang Kuala.

1. **Kawasan Rawan Bencana alam**

Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kawasan Kota Bontang adalah rawan gelombang pasang di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru dan kawasan rawan banjir Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, dan Kelurahan Guntung.

**Kawasan Budidaya**

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Kawasan budi daya Kota adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Rencana kawasan budidaya di Kawasan Kota Bontang meliputi:

1. Kawasan peruntukan perumahan;
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
3. Kawasan peruntukan perkantoran;.
4. Kawasan peruntukan industri;
5. Kawasan peruntukan pariwisata;
6. Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau;
7. Kawasan Peruntukan Pertahaman dan Keamanan; serta
8. Kawasan Peruntukan Lainnya, yaitu kawasan peruntukan pertanian.

## I. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kota Bontang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang pembangunan kepariwisaaan pada pasal 8 disebutkan bahwa; Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/ Kota.

Sebagai penjabaran dari produk perundang-undangan yang terkait dengan perencanaaan pembangunan kepariwisataan, maka Pembangunan kepariwisataan dapat meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, distinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

Kebijakan keterpaduan antara keruangan dengan pembangunan kepariwisataan Kota Bontangdiarahkan sebagai berikut:

1. **Kawasan Pariwisata Alam**, termasuk diantaranya:

* Kawasan pariwisata alam yang diarahkan di Taman Nasional Kutai dengan sebagian wilayahnya yang termasuk pada wilayah Kota Bontang. Rencana pengembangan pariwisata di TNK adalah dengan membuat hutan bakau sebagai wadah ekowisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya.
* Selain itu rencana pengembangan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan wisata ekologis/ekowisata ditempatkan di Berbas Pantai dan Teluk Nyerakat.

2. **Kawasan Pariwisata Buatan/Objek Wisata Taman,** merupakan kawasan wisata taman kota/ruang terbuka hijau kota yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti taman bermain anak serta penyediaan lahan bagi pedagang kaki lima. Daya tarik wisata ini terdapat di kawasan:

* Danau PKT
* Cibodas Park
* Rencana pengembangan Danau Kanaan dan Kelurahan Bontang Lestari.
* Taman Tugu Ekuator

3. **Kawasan Pariwisata Sejarah (Budaya) dan Bangunan Arsitektural,** merupakan aset peninggalan berupa benda, rumah, tradisi Kota Bontang yang dapat dioptimalkan bagi pengembangan wisata. Kawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

* Permukiman nelayan tertua di kelurahan Bontang Kuala
* Wisata budaya yang digelar dalam event khusus (mencakup atraksi kesenian dan adat) seperti:
* Pengobatan dalam Prosesi Bebalai
* Adat Betamat Al’Qur’an
* Adat Perkawinan
* Adat Melabuh Perahu
* Adat Menjamu Karang
* Tarian Pesisir
* TingkilanMusil
* Adat Erau Pelas Benua Guntung

4. **Kawasan Pariwisata Bahari,** merupakanpengembangan pariwisata yang dipusatkan di perairan wilayah Kota Bontang dengan menggabungkan keindahan alam bahari dengan budaya dan heritage pesisir Kota Bontang. Terdapat beberapa jensi paket wisata bahari yang potensial untuk dikembangkan di Kota Bontang, yaitu:

Tabel 2.18. Paket Wisata Bahari Kota Bontang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Paket Wisata** | **Tema Paket Wisata** | **Daya Tarik Wisata** | **Aktivitas Wisata yang akan dikembangkan** |
| 1. Paket Wisata Petualangan Bahari | *Bontang Exotic Dive Site* | Wisata bahari Beras Basah dan Karang Segajah | Wisata petualangan bahari seperti diving dan snorkeling, wisata minat khusus penelitian ekologi terumbu karang, wisata rekreasi laut |
| 1. Paket Wisata Budaya dan Heritage (Cultural and heritage Tourism Package) | *Living in Bontang Kuala Village* | Perkampungan Tua Bontang Kuala | Tinggal bersama masyarakat Bontang Kuala |
| 1. Paket Wisata Permukiman di atas air dan wisata agromarine | *Bontang Fantastic Cave Exploration?* | Budidaya keramba, rumput laut, dan permukiman di atas laut di Tihik-tihik, Selangan, dan Melahing. | Wisata minat khusus makan ikan di kampung air dan wisata agromarine |

Sumber: RIPPARNAS, 2010-2025

## J. Usaha Pariwisata

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kota Bontang atas dasar harga konstan 2010, terlihat bahwa selama rentang waktu 2012—2016, perekonomian Kota Bontang secara total mengalami laju pertumbuhan negative (menurun) hampir di setiap tahun. Dalam rentang waktu tersebut, tercatat hanya satu kali Kota Bontang mengalami laju pertumbuhan perekonomian positif, yaitu pada tahun 2015. Namun apabila kegiatan migas baik berupa pertambangan migas maupun industri pengolahan migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB Kota Bontang, maka laju pertumbuhan perekonomian tanpa migas di Kota Bontang masih menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya.

Pembentukan nilai tambah ekonomi Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi beberapa perusahaan besar yang bergerak di Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang ada di kota ini, seperti PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kaltim, PT. Kaltim Nitrate Indonesia, PT. Kaltim Parna Industri, PT. Black Bear Indonesia dan lain-lain. Naik turunnya produksi perusahaan-perusahaan tersebut secara langsung memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada laju pertumbuhan perekonomian Kota Bontang. Hal itu disebabkan oleh nilai tambah bruto yang tercipta dari aktivitas ekonomi perusahaan-perusahaan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha lainnya.

Pada tahun 2015, laju pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan mencapai 4,76 persen. Dengan laju pertumbuhan tersebut, Lapangan Usaha Industri Pengolahan berperan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Kota Bontang sebesar 3,99 persen dari laju pertumbuhan total yang sebesar 4,35 persen di tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2016, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mencapai laju pertumbuhan sebesar -1,23 persen atau berperan sebagai sumber pertumbuhan bagi perekonomian Kota Bontang sebesar -1,03 persen dari total laju pertumbuhan perekonomian Kota Bontang tahun 2016 yang sebesar -1,49 persen. Sehingga 16 lapangan usaha lainnya berbagi peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hanya sebesar 0,36 persen di tahun 2015 dan sebesar -0,46 persen di tahun 2016.

Tingginya dominasi kegiatan Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang utamanya digerakan oleh aktivitas PT. Badak NGL sebagai produsen gas alam cair (LNG) tersebut, menyebabkan pengaruh lapangan usaha lain di dalam laju pertumbuhan perekonomian Kota Bontang kurang terlihat. Oleh sebab itu, maka di dalam penyajian PDRB dilakukan pemisahan penghitungan aktivitas ekonomi yang berbasis migas (pertambangan migas dan industri pengolahan migas) dari penghitungan laju pertumbuhan perekonomian. Hal itu dimaksudkan untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di lapangan usaha selain migas.

Pada tahun 2015, laju pertumbuhan perekonomian tanpa migas tercatat sebesar 5,85 persen, lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,70 persen. Namun memasuki tahun 2016, laju pertumbuhan perekonomian tanpa migas Kota Bontang mengalami perlambatan yang cukup signifikan dengan hanya tumbuh sebesar 0,10 persen. Salah satu penyebab rendahnya laju pertumbuhan tanpa migas adalah terjadinya penurunan produksi Lapangan Usaha Industri Kimia yang dimotori oleh PT. Pupuk Kaltim pada tahun 2016. Hal itu kemudian diperparah oleh penurunan yang juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya seperti Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Perdagangan.

Perlambatan pertumbuhan perekonomian tanpa migas Kota Bontang pada tahun 2016 adalah yang terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi semua pihak, karena aktivitas ekonomi tanpa migas adalah sumber utama sebagian besar penduduk Kota Bontang.

Keadaan perekonomian Kota Bontang secara makro tidak terlepas dari berkembang kegiatan unit usaha mikro. Menurut data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi tahun 2016 yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statitik, terdapat sebanyak 16.642 usaha/ perusahaan dari 17.142 usaha/perusahaan yang ada di Kota Bontang (97,08 persen) merupakan usaha/perusahaan yang berskala Usaha Mikro Kecil (UMK). Usaha-usaha mikro kecil tersebut menyerap 37.803 orang tenaga kerja atau sekitar 63,54 persen tenaga kerja yang ada di Kota Bontang. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Kota Bontang tentu saja menjadi salah satu pemicu tumbuhnya berbagai jenis kegiatan ekonomi lainnya. Namun demikian, ketergantungan yang sangat tinggi pada kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut tentu memiliki resiko secara jangka panjang. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan baru baik oleh pihak pemerintah maupun swasta yang dapat menggairahkan perekonomian Kota Bontang, utamanya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Pada waktu yang akan datang keberadaan sektor jasa-jasa yang berkaitan dengan pariwisata perlu ditingkatkan dengan keberadaan perwujudan RIPPAR Kota Bontang, sehingga ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam Minyak dan Gas akan berkurang.

Kota Bontang yang terletak di kawasan pesisir laut Selat Sulawesi sebenarnya memiliki potensi yang sangat baik di Bidang Pariwisata. Obyek wisata yang terdapat di Kota Bontang antara lain Pulau-pulau kecil yang memiliki potensi keindahan pesisir dan keunikan kehidupan masyarakat pesisirnya. Namun demikian sangatlah disayangkan bahwa obyek-obyek wisata tersebut belum dapat dioptimalkan.

## K. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata

Kegiatan usaha kecil dan menengah di Kota Bontang, dapat dikembangkan dari kegiatan sektor-sektor ekonomi yang potensial di wilayah ini yang terdiri dari sektor perdagangan, jasa-jasa serta sektor kemaritiman.

Kondisi UKM di Kota Bontang yang mendukung kegiatan kepariwisataan, berdasarkan data dari Dinas Pemuda, olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang tahun 2017, terdiri dari usaha rumah makan, Ekonomi kreatif dan industri kreatif serta usaha hiburan lainnya yang menunjang pariwisata.

Usaha rumah makan sebanyak 278 buah yang yang tersebar di wilayah kecamatan Kota Bontang masing-masing kecamatan Bontang utara sebanyak 155 buah rumah makan, kecamatan Bontang Barat sebanyak 50 buah rumah makan dan kecamatan Bontang Selatan sebanyak 73 rumah makan.

Usaha kreatif artshop sebanyak 13 buah dan usaha industri ekonomi kreatif sebanyak 18 buah. Usaha hiburan terdiri dari diskotik 2 buah, usaha karaoke 22 buah, bilyard 5 buah, Bowlling 1 buah, salon/Spa sebanyak 21 buah serta pantai pijat sebanyak 5 buah. Hiburan mini bioskop 2 buah, lapangan golf 2 buah, gelanggang renang 5 buah.

Transportasi berupa jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kota Bontang, pada tahun 2016 Total panjang jalan adalah 204.193 km terdiri dari jalan Negara di Kota Bontang tercatat sepanjang 9.036 Km., Kota 195.157 km. Pada Tahun 2016, panjang jalan kota kondisi yang beraspal sebesar (93.445 km), jalan kerikil (1.485 km) sisanya jalan tanah (20.694 km dan lainnya 79.533 km). Jumlah kendaraan yang terdaftar di kota Bontang roda 4 (empat) sebanyak 3.335 buah dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 769 buah. Penambahan roda 4 baru sebanyak 770 buah, roda 2 (dua) 223 buah.

Demikian pula keberadaan moda transportasi udara, dengan adanya bandara khusus PT. Badak LNG serta rencana pembangunan bandara umum Kota Bontang akan memperlancar arus penumpang atau wisatawan pada maa akan datang.

Salah satu sarana yang paling mendukung sektor pariwisata adalah Hotel dan Akomodasinya karena setiap wisatawan membutuhkan tempat untuk menginap terutama bagi wisatawan yang berasal dari luar daerah. Fasilitas akomodasi ini selain meliputi fasilitas penginapan atau hotel didukung pula oleh fasilitas restoran maupun rumah makan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang tahun 2017 Kota Bontang diketahui bahwa perkembangan fasilitas hotel dari tahun 2011 sampai tahun 2016 yang berstandar bintang tidak mengalami penambahan jumlah kecuali pada tahun 2011 Bontang memiliki 2 buah hotel bintang 3 meningkat menjadi 3 buah hotel pada tahun 2012, demikian pula penginapan non bintang tidak mengalami perubahan jumlah nya hanya 24 buah. Demikian pula jumlah kamar dan tempat tidur perkembangannya fluktuatif selama periode 2011-2016 rata-rata memiliki 816 kamar dan 1.231 tempat tidur.

Demikian pula peran lembanga keuangan di sini adalah lembaga yang dapat membantu wisatawan untuk memperoleh kemudahan dengan segala urusan yang berhubungan dengan alat tukar seperti bank ataupun money changer. Saat ini di Kota Bontang sudah terdapat berbagai cabang/unit Bank milik pemerintah maupun bank swasta.

Telekomunikasi saat ini merupakan elemen penting pengembangan pariwisata. Bagi wisatawan telekomunikasi dibutuhkan untuk selama perjalanan mereka. Bahkan untuk perjalanan bisnis, fasilitas ini memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi. Setiap daerah wisata memerlukan telekomunikasi untuk fungsi operasional maupun kondisi darurat.

Demikian pula di Kota Bontang telah tersedia fasilitas pelayanan Pos dan jasa pengiriman dokumen dan barang, yang dilayani oleh BUMN maupun usaha swasta. Peranan kegiatan swasta yang teroganisir dalam bentuk kelembagaan usaha bisnis sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan distinasi pariwisata, terutama adalah badan usaha yang bergerak pada sektor pariwisata; usaha traveling dan tours, perhotelan, usaha transportasi serta usaha lainnya yang menunjang pariwisata.

Secara keseluruhan jumlah usaha kecil menengah (UKM) yang terdaftar di Kota Bontang pada tahun 2016 kelompok makanan dan minuman, serta lainnya sebanyak 663 unit dan jumlah tenaga kerja sebanyak 967 orang, nilai investasi sebesar Rp. 31.959 712.000,00.

Adapun banyaknya pedagang di Kota Bontang menurut kelompok; pedagang besar, menengah dan pedagang kecil masing-masing sejumlah 21 pedagang besar dan 108 pedagang menengah serta sebanyak 377 pedagang kecil. Banyaknya sarana fasilitas perdagangan berupa pasar umum sebanyak 5 buah dan pasar desa 1 buah, dengan jumlah los pasar 834 buah, toko 224 buah, kios 1.072 buah. Jumlah keseluruhan fasilitas perdagangan sebanyak 2.136 buah.

## L. Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan

Beberapa hal yang terkait dengan preferensi pasar terhadap pengembangan produk yang perlu dicermati antara lain :

* Peningkatan variasi aktivitas serta objek wisata untuk memberikan pilihan yang lebih banyak dalam melakukan aktivitas wisata.
* Peningkatan aksesibilitas. Dalam hal ini, perbaikan dan peningkatan sistem transportasi menjadi sebuah prioritas pengembangan.
* Peningkatan kualitas dari prasarana dan sarana wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan
* Pengembangan sistem informasi kepariwisataan, untuk kepentingan wisatawan, investasi, dan perencanaan terkait yang terpadu : lintas sektor dan antar wilayah.
* Kebijakan dan program kegiatan pengembangan produk yang mendukung kegiatan pariwisata yang sesuai dengan preferensi pasar.
* Pengembangan wisata budaya dalam kemasan produk yang menarik (*event,festival, atraction*)

Sampai dengan saat ini, belum meratanya kegiatan pemasaran pada antar wilayah kabupaten/ kota menyebabkan belum terjadinya pemasaran terintegrasi secara optimal bagi keseluruhan Kota Bontang. Sebagai sebuah wilayah yang akan dikembangkan dengan skala nasional, sebaiknya seluruh unsur pemerintahan tersebut secara bersama–sama menetapkan strategi pemasaran pariwisata di Kota Bontang Dari hasil pencermatan, pemasaran pariwisata yang perlu dilakukan, meliputi :

1. Pembuatan brosur, flyer dan buku informasi kepariwisataan yang belum secara optimal  memberikan informasi komprehensif terhadap kepariwisataan Kota Bontang.
2. Pengembangan situs yang secara umum belum mampu mengetengahkan informasi yang komprehensif terkait dengan  kepariwisataan.
3. Pengembangan event-event budaya yang dimiliki masyarakat kota Bontang sebagai kota pesisir dalam bentuk promosi pariwisata yang belum  secara signifikan mampu menarik kunjungan wisatawan di Kota Bontang.
4. Masih belum optimalnya aktivitas pemasaran, memberikan indikasi bahwa pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan di Kota Bontang harus dilakukan secara komprehensif.

Sebagai sebuah kawasan pariwasta yang belum berkembang secara optimal, guna meningkatkan *awareness* langkah utama yang harus dikembangkan dalam pemasaran kepariwisataan guna meningkatkan *awarness* wisatawan terhadap kekayaan sumber daya pariwisata di Kota Bontang. Peningkatan *awarness* ini diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemasaran destinasi di Kota Bontang adalah citra destinasi itu sendiri (*destination image*).

**Sebuah Citra Destinasi** menggambarkan seluruh produk dan jasa destinasi, yang merupakan bagian dari identitas destinasi. Dalam penciptaan citra destinasi Kota Bontang, dapat menggambarkan elemen-elemen produk wisata yang unik di yang membedakannya dari destinasi pesaing lainnya dan membuat sebuah persepsi dalam pikiran konsumen. Penciptaan citra destinasi bagi Kota Bontang akan menciptakan sebuah persepsi positif dibenak pasar wisata dan memudahkan dalam membentuk elemen-elemen pengemasan produk wisata.

**Kualitas informasi** dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran kepada target pasar, mengingat fungsinya sebagai alat pemasaran maupun sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan interaktif.  Bagi wisatawan nusantara, saat ini brosur, liflet dan pusat informasi masih mendominasi dalam penetapan tujuan wisata. Sementara bagi wisatawan mancanegara, peran situs web dan informasi yang komprehensif sangat mendominasi dalam menetapkan destinasi tujuan wisatanya.

Semakin meningkatnya edukasi pasar dan perkembangan teknologi informasi, peran sistem informasi pariwisata sebagai saluran pelayanan informasi menjadi mutlak dilakukan. Ekspektasi pasar terhadap ketersediaan dan kualitas informasi kawasan melalui media internet meningkat. Minimnya informasi pariwisata yang ditampilkan akan memberikan ekses yang kurang baik. Fasilitas ini tentunya perlu terus dipelihara kelengkapan, akurasi, dan kemutahiran data yang disampaikannya. Mengingat pengguna situs web tersebut sebenarnya tidak hanya wisatawan namun juga untuk kepentingan pengambilan keputusan, baik pemerintah maupun pelaku usaha pariwisata.

Selain fungsi pemasaran, sistem informasi yang terkait dengan kepariwisataan perlu dikembangkan di secara lebih komprehensif, interaktif dan *up to date* di pusat-pusat distribusi wisatawan maupun di destinasi wisata dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada wisatawan.

## M. Karakteristik Pasar Wisatawan

### 1. Pola Perjalanan

Pada tingkat perencanaan RIPPAR Kota Bontang, pola perjalanan internasional maupun regional bagi wisman tidak diperlukan kajian secara mendetail. Penekanan yang diperlukan adalah kajian pola perjalanan di dalam daerah studi dan antar daerah dengan mempertimbangkan jumlah, asal dan tujuan, jenis wisatawan, lokasi dan jenis daerah tujuan wisata favorit. Pola perjalanan secara umum ini penting untuk proses analisis pasar wisata jangka panjang yang berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia. Pola perjalanan yang dikaji tidak hanya yang eksisting, akan tapi yang potensial juga. Kecenderungan pariwisata harus diperhatikan sebagai contoh munculnya pasar baru, segmen baru, jenis objek dan daya tarik wisata baru dan munculnya sarana transportasi modern yang akan mengubah pola perjalanan wisatawan. Untuk menghasilkan proses perencanaan yang lebih baik maka proses ini dapat mengikutsertakan pihak hotel maupun agen atau operator perjalanan yang kompeten.

### 2. Karakteristik Wisatawan

Jumlah kedatangan atau kunjungan wisatawan masa lalu dan saat ini harus ditentukan sebagai indikator dari pertumbuhan umum dan tingkat perkembangan pariwisata di suatu daerah. Gambaran kunjungan wisatawan bulanan dapat menunjukkan fluktuasi musiman. Karakteristik dan sikap dari wisatawan yang berkunjung perlu diidentifikasi dengan seksama. Karakteristik yang perlu dikaji dalam rangka RIPPAR Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Daerah asal

Kebangsaan dan negara tempat tinggal bagi wisman, dan provinsi asal dan kota tempat tinggal bagi wisnus merupakan data penting dalam rangka fungsi pemasaran. Negara tempat tinggal patut dipertimbangkan, karena pada saat ini banyak sekali wisman yang tinggal menetap di suatu negara yang berbeda dengan kewarganegaraannya. Begitu pula dengan tenaga-tenaga ahli asing yang tinggal di Indonesia, sangat mungkin sekali mereka melakukan perjalanan secara ekstensif untuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Indonesia.

1. Maksud perjalanan

Maksud perjalanan meliputi kategori berlibur, bisnis, studi, dinas, berkunjung ke teman atau keluarga dan mungkin beberapa jenis maksud lain bergantung dengan daerah. Maksud perjalanan menunjukkan karakteristik dari perencanaan pemasaran dan fasilitas yang akan dikembangkan di suatu daerah.

1. Lama tinggal

Lama tinggal wisatawan bergantung pada jumlah malam wisatawan tinggal di suatu daerah. Informasi ini merupakan masukan untuk mengetahui penggunaan fasilitas dan belanja wisatawan.

1. Umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga/teman yang ikut perjalanan. Hal ini merupakan karakteristik penting untuk mengetahui dalam penentuan profit pemasaran dan fasilitas pariwisata dalam rangka proses perencanaan. Umur sendiri dapat dikelompokkan menjadi kelompok tertentu karena sering kali wisatawan tidak mau diketahui umur mereka secara pasti.
2. Jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan

Jenis pekerjaan dapat dikategorikan menjadi : manajer, profesional, tenaga ahli, ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, dan pensiunan. Tingkat pendapatan juga dapat dikelompokkan menjadi kelompok tertentu.

1. Tempat yang dikunjungi dan tempat tinggal selama perjalanan.

Tempat-tempat yang dikunjungi selama melakukan kunjungan di Indonesia (Nasional) maupun di kabupaten/ kota sendiri merupakan informasi penting untuk proses perencanaan.

1. Jumlah kali kunjungan ke daerah

Jenis kunjungan ke suatu daerah dapat merupakan yang pertama kali atau kunjungan ulang. Dengan tingginya kunjungan ulang maka hal ini menunjukkan bahwa daerah tertentu memiliki daya tarik yang "berkelanjutan", sehingga orang ingin melakukan kunjungan ulang.

1. Individual atau kelompok

Sebagian wisatawan melakukan kunjungan wisata ke suatu daerah secara mandiri (*independen)*, sementara yang lainnya datang dalam kelompok wisata. Informasi ini dimanfaatkan untuk fungsi pemasaran dan perencanaan.

1. Pola belanja wisatawan

Jumlah total belanja dan wisatawan dan distribusi belanja mereka (akomodasi, makanan dan minuman, belanja, transport lokal, tour dan lainnya) merupakan informasi penting untuk menentukan dampak ekonomidan pariwisata dan merupakan masukan untuk merekomendasikan cara untuk meningkatkan belanja wisatawan di suatu daerah. Uang yang dibelanjakan oleh wisatawan akan sangat baik bila ditentukan dengan survey khusus atau dengan mengidenti- fikasi dan hotel, restoran, agen perjalanan, pertokoan dan tempat- tempat penukaran mata uang asing.

1. Sikap dan tingkat kepuasan wisatawan

Menentukan sikap dan tingkat kepuasan wisatawan tentang daerah, objek dan daya tarik wisata, fasilitas dan pelayanan merupakan informasi yang berharga bagi proses peningkatan pariwisata, setidaknya merupakan dasar dan keinginan pasar eksisting. Infonnasi ini akan sangat baik bila menggunakan survey secara khusus dengan juga memperhatikan pola belanja dan karakteristik wisatawan, sehingga seluruh faktor dapat diidentifikasi korelasinya. Survey ini dapat meliputi pertanyaan fasilita satau pelayanan apa yang perfu ditingkatkan bila mereka melakukan kunjungan ulang ke daerah ini.

Kondisi eksisting saat ini, untuk wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kota Bontang masih terbilang cukup rendah. Kebanyakan wisatawan/bangkitan wisata lebih berorientasi dari Balikpapan-Samarinda, dan sebagian meneruskan distinasi ke pedalaman, serta ke wilayah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Meski demikian, potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bontang pada dasarnya sangat menarik kehidupan budaya pesisir yang dimiliki, jika dibandingkan dengan beberapa distinasi di wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

### 3. Jumlah Kunjungan Wasatawan ke Kalimantan Timur dan Kota Bontang

Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke wilayah Kalimantan Timur sejak tahun 2009 sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 1.131.906 kunjungan wisatawan meningkat menjadi 4.270.740 kunjungan wisatawan Tahun 2015. Demikian juga wisatawan mancanegara masuk ke wilayah Kalimantan Timur cukup meningkat dari 23.768 kunjungan meningkat menjadi 49.285 kunjungan pada tahun 2015. Perkembangannya kunjungnan wistawan dapat dilihat pada Tabel 2.19. dan Tabel 2.20.

Tabel 2.19. Kunjungan wisatawan Nusantara Ke Prov. Kaltim dan Kota Bontang Tahun 2012-2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Wisatawan ke** | **TAHUN** | | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Kaltim | 1.637.306 | 1.882.120 | 3.914 769 | 4 270 740 | 1.427.172 | - |
| 2. | Bontang | - | 68.400 | 68.400 | 101.698 | 103.712 | 383.868 |

Sumber: BPS Prov.Kaltim, Kota Bontang,2018.

Selain itu, potensi pasar wisnus Kota Bontang tidak dapat dilepaskan dari jumlah dan perkembangan penduduk wilayah di sekitarnya, yaitu penduduk Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan bahkan Kota Balikpapan. Selain tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi (jarak tempuh relatif pendek kurang dari enam jam, kualitas prasarana jalan baik, tersedia moda transportasi umum), penduduk di daerah tersebut memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan serta daya tarik wilayah yang cukup variatif.

Tabel 2.20. Kunjungan wisatawan Mancanegara ke Indonesia, Prov. Kaltim dan Kota Bontang 2009-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Wisatawan ke** | **Tahun** | | | | | |
| **2012** | **20013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Indonesia | 8.044.462 | 8.802.129 | 9.435.411 | 9.845.000 | 10.406.759 |  |
| 2. | Kaltim | 26.148 | 27.063 | 53 257 | 49 285 | 14.010 |  |
| 3. | Bontang | - | - | - | - | - | - |

Sumber: BPS Prov. Kaltim, Bontang, 2018, diolah

### 4. Jumlah Proyeksi Kunjungan Wisatawan

Perkembangan kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara adalah sebagai sisi konsumen *(demand)* dalam suatu pasar adalah merupakan sumber penerimaan bagi produsen (supply) pariwisata. Potensi kunjungan wisatawan selama 20 tahun kedepan berdasarkan data kunjungan wisatawan selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dapat diproyeksikan sebagai pada Tabel 2.21. berikut.

Tabel 2.21. Proyeksi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bontang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Kunjungan** | | **Jumlah** |
| **Wisnu** | **Wisman** |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |
| 2031 |  |  |  |
| 2032 |  |  |  |
| 2033 |  |  |  |
| 2034 |  |  |  |
| 2035 |  |  |  |

Sumber: Hasi Analisis Tim, 2018

### 5. Daya Saing Produk Pariwisata

Daya saing produk parawisata Kota Bontang memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Lemahnya manajemen produk pariwisata dengan penyajian kurang optimal baik budaya, atraksi, infrastruktur dan sumber daya manusia.
2. Lemahnya pemasaran berupa kurangnya promosi pariwisata secara lebih giat dan terbuka.

Dasar hukum dari sisi kebijakan, daya saing pariwisata telah didefinisikan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025. Arah kebijakan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (b) diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pengembangan Produk Kepariwisataan di Kota Bontang dapat berupa kepariwisataan alam, budaya maupun buatan manusia yang memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

1. ***In situ***. Obyek wisata hanya dapat dinikmati oleh wisatawan ditempatnya atau dilokasi wisata. Proses alam, kekayaan keunikan dan perilaku flora dan fauna, gejala geologis hanya bisa dinikmati sepenuhnya ditempat kejadiannya. Kepuasan dan pengalaman untuk menikmati, melihat dan merasakan alam di lokasinya mempunyai nilai tingkat kepuasan yang sempurna.
2. ***Total experience***. Kepuasan wisatawan diperoleh dari evaluasi seluruh perjalanannya dari asal tempat tinggalnya hingga kembali. Seluruh pengalaman di perjalanan, dilokasi obyek dan kembali ke tempat semula merupakan total pengalaman yang harus dinikmati dan dihargai seluruhnya tanpa mengecewakan. Sehingga pengembangan wisata alam keberhasilannya sangat ditentukan oleh seluruh *stakeholder* yang terkait. Oleh karenanya wisata alam sebaiknya dilaksanakan secara terpadu atau dilaksanakan oleh satu *holding company*.
3. ***Perishabel***. Atraksi alam tertentu kejadiannya hanya terjadi pada waktu tertentu dengan kata lain, atraksi tidak dapat diulang lagi. Misal masa berbunganya sejenis bunga tertentu, demikian pula dengan atraksi hewan yang hanya terjadi pada musim tertentu. Bilamana waktunya tidak tepat, maka atraksi tertentu tidak dapat dinikmati.
4. ***Non recoverable.*** Suatu ekosistem alam, apabila terjadi kerusakan pemulihannya akan memakan waktu yang lama. Apabila terjadi pemulihan atau *recovery* secara alami, tidak mungkin sama dengan bentuk ekosistem sebelumnya.

Dari uraian di atas jumlah dan kualitas daya tarik dapat mengurangi atau meningkatkan daya saing sebuah destinasi. Secara nasional dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia semakin lama semakin tinggi. Setelah wisatawan dari Belanda, Jepang dan Australia, wisatawan dari Cina, Timur Tengah, India dan Rusia yang saat ini menjadi pasar baru bagi Indonesia.

## N. Upaya Pemasaran Yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang

Globalisasi dunia yang didukung kemajuan teknologi dan informasi terutama dibidang usaha dan perdagangan telah menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah atau negara harus memiliki mitra kerja yang saling melengkapi dengan daerah lain atau negara lain bila ingin sukses dalam dunia usaha.

Persaingan global tak dapat dihindari lagi sehingga setiap negara berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya agar dapat bersaing dipasar bebas. Pemahaman tentang pasar bebas adalah pendistribusian produk-produk bersifat internasional ke berbagai negara sesuai teori *comparative advantage. Comparative advantage* mengarah pada faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan untuk mendiferensiasikan produk atau jasanya dari pesaing untuk meningkatkan *market share.* Untuk itu, negara sebaiknya mengkhususkan pada barang dan jasa yang dapat diproduksikan dengan cara paling efisien. Demikian pula disektor kepariwisataan yang akhir-akhir ini terjadi persaingan ketat antara negara dengan untuk memperebutkan wisatawan dari mancanegara. Tentu saja tidak cukup hanya mempromosikan obyek-obyek menarik yang dimiliki masing-masing daerah, tetapi perlu dibarengi dengan aksi serta pelayanan yang memuaskan kepada setiap wisatawan.

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Kota Bontang, kemitraan usaha pariwisata mutlak diperlukan. Melalui kemitraan, pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Program kemitraan dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan karakteristik pariwisata didestinasi masing-masing. Dalam menetapkan strategi penguatan kemitraan perlu perlu meninjau strategi penguatan kemitraan sebagaimana tertuang di dalam RIPPARNAS Tahun 2010 - 2025 tersebut yang merupakan mata rantai :

1. Mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah,
2. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

Adapun arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c didalam dokumen RIPPARNAS Tahun 2010 - 2025 diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan. Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 meliputi meningkatkan :

1. Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, dan
2. Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Program kemitraan sebaiknya melibatkan unit usaha kecil yaitu industri kecil yang tumbuh sebagai pendukung kegiatan pariwisata. Selain itu beberapa industri rumah tangga banyak yang potensial menjadi unit usaha kecil yang dapat pula berkembang menjadi menengah dan besar. Pemerintah perlu menyusun program-program kemitraan antara industri kecil, industri menengah dan besar guna mengembangkan kegiatan pariwisata. Hal ini penting untuk dipahami karena kegiatan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus didukung oleh kegiatan lainnya.

Pola pembinaan kemitraan usaha dan pariwisata di Kota Bontang dapat dilakukan seperti : usaha jasa atraksi wisata atau kegiatan yang dapat berpotensi untuk mengundang wisatawan. Sebagai contoh adalah jasa kesenian, seni tradisi maupun kontemporer, jasa pemancingan, jasa petualangan atau rekreasi alam, jasa kepemanduan dan lain sebagainya. Pembinaan kemitraan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan yang berupa bantuan teknis, bantuan investasi, bantuan sarana produksi atau bantuan pendampingan.

Usaha jasa wisata dapat pula dibina melalui pengembangan desa wisata. Desa-desa saat ini memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi destinasi wisata. Desa wisata yang dimaksud adalah yang memiliki keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik berupa kaaraakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. Selain itu, memiliki dukungan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan misalnya akomodasi, ruang interaaksi masyarakat dengan tamu dan fasilitas pendukung lainnya.

Kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Menguatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
2. Menguatkan implementasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Berdasarkan pengamatan bahwa pendekatan pemasaran pariwisata Kota Bontang selama ini belum dilakukan secara optimal, terlihat dari minimnya data awal mengenai gambaran pengunjung potensial untuk mengidentifikasi pasar wisatawan yang disasar beserta analisisnya, baik berupa profil wisatawan maupun kuantitasnya. Hal ini merupakan langkah awal dalam menjalankan upaya strategi marketing, apakah berupa *mass marketing* (menawarkan satu produk ke semua orang), *product variety marketing* (menawarkan dua atau lebih produk, dengan pemikiran konsumen memiliki selera atau keinginan yang berbeda), atau target marketing (penjual mengidentifikasikan segmen pasar, memilih salah satu segmen atau lebih, kemudian mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang khusus ditujukan ke segmen pasar tersebut).

Strategi pemasaran produk wisata juga harus mempertimbangkan positioning dengan mempertimbangkan penyedia (kompetitor lain) yang kemungkinan menawarkan produk wisata sejenis pada segmen pasar yang sama. Oleh karena itu produk wisata harus mempunyai nilai diferensiasi, agar produk yang ditawarkan mempunyai keunikan atau kekhasan dibanding daerah lain. Beberapa teknik pemasaran dapat dilakukan melalui bauran pemasaran atau *marketing mix* yang meliputi *product, price, place, dan promotion* yang tepat. Dari semua upaya bauran pemasaran, promosi merupakan upaya yang telah dilakukan oleh stakeholder kepariwisataan Kota Bontang, walaupun tampaknya belum dikembangkan secara optimal.

Beberapa usaha promosi yang telah dilakukan antara lain adalah:

* penggunaan iklan/advertising dengan menggunakan media komersial, diantaranya cetak dan elektronik, misalnya iklan televisi yang ditampilkan di bandara, atau daya tarik wisata yang dicantumkan dalam buku panduan wisata.
* penyebaran buklet, leaflet/brosur dan video, dengan jangkauan yang terbatas.
* ikut serta dalam bursa dan pameran wisata,
* pengadaan event, seperti Erau Guntung dan Pesta Laut
* *word of mouth*, merupakan upaya promosi dari mulut ke mulut. Upaya promosi ini tampaknya masih merupakan cara yang paling optimal namun efektif.

Beberapa hal yang diperlukan dalam upaya peningkatan promosi kepariwisataan Kota Bontang misalnya pembangunan pusat informasi kepariwisataan Kota Bontang yang terdapat di berbagai pintu masuk udara, laut, dan darat, misalnya di Bandara Sepinggan-Balikpapan sebagai pintu masuk utama menuju Bontang dari ibukota negara, pelabuhan laut, terminal, maupun gerbang kota.

Selain itu maraknya sarana teknologi informasi berupa internet dan medianya, tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal, diantaranya dengan ketiadaan website resmi kepariwisataan Kota Bontang, belum dimanfaatkannya internet marketing, ataupun minimnya pemanfaatan jejaring sosial di internet untuk memperkenalkan potensi kepariwisaaan Kota Bontang, misalnya penggunaan blog, facebook, dan medsos lainnya.

Upaya pemasaran dan promosi kepariwisataan sangat penting untuk dilakukan untuk membangun maupun memperkuat citra Kota Bontang yang terkait dengan tema destinasi pariwisata (*destination brand*) skala regional yaitu “*Journey to The Heart of Borneo*”. Sehingga masyarakat kalangan tertentu tidak hanya mengenal Pulau Beras Basah saja sebagai potensi daya tarik wisata minat khusus akan tetapi juga potensi daya tarik kepariwisataan lainnya.

## O. Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata

### 1. Pemetaan Kegiatan Wisata dalam Struktur Wilayah Pengembangan Kota Bontang

Berikut adalah perkembangan kegiatan wisata berdasarkan pembagian wilayah pengembangan (WP) dan peruntukan lahan di Kota Bontang.

Tabel 2.22. Perkembangan kegiatan wisata dalam wilayah pengembangan dan peruntukan lahan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WP** | **Peruntukan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang** | **Daya Tarik Dan Kegiatan Wisata Yang Berkembang** | **Kegiatan Wisata Lain Yang Potensial Untuk Dikembangkan** |
| **WP I (Kawasan Kota Lama)** | * Perdagangan dan jasa * Permukiman * Pariwisata * Sosial budaya | * Wisata rekreasi pantai * Wisata kuliner * Wisata belanja * Wisata seni budaya tradisional * Wisata bahari * Wisata pendidikan lingkungan | *Ecotourism* |
| **WP II (Kawasan Industri)** | * Industri strategis kota pelabuhan dan pergudangan * Permukiman * Pariwisata | * Wisata rekreasi keluarga * Wisata seni budaya tradisional * Wisata bahari | * Wisata industri * Wisata pendidikan lingkungan * Wisata budaya * Wisata tirta * Wanawisata |
| **WP III (Kawasan Kota Baru)** | * Pusat pemerintahan kota * *sport center* * Perikanan * Permukiman * Industri polusi ringan * Pariwisata | - | * Wisata rekreasi keluarga * Wisata pendidikan lingkungan * Wanawisata * Wisata tirta * Sport tourism * Wisata bahari * Wisata perikanan |
| **WP IV** | * Wilayah konservasi | - | * Ekowisata * Wisata pendidikan lingkungan |

Sumber: Hasil Analisis,

### 2. Wilayah Pengembangan Pariwisata

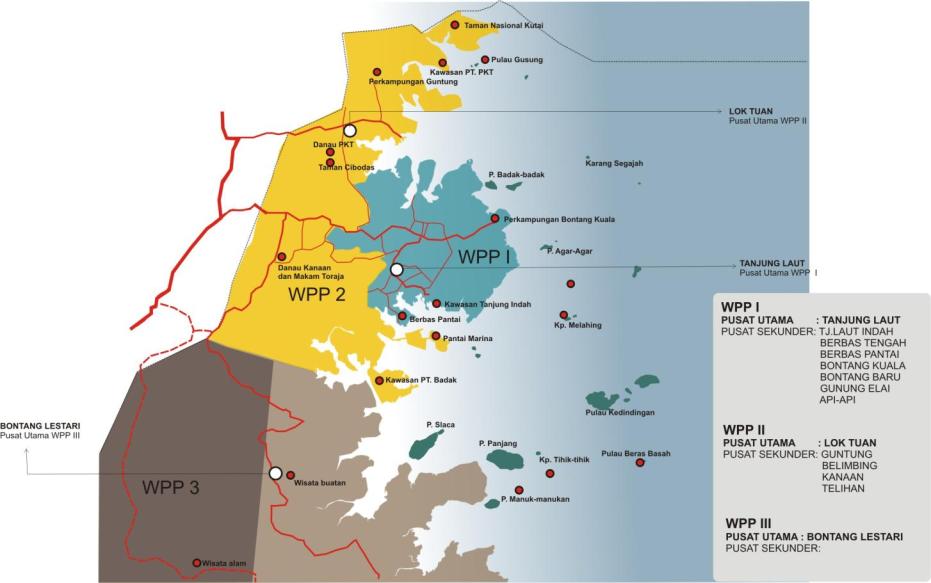
Pembagian wilayah pengembangan menurut ketataruangan dan karakteristik kegiatan wisata yang telah berkembang di Kota Bontang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana struktur perwilayahan pariwisata dan kawasan wisata yang akan dikembangkan.

Lebih lanjut, rencana pembagian perwilayahan pariwisata ini didasari oleh:

* Ketimpangan perkembangan wilayah yang terpusat di daerah selatan, barat dan utara
* Sebaran daya tarik wisata yang tidak merata. Kawasan yang telah berkembang pada umumnya terletak di kawasan kota lama.
* Kondisi aksesibilitas antar wilayah yang mempengaruhi tingkat perkembangan daya tarik wisata.
* Kebijakan dan rencana pengembangan wilayah Kota Bontang yang telah ditetapkan.
* Konsep pengembangan pariwisata yang tidak mengenal batas administratif, pergerakan tidak hanya dibatasi pada daerah tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pembagian perwilayahan pariwisata dapat dilihat pada halaman berikut.

Gambar 2.2. Peta rencana perwilayahan pengembangan pariwisata (WPP) Kota Bontang



## P. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Prioritas

### 1. Potensi dan Pengelompokkan Daya Tarik Wisata

Sebaran potensi daya tarik wisata di Kota Bontang dapat dikelompokkan dari segi administratif maupun karakteristik fisik dan kegiatan yang berlangsung di areal tersebut.

Berikut adalah tabel pengelompokkan potensi daya tarik wisata ke dalam kawasan masing-masing.

Tabel 2.23. Potensi dan Pengelompokkan Daya Tarik Wisata

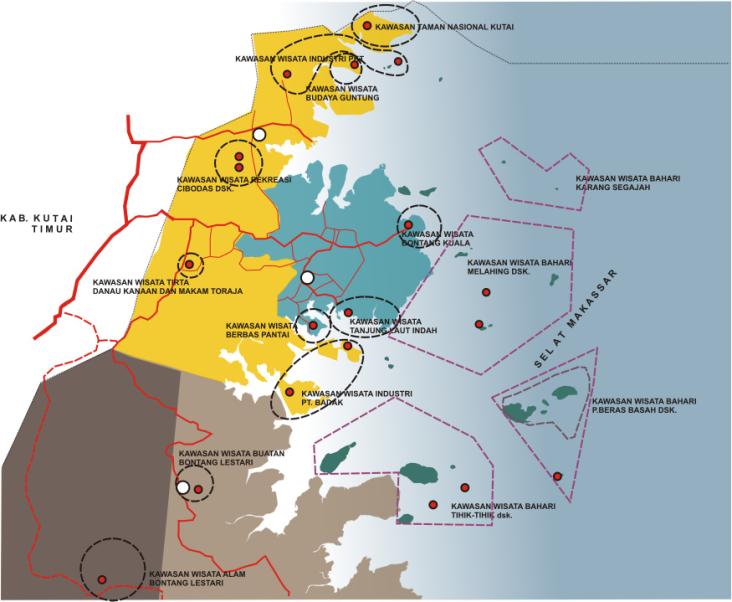
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Potensi Daya Tarik Wisata** | **Lokasi** | **Kawasan** | **Karakteristik kegiatan wisata** |
| 1 | Perkampungan Guntung | Kel. Guntung | **Kawasan Wisata Guntung** | Budaya Guntung dan bahari |
| 2 | Pulau Gusung | Perairan Kel. Guntung |
| 3 | Taman Cibodas PKT | Kel. Belimbing | **Kawasan Wisata Cibodas dsk.** | Rekreasi keluarga, wanawisata, dan pendidikan lingkungan |
| 4 | Monumen PKT | Kel. Belimbing |
| 5 | Kolam pemancingan PKT | Kel. Belimbing |
| 6 | Hutan kota Wanatirta | Kel. Belimbing |
| 7 | Kawasan Industri PKT | Kel. Guntung | **Kawasan Wisata Industri PKT** | Industri |
| 8 | Kawasan Industri Badak | Kel. Telihan | **Kawasan Wisata Industri Badak** | Industri dan rekreasi pantai |
| 9 | Pantai Marina Badak | Kel. Telihan |
| 10 | Danau Kanaan | Kel. Kanaan | **Kawasan Wisata Kanaan** | Wisata tirta dan budaya |
| 11 | Makam Toraja | Kel. Kanaan |
| 12 | Taman Nasional Kutai | Perbatasan Bontang-Kab. Kutai Timur | **Kawasan TNK** | Ekowisata, wanatirta, wisata pendidikan |
| 13 | Perkampungan Nelayan Bontang Kuala | Kel. Bontang Kuala | **Kawasan Wisata Bontang Kuala** | Wisata budaya bahari, wisata belanja dan kuliner, wisata mangrove, wisata rumput laut |
| 14 | Karang Segajah | Perairan Bontang Utara | **Kawasan Wisata Bahari Karang Segajah** | Wisata budidaya terumbu karang, fotografi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Kampung Melahing dsk. | Perairan Bontang | **Kawasan Wisata Bahari Kp. Melahing dsk.** | Ekowisata bahari (Wisata budaya bahari, wisata mangrove, wisata terumbu karang), wisata minat khusus |
| 16 | Pulau Beras Basah | Perairan Bontang Selatan | **Kawasan Wisata Pulau Beras Basah dsk.** | Ekowisata bahari ( olahraga air, wisata mangrove), wisata pendidikan |
| 17 | Pulau Kedindingan | Perairan Bontang Selatan |
| 18 | Pulau/Kampung Tihik-tihik dsk. | Perairan Bontang Selatan | **Kawasan Wisata Kampung Tihik-tihik dsk.** | Wisata budaya bahari, wisata mangrove, wisata terumbu karang |
| 19 | Kawasan Tanjung Laut Indah | Kel. Tanjung Laut Indah | **Kawasan Wisata Tanjung Laut Indah** | Rekreasi pantai, kuliner |
| 20 | Kawasan Berbas Pantai | Kel. Berbas Pantai | **Kawasan Wisata Berbas Pantai** | Rekreasi pantai, kuliner |
| 21 | Kawasan wisata alam Bontang Lestari | Kel. Bontang Lestari | **Kawasan Wisata Alam Bontang Lestari** | Ekowisata, wisata mangrove, wisata perikanan, |
| 22 | Kawasan wisata buatan Bontang Lestari | Kel. Bontang Lestari | **Kawasan Wisata Buatan Bontang Lestari** | Taman rekreasi, *themed park, sport tourism* |

Sumber: Hasil Analisis,

Ruang lingkup wilayah masing-masing kawasan wisata yang direncanakan bukan merupakan sesuatu yang *rigid*, melainkan merupakan batasan ‘maya’ terhadap kegiatan dan pergerakan yang mungkin muncul di dalamnya. Dengan demikian, rencana sebaran kawasan wisata di Kota Bontang dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 2.3. Sebaran Kawasan Wisata di Kota Bontang



### 2. Penentuan Kawasan Wisata Prioritas

Untuk menentukan kawasan wisata prioritas atau kawasan wisata yang hendak dikembangkan pertama kali, terlebih dahulu dilakukan penilaian kawasan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

* Keunikan daya tarik wisata
* Keragaman daya tarik wisata yang ada di kawasan
* Keragaman kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan wisata
* Aksesibilitas/kemudahan pencapaian menuju kawasan wisata serta kemudahan perijinan
* Fasilitas penunjang kepariwisataan yang ada di kawasan wisata
* Adanya potensi pasar
* Adanya dukungan kebijakan berupa peraturan atau dokumen mengenai pengembangan kawasan
* Adanya potensi pengembangan di kawasan berupa preferensi pasar/investor
* Daya dukung lingkungan yang memadai bagi kegiatan wisata.

Masing-masing kriteria ini tidak mendapatkan bobot penilaian yang sama, melainkan berbeda, yang ditentukan oleh urgensitas atau kepentingan tertentu. Kriteria aksesibilitas misalnya mendapatkan bobot 20% karena merupakan komponen yang paling penting dalam pengembangan pariwisata. Sedang komponen lainnya mempunyai bobot yang berkisar antara 5% sampai 15%.

Adapun penilaian daya tarik wisata dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.24. Penilaian Kawasan Wisata di Kota Bontang



Sumber: Hasil analisis, 2010

Dengan melihat hasil penilaian tersebut, maka kawasan wisata yang mendapat prioritas utama untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Wisata Bontang Kuala.
2. Kawasan Wisata Berbas Pantai.
3. Kawasan Wisata Taman Cibodas dsk.
4. Kawasan Wisata Guntung.
5. Kawasan Taman Nasional Kutai (TNK).
6. Kawasan Wisata Tanjung Laut Indah.

Dengan demikian pengembangan masing-masing kawasan dijabarkan sebagai berikut.

1. **Kawasan Wisata Bontang Kuala**

Tabel 2.25. Kawasan wisata Bontang Kuala

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema kawasan** | **Kawasan Wisata Budaya Bahari Bontang Kuala** |
| **Daya Tarik Wisata** | * Perkampungan Bontang Kuala * Pulau Segajah * Event Pesta Laut * Kawasan Mangrove |
| **Aktivitas yang dikembangkan** | * Wisata sejarah/*heritage* dan budaya (permukiman nelayan Bontang Kuala) * Wisata rekreasi pantai * Wisata kuliner dan belanja * Sport tourism (jetski, berlayar, berkano, dll). * Wisata mangrove * Wisata rumput laut * Wisata pendidikan lingkungan |
| **Fasilitas yang dikembangkan** | * Fasilitas homestay * Restoran/rumah makan terapung, kafe * TIC (tourist information center) dan interpretive center * Areal parkir (baik bagi motor, mobil dan bis) * Toilet dan mushola * Tempat penyewaan jetski, pelampung, kano, banana boat, dll * Shelter * Kios cenderamata * Bangunan serbaguna untuk pelatihan * Amphiteater/panggung terbuka |
| **Aksesibilitas** | * Darat:   Dapat ditempuh dari Jalan Kapten Pierre Tendean   * Laut:   Dapat ditempuh dari berbagai pelabuhan dan mendarat di pelabuhan nelayan Bontang Kuala |
| **Target Pasar** | * Pelajar * Keluarga * Pekerja/Eksekutif muda |

1. **Kawasan Wisata Berbas Pantai**

Tabel 2.26. Kawasan wisata Berbas Pantai

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema Kawasan** | **Kawasan Wisata Rekreasi Berbas Pantai** |
| **Daya Tarik Wisata** | * Kawasan Berbas Pantai |
| **Aktivitas yang dikembangkan** | * Wisata rekreasi pantai * Wisata kuliner dan belanja * Olahraga (lari, bersepeda, dll) |
| **Fasilitas yang dikembangkan** | * Restoran/rumah makan, kafe * TIC (tourist information center) * Areal parkir (baik bagi motor, mobil dan bis) * Toilet dan mushola * Shelter * Kios cenderamata * Amphiteater/panggung terbuka * Promenade * Pelabuhan |
| **Aksesibilitas** | * Darat:   Dapat ditempuh dari Jalan Sultan Hasanuddin   * Laut:   Dapat ditempuh dari Pelabuhan Tanjung Laut dan pelabuhan lain di Kota Bontang |
| **Target Pasar** | * Keluarga * Pekerja/Eksekutif muda |

1. **Kawasan Wisata Cibodas Dsk.**

Tabel 2.27. Kawasan wisata Cibodas Dsk

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema Kawasan** | **Kawasan Wisata Rekreasi Dan Wanawisata Cibodas** |
| **Daya Tarik Wisata** | * Taman Cibodas * Monumen PKT * Kolam pemancingan * Hutan kota * Lanskap areal PKT * Areal daur ulang/komposting Wanatirta * Sintuk Golf Course |
| **Aktivitas yang dikembangkan** | * Wisata rekreasi keluarga * Wisata kuliner * Olahraga |
| **Fasilitas yang dikembangkan** | * Restoran/rumah makan, kafe * TIC (tourist information center) * Areal parkir (baik bagi motor, mobil dan bis) * Toilet dan mushola * Shelter * Kios cenderamata * Amphiteater/panggung terbuka * Bangunan serbaguna untuk pelatihan wisata pendidikan lingkungan |
| **Aksesibilitas** | * Darat:   Dapat ditempuh dari Jalan Pupuk Raya, Jalan Poros   * Laut:   Dapat ditempuh dari Pelabuhan Lok Tuan dan pelabuhan lain di Kota Bontang |
| **Target Pasar** | * Pelajar/anak usia sekolah * Keluarga * Pekerja/Eksekutif muda |

1. **Kawasan Wisata Guntung**

Tabel 2.28. Kawasan wisata Guntung

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema kawasan** | **KAWASAN WISATA BUDAYA GUNTUNG** |
| **Daya Tarik Wisata** | * Perkampungan Guntung * Pulau Gusung * Penangkaran buaya * Erau Guntung * Rumah adat * Kuliner khas |
| **Aktivitas yang dikembangkan** | * Wisata budaya * Wisata kuliner * Wisata bahari * Wisata minat khusus |
| **Fasilitas yang dikembangkan** | * Restoran/rumah makan, kafe * TIC (tourist information center) * Areal parkir (baik bagi motor, mobil dan bis) * Toilet dan mushola * Shelter * Kios cenderamata * Amphiteater/panggung terbuka * Fasilitas penangkaran buaya * Guntung Interpretive center |
| **Aksesibilitas** | * Darat:   Dapat ditempuh dari Jalan Amonia-Kompleks PKT   * Laut:   Dapat ditempuh dari Pelabuhan Lok Tuan dan pelabuhan lain di Kota Bontang |
| **Target Pasar** | * Pelajar/anak usia sekolah * Keluarga * Pekerja/Eksekutif muda |

1. **Kawasan Taman Nasional Kutai**

Tabel 2.29. Kawasan Taman Nasional Kutai

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema Kawasan** | **Kawasan Ekowisata Taman Nasional Kutai** |
| **Daya Tarik Wisata** | * Orangutan * Flora dan fauna endemik lain |
| **Aktivitas yang dikembangkan** | * Ekowisata * Wisata minat khusus * Wisata mangrove |
| **Fasilitas yang dikembangkan** | * Restoran/rumah makan, kafe * TIC (tourist information center) * Areal parkir (baik bagi motor, mobil dan bis) * Toilet dan mushola * Shelter * Kios cenderamata * TNK Interpretive center * Balai/ruang serbaguna untuk pelatihan * Areal berkemah |
| **Aksesibilitas** | * Darat:   Dapat ditempuh dari jalan regional Bontang-Sangatta   * Laut:   Dapat ditempuh dari berbagai pelabuhan di Kota Bontang |
| **Target Pasar** | * Pelajar/anak usia sekolah * Keluarga * Pekerja/Eksekutif muda |

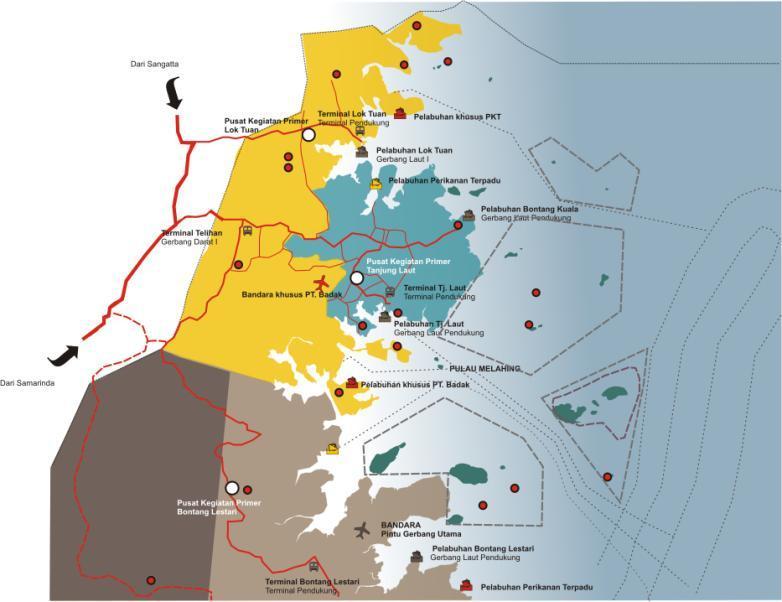
1. **Kawasan Wisata Pantai Tanjung Laut Indah**

Tabel 2.30. Kawasan wisata Pantai Tanjung Laut Indah

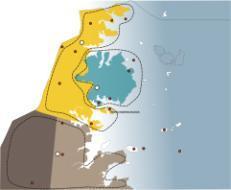
|  |  |
| --- | --- |
| **Tema Kawasan** | **Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Tanjung Laut Indah** |
| **Daya Tarik Wisata** | * Kafe Singapura dan Patung Merlion * Panorama perairan dan kegiatan PT Badak * Kuliner |
| **Aktivitas yang dikembangkan** | * Wisata rekreasi pantai * Wisata kuliner * Wisata bahari |
| **Fasilitas yang dikembangkan** | * Restoran/rumah makan, kafe * TIC (tourist information center) * Areal parkir (baik bagi motor, mobil dan bis) * Toilet dan mushola * Shelter * Kios cenderamata * Amphiteater/panggung terbuka * Promenade |
| **Aksesibilitas** | * Darat:   Dapat ditempuh dari Kel. Tanjung Laut   * Laut:   Dapat ditempuh dari Pelabuhan Tanjung Laut dan pelabuhan lain di Kota Bontang |
| **Target Pasar** | * Keluarga * Pekerja/Eksekutif muda |

### 3. Rencana Pengembangan Aksesibilitas

Rencana pengembangan aksesibilitas meliputi peletakan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan Kota Bontang. Sebagai pintu masuk utama(udara) melalui Kota Bontang adalah bandara yang akan dibangun di Kelurahan Bontang Lestari, didukung oleh gerbang darat seperti Terminal Telihan yang mengangkut penumpang dengan moda transportasi bis. Selain itu, terdapat pula beberapa pintu masuk yang dapat diakses dari wilayah perairan, yaitu Pelabuhan Lok Tuan yang merupakan pelabuhan utama baik untuk penumpang dan barang (pelabuhan tersier), Pelabuhan Tanjung Laut, dan Pelabuhan Bontang Kuala. Selain itu terdapat pula terminal-terminal pendukung seperti Terminal Bontang Lestari, terminal Tanjung Laut, serta Terminal Lok Tuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2.4. Peta Rencana Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata di Kota Bontang



### 4. Rencana Pengembangan Jalur Wisata

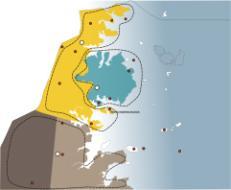
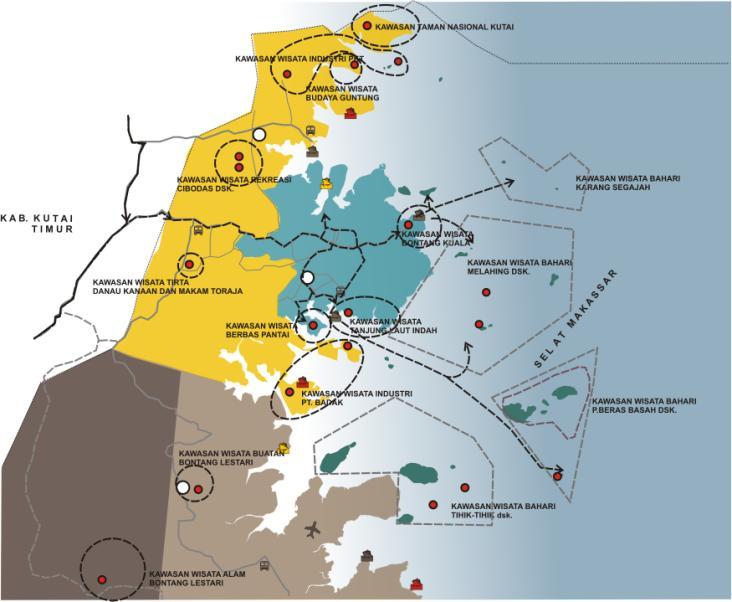
Rencana pengembangan jalur wisata di Kota Bontang didasari oleh pembagian wilayah pengembangan yang telah disinggung pada subbab 7.1, dimana Kota Bontang terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan pariwisata, yaitu WPP I (Kawasan Kota Lama), WPP II (Kawasan Industri), dan WPP III (Kawasan Kota Baru Bontang Lestari), Selain itu, karakteristik kegiatan yang telah berlangsung di masing-masing kawasan mempengaruhi tema yang akan diusung dalam pengembangan jalur wisata. Adapun rencana jalur wisata di Kota Bontang secara makroterbagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

* Jalur Wisata Budaya Bahari Bontang
* Jalur Wisata Industri dan Budaya Bontang
* Jalur Wisata Rekreasi Edukatif Kota Baru Bontang Lestari

Jalur wisata ini dapat dipecah menjadi jalur yang lebih kecil, tergantung kebutuhan masing-masing. Penjelasan mengenai masing-masing jalur wisata akan dijelaskan pada sub bab berikut:

Tabel 2.31. Rencana Jalur Wisata Budaya Bahari Bontang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jalur 1** | **Tema : Wisata Budaya Bahari Bontang** | | | |
| **Daya Tarik Utama** | Perkampungan Bontang Kuala, Kawasan Berbas Pantai, Kawasan Tanjung Laut Indah | **Daya Tarik Pendukung** | | Wisata Mangrove, P. Beras Basah dsk., Karang Segajah dsk, Kp. Melahing dsk. |
| **Akses** | Terminal Telihan, Pelabuhan Lok Tuan, Bandara Bontang Lestari (rencana) | **Sasaran** | | Wisnus lokal (Penduduk Bontang), wisnus regional (Sangatta, Samarinda, Balikpapan), wisnus primer dan sekunder, wisman primer (Asia Pasifik, Amerika, Eropa); pelajar, keluarga, pekerja |
| **PRAKONDISI YG HRS DIPENUHI** | | | | |
| * Kelengkapan fasilitas penunjang wisata (TIC, interpretive center), toilet, mushola, amphi teater (di kawasan tertentu) * Penataan jalur pedestrian, sarana parkir, moda transportasi publik * Penataan signage (penunjuk arah, papan informasi, tengaran/ gerbang) * Pengadaan guide/interpreter * Penyelenggaraan tur oleh BPW * Kegiatan promosi | | | * Penyediaan *supply boa*t (untuk kebutuhan katering/makan, akomodasi, dll) * Memperhitungkan *carrying capacity* pulau dan areal perairan yang dpt dimanfaatkan bagi kegiatan wisata * Penataan dermaga * Penyediaan kapal rekreasi/glass boat * Penyediaan/penyewaan fasilitas olahraga air/watersport * Penyediaan air bersih * *Time scheduling* kegiatan wisata perairan * Pembatasan jumlah pengunjung | |



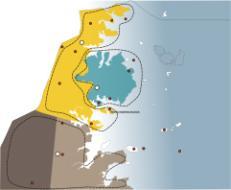
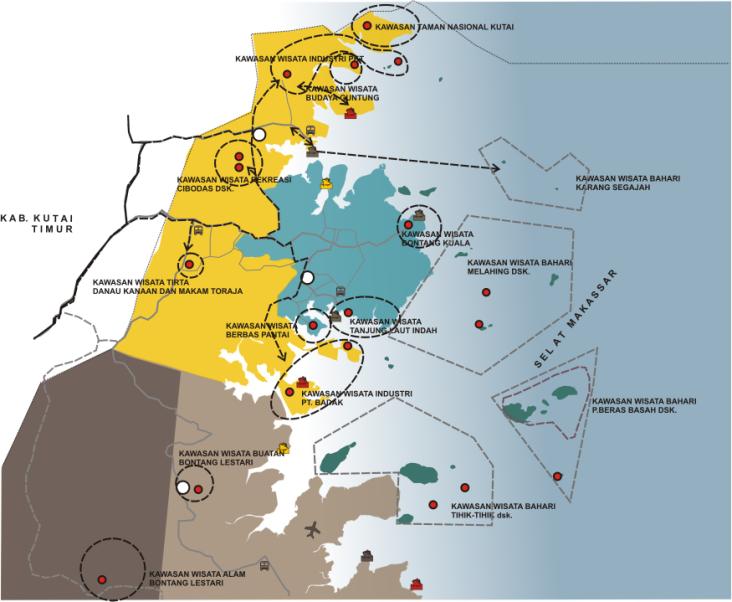
Gambar 2.5. Peta Rencana Jalur Wisata 1

### 5. Rencana Jalur Wisata Industri dan Budaya Bontang

**Gambar 7.4 Peta Rencana Jalur Wisata 1**

Tabel 2.32. Rencana Jalur Wisata Industri dan Budaya Bontang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **JALUR 2** | **TEMA : WISATA INDUSTRI dan BUDAYA BONTANG** | | | |
| **DY. TARIK UTAMA** | Kawasan industri PKT, Kawasan industri Badak, Perkampungan Guntung, | **DY TARIK PENDUKUNG** | | Taman Cibodas dsk, Danau Kanaan dan Makam Toraja, Pulau Gusung, sebagian wilayah Taman Nasional Kutai, Kawasan wisata bahari Karang Segajah |
| **AKSES** | Terminal Telihan, Pelabuhan Lok Tuan, Bandara Bontang Lestari (rencana) | **SASARAN** | | Wisnus lokal (Penduduk Bontang), wisnus regional (Sangatta, Samarinda, Balikpapan), wisnus primer dan sekunder, wisman primer (Asia Pasifik, Amerika, Eropa); pelajar, keluarga, pekerja |
| **PRAKONDISI YG HRS DIPENUHI** | | | | |
| * Kemudahan akses menuju kawasan wisata industri * Pengelolaan pengunjung (pengaturan waktu kunjungan, pembatasan jumlah pengunjung, pemenuhan persyaratan safety) * Penyediaan guide/interpreter berkualitas * Kelengkapan fasilitas penunjang wisata di Guntung * Penataan Danau Kanaan (pengerukan, penyediaan fasilitas wisata) * Kelengkapan fasilitas penunjang wisata (TIC, interpretive center), toilet, mushola | | | * Penataan jalur pedestrian, sarana parkir, moda transportasi publik * Penataan signage (penunjuk arah, papan informasi, tengaran/gerbang) * Penyediaaan guide/interpreter * Penyelenggaraan tur oleh BPW * Kegiatan promosi | |



Gambar 2.6. Peta Rencana Jalur Wisata 2

### 6. Rencana Jalur Wisata Rekreasi Edukatif Bontang Lestari

Tabel 2.33. Rencana Jalur Wisata Rekreasi Edukatif Bontang Lestari

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **JALUR 3** | **TEMA : WISATA REKREASI EDUKATIF BONTANG LESTARI** | | | |
| **DAYA. TARIK UTAMA** | Wisata buatan Bontang Lestari, wisata alam, kawasan wisata bahari Tihik-tihik | **DAYA TARIK PENDUKUNG** | | wisata mangrove, sport tourism, wisata budidaya perikanan |
| **AKSES** | Terminal Telihan, Pelabuhan Lok Tuan, Bandara Bontang Lestari (rencana) | **SASARAN** | | Wisnus lokal (Penduduk Bontang),pelajar, keluarga, pekerja |
| **PRAKONDISI YANG HRS DIPENUHI** | | | | |
| * Penyediaan guide/interpreter berkualitas * Penataan kawasan wisata dan kelengkapan (TIC, interpretive center, toilet, mushola, dll) * Penyediaan air bersih dan jaringan utilitas lain * Perbaikan akses masuk * Penataan jalur pedestrian * Pengadaan sarana parkir * Pengadaan moda transportasi publik | | | * Penataan signage (penunjuk arah, papan informasi, tengaran/gerbang) * Penyediaaan guide/interpreter * Penyelenggaraan tur oleh BPW * Kegiatan promosi | |

## Q. Program Dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisaaan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kebijakan pengembangan pariwisata Kota Bontang yang mencakup visi dan misi pengembangan pariwisata, tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata, mitigasi dampak pengembangan pariwisata, serta program dan prioritas program pengembangan pariwisata Kota Bontang.

### 1. Visi Pengembangan Pariwisata Kota Bontang

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan fokus dan arah kebijakan pembangunan serta menjadi ruh bagi program kerja kelembagaan/organisasi pemerintah daerah selama periode tertentu. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Bontang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pengembangan pariwisata di Kota Bontang akan merujuk pada Visi daerah baik dalam rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah Kota Bontang“**Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat** ”,

Visi pengembangan pariwisata di Kota Bontang merupakan gambaran ideal mengenai kondisi kepariwisataan seperti apa yang akan diwujdkan pada masa yang akan datang. Penetapan visi pariwisata di Kota Bontang idak terlepas dari kerangka visi pengembangan pariwisata nasional dan wilayah pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur serta pengembangan wilayah Kota Bontang secara keseluruhan. Visi pengembangan pariwisata Kota Bontang adalah; **Wisata kemaritiman Berkebudayaan** **Industri, didukukung SDM yang berkualitas dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

### 2. Misi Pengembangan Pariwisata Kota Bontang

Misi pengembangan pariwisata Kota Bontang merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Hal ini berarti misi yang akan dilaksanakan disusun dalam kerangka visi pengembangan pariwisata dan pengembangan wilayah Kota Bontang secara keseluruhan dengan mempertimbangkan karakteristik potensi yang ada.

Misi pengembangan pariwisata Kota Bontang antara lain adalah sebagai berikut

1. Mengembangkan produk wisata yang variatif dan memiliki ciri khas kemaritiman sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan
2. Mengembangkan pariwisa yang mampu memberikan pemasukan terhadap PAD
3. Mengembangkan pariwisata yang mampu berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia
4. Mengembangkan pariwisat yang dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal
5. Mengembangkan pariwisata yang dapat berperan sebagai agen pelestari budaya industri dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan pariwisata yang berorientasi pada upaya pengembangan usaha skala kecil dan menengah
7. Mengembangkan pariwisata yang mampu mendukung kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Bontang secara keseluruhan
8. Membentuk kesadaran dari *stakeholder*, pengusaha di bidang pariwisata, dan
9. masyarakat untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan pariwisata kemaritiman yang ramah lingkungan baik fisik maupun non fisik sehingga pengembangan pariwisata dapat diterima secara sosial dan ekologis.

### 3. Tujuan Dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Kota Bontang

Tujuan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi pariwisata yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan (15 tahun). Sedangkan sasaran merupakan suatu penjabaran dari tujuan secara terukur yang hendak dicapai selama masa perencanaan (jangka pendek dan menengah) Adapun tujuan pengembangan pariwisata Kota Bontang adalah mengembangkan produk wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan sasaran pengembangan pariwista Kota Bontang antara lain sebagai berikut

1. Terciptanya kegiatan wisata yang variatif sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dan menambah lama tinggal wisatawan di Kota Bontang
2. Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang wisata yang dapat meningkatkan aksesibilitas ke Kota Bontang dan ke kawasan wisata
3. Terciptanya bentuk pemasaran pariwisata yang dapat memperkenalkan pariwista di Kota Bontang di pasar pariwista lokal, Kaltim dan Nusantara.
4. Terciptanya kegiatan ekonomi lokal (kerajinan rakyat, pertanian) yang dapat menunjang kegiatan pariwisata
5. Terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi masyarakat lokal dalam rangka mempersiapkan tenaga terampil yang akan berperan dalam kegiatan parwisata
6. Terciptanya iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha/investasi di sektor pariwisata.

### 4. Mitigasi Dampak Pengembangan Pariwisata Kota Bontang

Pengembangan pariwisata di Kota Bontang mempunyai dampak, baik berupa dampak positif atau yang menguntungkan maupun dampak negatif atau dampak yang merugikan. Beberapa dampak positif dari pariwisata antara lain memberikan lapangan kerja atau tambahan pendapatan kepada penduduk lokal, mendorong pertumbuhan sektor lain (kelautan, industri kecil dan kerajinan, jasa dan lain-lain), memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah, meningkatkan atau memperbaiki kondisi berbagai fasilitas yang juga dapat dimanfaatkan oleh pendudu lokal atau sektor lain dan lain-lain. Adapun dampak negatif dari pariwisata antara lain biaya hidup meningkat sehingga memberatkan kehidupan penduduk lokal, berkurangnya lahan pertanian, beralihnya kepemilikan tanah ke pihak luar, rusak atau menurunnya kualitas lingkungan, berkurangnya ikatan sosial antar anggota masyarakat dan lain-lain. Tidak semua daerah wisata akan mengalam dampak tersebut. Biasanya dampak positif terjadi pada aspek ekonomi sementara untuk aspek sosial budaya dan lingkungan lebih sering terjadi dampak negatif.

Selain berbagai dampak tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah sikap penduduk terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya. Bila penduduk kurang setuju atau menolak rencana pengembangan pariwisata di daerahnya dengan berbagai alasan yang mendasarinya, maka rencana pengembangan pariwisata di daerah tersebut akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Beberapa alasan yang seringkali dijadikan alasan bagi penduduk untuk menolak pengembangan pariwisata di daerahnya antara lain, kurang dilibatkannya penduduk dalam proses perencanaan, kebutuhan tenaga kerja tidak memberikan prioritas pada penduduk lokal, jenis wisata yang dikembangkan tidak sesuai atau melanggar aturan sosial lokal, mengganggu kepentingan umum, dampak lingkungan, penduduk tidak memperoleh manfaat/keuntungan apapun dari pariwisata sementara yang didapat hanya dampak negatif belaka.

Secara umum sikap penduduk terhadap rencana pengembangan pariwisata di daerahnya tergantung pada seberapa besar pariwisata akan memberikan manfaat atau keuntungan kepada penduduk. Dengan demikian harus diupayakan agar rencana pengembangna pariwisata di Kota Bontang dapat memberikan manfaat atau keuntungan kepada penduduk. Dengan demikian harus diupayakan agar rencana pengembangan pariwisata di daerahnya maka upaya untuk mengembangkan pariwisata relatif akan jauh lebih mudah karena didukung oleh sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat.

Walaupun tidak semua daerah wisata akan mengalami dampak tersebut, namun untuk memperkecil kemungkinan terjadinya dampak yang tidak diharapkan maka sejak awal harus dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasinya. Dengan demikian berbagai dampak negatif dapat diminimalisir sedangkan dampak positif dapat dioptimalkan.

### 5. Program Pengembangan Pariwisata Kota Bontang

Pariwisata di Kota Bontang masih dalam tahap pengembangan, yang biasa diistilahkan sebagai *Exploration Stage.* Pariwisata Dalam tahap ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut

1) **Tingkat aksesibilitas yang masih rendah**.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian Kota Bontang, Provinsi Kaltim maupun wilayah lain di Indonesia masih perlu dikembangkan. Tingkat aksesibilitas beberapa obyek wisata terhadap wilayah kota memang di lapangan sudah memadai, namun perlu ditingkatkan kualitasnya.

2) **Tingkat Penyediaan Sarana dan prasarana yang belum memadai.**

Fasilitas dasar yang dibutuhkan cukup tersedia apalagi dengan kualitas yang memadai perlu terus ditingkatkan. Penyediaan beberapa fasilitas yang dibutuhkan antara lain penginapan, rumah makan, warung makan, utilitas WC, tempat sampah, papan informasi, tempat ibadah, air bersih, listrik, telepon dan lainnya.

Sebagimana yang telah dijelaskan pada analisis di Bab sebelumnya bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bontang ini relatif masih rendah, bahkan beberapa obyek yang letaknya agak jauh dari akses pencapaian utama masih sangat sedikit. Wisatawan yang datang atau berkunjung ke obyek wisata umumnya adalah wisatawan lokal yang berasal dari wilayah sekitar itu sendiri.

Sebagian besar wisatawan dari luar wilayah Kota Bontang, berkunjung ke wilayah ini sampingan dari kegiatan dinas atau berkunjung ke keluarganya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan pariwisata memang masih belum menjadi tujuan utama orang datang ke Bontang. Minimnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bontang secara umum, selain disebabkan karena jauhnya tingkat aksesibilitas ke Kota Bontang juga disebabkan oleh belum banyak dikenalnya Kota Bontang sebagai daerah wisata. Baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara masih belum banyak mengenal atau mengetahui daya tarik Kota Bontang.

Mengingat masih sedikitnya intentsitas pembangunan obyek wisata dan jumlah wisatawan yang terbatas maka dampak fisik dan lingkungan belum terlihat. Kondisi lingkungan masih asli dan belum mengalami perubahan yang berarti. Dalam kondisi seperti tersebut maka pariwisata Kota Bontang belum mampu memberikan peran yang berarti dalam menumbuhkan perekonomian wilayah, menambah lapangan kerja, memberikan pendapatan kepada penduduk lokal dan peran lain yang diharapkan. Masih banyak upaya dan waktu yang diperlukan untuk membangkitkan pariwisata Kota Bontang agar mampu berperan lebih banyak dalam mendorong pertumbuhan wilayah.

Dalam beberapa keterbatasan atau kendala tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya atau program untuk meningkatkan daya tarik wisata sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang akan datang. Beberapa program yang diusulkan bersifat umum dimana nantinya dapat diterapkan di semua obyek wisata yang terdapat di wilayah Kota Bontang. Program yang diusulkan akan terdiri dari program-program yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata dan juga yang tidak berkaitan secara langsung dengan sektor pariwisata.

#### a. Program Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan meningkatkan daya tarik Kota Bontang sebagai daerah tujuan wisata maka perlu dilakukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Mengingat jumlah obyek wisata di Kota Bontang cukup banyak sedangkan kapasitas/sumberdaya terutama kemampuan finansial dan sumberdaya manusia yang terbatas maka perlu dilakukan prioritas pengembangan terhadap obyek wisata yang ada.

Obyek wisata yang akan dikembangkan adalah obyek wisata yang potensial berkembang Kawasan pesisir dengan segala potensi hasil pengolahannya dan cirikas kuliner dengan menu ikan lautnya.

#### b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata

Salah satu komponen sediaan pariwisata yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangna pariwisata adalah tingkat aksesibilitas, terutama dari luar daerah. Secara umum, semakin tinggi/baik tingkat aksesibilitas suatu daerah akan semakin tinggi pula peluang bagi wisatawan untuk datang/berkunjung ke daerah tersebut. Beberapa pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa daya tarik wisata suatu daerah menjadi kurang berarti apabila tingkat aksesibilitas kawasan tersebut masih rendah.

Aksesibilitas eksternal dapat berupa tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan daerah tesebut dengan daerah luar baik melalui udara, air maupun darat. Dalam kasus Kota Bontang, aksesibilitas eksternal adalah tingkat kemudahan pencapaiannya dari ibukota provinsi (kota Samarinda) sebagai pintu masuk utama ke provinsi Kaltim selain dari Kota Balikapapan.

Selain aksesibilitas eksternal, yang tidak kalah penting adalah aksesibilitas internal atau aksesibilitas di dalam kawasan. Tingkat kemudahan pencapaian beberapa obyek wisata sudah relatif baik, hal ini dilihat dari ketersediaan akses jalan yang sudah semakin baik di wilayah Kota Bontang.

#### c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Wisata

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menarik wisatawan/pengunjung baru maupun pengunjung lama yang pernah berkunjung sebelumnya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai produk atau jasa wisata yang ada. Untuk mencapai maksud tersebut selain dilakukan dengan menambah fasilitas fisik yang baru dan memperbaiki fasilitas lama yang telah ada adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Sumberdaya manusia yang terlibat langsung dengan pariwisata, terutama yang berhubungan langsung dengan wisatawan perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan. Dengan kualitas pelayanan yang baik, diharapkan wisatawan/pengunjung akan merasa puas dan mendapatkan pengalaman berwisata yang memuaskan. Wisatawan yang merasa puas biasanya akan kembali lagi lain waktu dan menceritakan pengalamannya kepada orang lain sehingga dapat menarik minat orang lain untuk berkunjung ke daerah tersebut.

#### d. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pelatihan atau lokakarya antara lain tentang peran pariwisata dalam menunjang pengembangan wilayah Kota Bontang. Pelatihan ini ditujukan kepada aparat pemerintah daerah yang mengurusi pariwisata terutama Dinas Perhubungan dan Pariwisata serta Bappeda selaku badan perencana daerah. Selain itu juga perlu melibatkan swasta, wakil masyarakat dan lain-lain agar mereka dapat berpartisipasi langsung atau tidak langsung dalam mengembangkan pariwisata misalnya dalam menjaga kebersihan lingkungan, bersika ramahkepada setiap orang termasuk wisatawan dan lain-lain. Pegawai dan karyawan usaha/jasa yang berhadapan langsung dengan wisatawan juga perlu memperoleh pelatihan tentang perlunya mewujudkan kualitas pelayanan yang baik dalam pariwisata.

#### e. Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Wisata

Pariwisata merupakan suatu industri yang banyak menghasilkan devisa bagi Negara dan PAD bagi daaerah, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan sektor ini dengan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan pariwisata. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan industri pariwisata di kawasan ini diantaranya mengadakan sarana akomodasi yang memadai, promosi, kemudahan perjalanan, penambahan dan pengembangan kawasan pariwisata, dan terus mengupayakan produk wisata baru. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata kawasan ini sangat perlu dukungan oleh peran dan program peningkatan serta pengembangan potensi pariwisata diseluruh wilayah Kota Bontang. Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang sangat diperlukan untuk pembangunan daerah.

#### f. Program Pemantapan Kelembagaan Pariwisata

Pengembangan pariwisata mempunyai peluang yang lebih besar untuk berhasil bila didukung oleh perangkat kelembagaan yang memadai. Sampai saat ini di Kota Bontang baru terdapat kelembagaan Pemerintah Daerah Dinas, Pemuda, Olah raga & Pariwisata. Sedangkan kelembagaan dari swasta dan masyarakat sudah cukup mendukung, namun masih perlu ditingkatkan peran masing-masing lebih optimal untuk dapat meningkatkan perkembangan kepariwisataan di Kota Bontang.

#### g. Program Pengembangan Promosi Wisata

Dalam rangka memperkenalkan potensi pariwisata Kota Bontang ke luar daerah, maka perlu dilakukan promosi yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti brosur, leaflet, internet dan lain-lain. Promosi juga dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pameran pembangunan yang sering dilakukan pemerintah atau pihak lainnya.

Memperhatikan posisi Kota Bontang yang berada di kawasan kota pesisir, maka peran dari upaya promosi perlu digalakan sehingga diharapkan akan banyak orang dari daerah luar yang datang untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga sektor pariwisata juga akan tumbuh dengan bergantung pada pengembangan sektoral lainnya.

## R. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan

Indikasi program Pembangunan merupakan jabaran rinci dari setiap strategi yang disusun kedalam suatu bentuk program yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu. Indikasi program disusun untuk kerangka waktu 5 tahunan , dan tiap 5 tahun program hendaknya dikaji kembali dengan mempedomani kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Rincian indikasi program terdiri dari :

* Program Jangka Panjang, dengan skala waktu 15 tahun; yang dibagi menjadi program 5 tahunan. Perumusan program masih bersifat umum dan garis besar, tetapi memperlihatkan langkah- langkah yang akan ditakukan pada setiap lima tahunan selama 20 tahun.
* Program Jangka Pendek, dengan skala waktu 5 tahun, yang terdiri, dari program tahunan. Merupakan program 5 tahun pertama dari program 20 tahun; yang mengidikasikan materi program utama dan program pendukung.

Rincian indikasi program meliputi Program :

* Program Utama, yaitu program yang berkaitan dengan substansi pariwisata, meliputi: Pembangunan produk, pemasaran dan promosi, sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, pemantapan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat
* Program Pendukung, yaitu program-program yang diharapkan dilakukan oleh instansi lain untuk mendukung Pembangunan kepariwisataan.

Indikasi program Pembangunan memuat :

* Nama program.
* Sasaran dan tujuan program dan kaitannya di dalam mendukung strategi tertentu.
* Justifikasi dan rincian program.
* Jadwal pelaksanaan program.
* Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program.

Dari uraian diatas, Indikasi program pembangunan untuk pariwisata Kota Bontang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Indikasi Program**

Tabel 2.34. Kebijakan Destinasi Pariwisata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBIJAKAN DESTINASI PARIWISATA** | **PROGRAM** | **JANGKA WAKTU** | | | **PENANGGUNGJAWAB** | | |
| **5 TH PERTAMA** | **5 TH KEDUA** | **5 TH KETIGA** | **UTAMA** | **PENDUKUNG** | |
| **KEBIJAKAN 1:**  **PENGEMBANGAN STRUKTUR WILAYAH KEPARIWISATAAN MELALUI PEMBAGIAN ZONASI** | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Mempertimbangkan arahan zonasi yang sudah ditentukan bagi aktivitas pariwisata. | * Pembagian struktur perwilayahan pariwisata berdasarkan karakteristiknya dan kebijakan ketataruangan. |  |  |  | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Pemetaan pemusatan prasana dan sarana wisata berdasarkan pembagian struktur wilayah kepariwisataan |  |  |  | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Penentuan dan pemetaan zonasi di kawasan perairan Kota Bontang sebagai upaya awal pemakaian kegiatan lahan perairan bagi kegiatan pelayaran, aktivitas perikanan, maupun kegiatan pariwisata. |  |  |  | Bappeda Kota, Dinas Perikanan Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| **STRATEGI 2**  Mengembangkan prasarana dan sarana kepariwisa­taan ke arah wilayah Bontang Lestari sebagai upaya pemerataan distribusi wisatawan serta mengurangi tekanan pembangunan di daerah utara dan barat. | * Penyusunan strategi produk wisata Bontang Lestari/rencana aksi |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang |
| * Pemetaan atraksi wisata serta prarana dan sarana kepariwisataan di Bontang LestarI |  |  |  | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang | | Dinas PU Kota Bontang,  Disbudpar Kota Bontang |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBIJAKAN 2:**  **PENETAPAN KAWASAN WISATA ANDALAN UNTUK MENDORONG AKSELERASI KESIAPAN, KUALITAS, DAN DAYA SAING DESTINASI** | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Menetapkan kawasan wisata andalan di Kota Bontang yang diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan wisata andalan | * Penetapan dan pemetaan tema kawasan wisata |  | |  |  | Disbudpar Kota Bontang | | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang |
| * Penetapan dan pemetaan daya tarik utama dan pendukung |  | |  |  | Disbudpar Kota Bontang | | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang |
| * Penetapan dan pemetaan pusat pelayanan primer dan sekunder |  | |  |  | Bappeda Kota Bon­tang Dinas Tata Ruang Kota Bontang | |  |
| * Penetapan dan pemetaan jalur wisata dan keterkaitannya dengan wilayah yang lebih luas |  | |  |  | Disbudpar Kota Bontang | | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang |
| **KEBIJAKAN 3:**  **PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN TRANSPORTASI PRASARANA** | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan kualitas prasarana darat, laut, dan udara untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana | * Peningkatan kualitas pelayanan dan kondisi pelabuhan | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang, Dinas PU Kota Bontang |  | |
| * Peningkatan kualitas pelayanan dan kondisi terminal | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang, Dinas PU Kota Bontang |  | |
| * Perbaikan jalan menuju daya tarik wisata | |  |  |  | | Dinas PU Kota Bontang |  | |
| * Pembangunan bandara udara dan kelengkapan fasilitasnya | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang, Dinas PU Kota Bontang |  | |
| **STRATEGI 2**  Meningkatkan kualitas sarana transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu melalui pengadaan rute dan sarana transportasi publik yang dapat diakses wisatawan secara mudah | * Pengadaan kapal wisata bagi wisatawan | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang |  | |
| * Pengadaan bis untuk wisatawan dengan rute tertentu (sistem hop on hop off) | |  |  |  | | Dinas Perhubungan KOta Bontang |  | |
| * Pengadaan sarana parkir | |  |  |  | | Dinas PU Kota Bontang |  | |
| * Pengadaan rambu dan signage penunjuk arah menuju ODTW | |  |  |  | | Dinas PU Kota Bontang |  | |
| **STRATEGI 3**  Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak dalam bidang transportasi untuk memperkuat daya saing kepariwisataan Kota Bontang | * Kerjasama dengan maskapai asing dan maskapai dalam negeri lainnya | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD | |
| * Kerjasama dengan perusahaan kapal pesiar baik asing maupun dalam negeri | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD | |
| **STRATEGI 4**  Meningkatkan pengelolaan dan informasi transportasi | * Peningkatan frekuensi penerbangan dan pelayaran | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang |  | |
| * Penyusunan pengelolaan jadwal pemberangkatan scr teratur bagi berbagai moda transportasi | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang |  | |
| * Informasi mengenai transportasi yang dapat diakses dari manapun | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang |  | |
| * Pengadaan peta jalur wisata/jalur transportasi dan moda transportasi di darat dan laut | |  |  |  | | Dinas Perhubungan Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBIJAKAN 4:**  **PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS FASILITAS PENUNJANG WISATA DAN FASILITAS UM** | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan kualitas restoran/ rumah makan dan pelayanannya serta keragaman jenis restoran | * Peningkatan variasi jenis makanan dan kualitas penyajian |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | PHRI Kota Bontang | |
| **STRATEGI 2**  Meningkatkan kualitas akomodasi, pelayanan, dan keragaman jenisnya | * Peningkatan cara pengemasan serta pelayanan hotel dan restoran |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | PHRI Kota Bontang | |
| **STRATEGI 3**  Mengembangkan wadah/fasilitas informasi kepariwisataan di titik strategis | * Pembangunan TIC di titik strategis |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Dinas PU Kota Bontang | |
| **STRATEGI 4**  Meningkatkan kualitas sarana pendukung lainnya | * Penambahan sarana wartel, warnet, fasilitas hotspot di hotel, rumah sakit/ puskesmas, bank/ atm, retail, toko souvenir |  |  |  | Dinas PU Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang | |
| **KEBIJAKAN 5:**  **PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK WISATA YANG MEMPERTIMBANGKAN DIFERENSIASI, KEKHASAN, DAN OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN** | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Mengembangkan kegiatan wisata dan budaya bahari di pesisir dan perairan Kota Bontang yang memperhatikan konsep ekowisata | * Pengembangan keragaman kegiatan wisata bahari pada zonasi yang telah ditentukan. |  |  |  | Disbudpar Kota Bon­tang, Dinas Perikanan Kota Bontang | BLH Kota Bontang | |
| * Penyusunan materi interpretasi bagi *ecotourism* di wilayah bahari |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang, | BLH Kota Bontang, Dinas Perika­nan Kota Bontang | |
| * Pembentukan lembaga yang mengelola kegiatan wisata bahari |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang |  | |
| * Penyusunan rencana aksi pengembangan wisata bahari |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang |  | |
| * Penyusunan pedoman pengembangan wisata bahari |  |  |  | BLH Kota Bontang, Disbudpar Kota Bontang | Dinas Perikanan Kota Bontang | |
| * Penyusunan database produk wisata bahari/ ekowisata/minat khusus |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang |  | |
| **STRATEGI 2**  Mengembangkan kegiatan wisata bahari yang mempunyai ciri khas tersendiri antar kawasan (*one village one product*) | * Penyusunan kegiatan penelitian lanjutan bagi identifikasi sumber daya wisata bahari |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Dinas Perikanan Kota Bontang | |
| * Pengembangan souvenir khas masing-masing kawasan |  |  |  | Disperindagkop Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang, Kompepar | |
| **STRATEGI 3**  Mengembangkan kegiatan wisata industri sebagai bagian dari penguatan citra Kota Bontang | * Penyusunan iden­tifikasi dan daya tarik kawasan industri sebagai kawasan wisata |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | PT PKT, PT Badak, ASITA | |
| * Pembangunan museum tematik (industri) |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Dinas PU Kota Bon­tang, PT PKT, PT Badak | |
| * Pengembangan paket wisata edu­tourism ke berba­gai kawasan indus­tri serta *industrial cultural landscape* di Kota Bontang |  |  |  | ASITA | Disbudpar Kota Bontang. PT PKT, PT Badak | |
| * Pembentukan lembaga/asosiasi yang mengelola kegiatan wisata industri |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang |  | |
| * Penyusunan rencana aksi pengembangan wisata industri |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Disperindagkop Kota Bontang | |
| * Penyusunan pedoman pengembangan wisata industri |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | BLH Kota Bontang, Disperindagkop Kota Bontang | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEGI 4**  Memanfaatkan lahan hutan kota secara optimal bagi kegiatan wisata pendidikan | * Penataan kawasan melalui perencanaan dan perancangan sarana bagi kegiatan wisata pendidikan (loket tiket, papan informasi, kafe, areal parkir, street furniture, dll |  |  | |  | Dinas Tata Ruang Kota | | Dinas PU Kota Bontang |
| * Penyusunan badan pengelola kegiatan wisata di hutan kota |  |  | |  | Dinas Tata Ruang Kota, Disbudpar Kota Bontang, | | PT PKT, PT Badak |
| * Pengembangan prasarana (jaringan listrik/lampu, drainase, air limbah, persampahan, dsb) |  |  | |  | Dinas PU Kota Bontang | |  |
| **STRATEGI 5**  Mengembangkan paket dan jalur wisata yang menekankan aspek interpretasi | * Pelatihan para interpreter dan guide |  |  | |  | Disbudpar Kota Bontang, | | Dinas Pendidikan Kota Bontang, lembaga pendidikan tinggi |
| * Penyusunan materi interpretasi bagi berbagai pengembangan jalur wisata di Kota Bontang maupun di dalam daya tarik wisata. |  |  | |  | Disbudpar Kota Bontang | | Dinas Pendidikan Kota Bontang, lembaga pendidikan tinggi |
| * Pembangunan signage dan papan informasi di jalur wisata, pintu masuk, di dalam kawasan wisata |  |  | |  | Dinas PU Kota Bontang | |  |
| **KEBIJAKAN 6:**  **PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESTINASI WISATA** | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata | * Pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pariwisata destinasi |  | |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang,  Dinas Kependudukan | |
| * Pelibatan masyarakat lokal dalam semua tahapan rencana pengembangan pariwisata |  | |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota | |
| **STRATEGI 2**  Menguatkan kelembagaan masyarakat | * Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat/lembaga adat |  | |  |  | Kecamatan dan kelurahansetempat |  | |
| * Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa |  | |  |  | Kecamatan dan kelurahan setempat |  | |
| **KEBIJAKAN 7:**  **PENINGKATAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DI BIDANG KEPARIWISATAAN** | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan kapasitas dan kemampuan layanan usaha masyarakat di bidang pariwisata | * Pengadaan pelatihan, workshop, dan konsultasi bagi masyarakat yang terjun di usaha pariwisata |  | |  |  | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang | |
| * Penyediaan akses terhadap lapangan kerja bagi masyarakat lokal sebagai SDM pariwisata (guide, interpreter, pemilik usaha warung, dll) |  | |  |  | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang | |
| **STRATEGI 2**  Meningkatkan akses pasar terha­dap produk wisata/ usaha ekonomi pariwisata yang dikembangkan masyarakat | * Bantuan pengembangan media promosi terhadap usaha pariwisata masyarakat |  | |  |  | Dinas Perhubungan, Komu­nikasi, dan Informati­ka Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang | |
| * Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kemudahan berusaha masyarakat |  | |  |  | Dinas PU Kota Bontang |  | |
| **STRATEGI 3**  Meningkatkan dukungan permodalan bagi masyarakat | * Bantuan penyusunan proposal pada berbagai perusahaan untuk mendukung usaha masyarakat |  | |  |  | Disperindagkop Kota Bontang | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| * Penyediaan bantuan baik dalam bentuk dana, pelatihan, atau konsultasi bagi masyarakat lokal yang hendak melakukan usaha |  | |  |  | Disperindagkop Kota Bontang | PT PKT, PT Badak | |
| * Pengadaan insentif dan berbagai kemudahan lainnya bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan usaha |  | |  |  | Disperindagkop Kota Bontang |  | |
| * Perlindungan pemerintah bagi usaha UMKM baik berupa kebijakan/ peraturan, dan lainnya. |  | |  |  | Disperindagkop Kota Bontang |  | |
| **KEBIJAKAN 8:**  **PENGUATAN KESADARAN WISATA MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pariwisata agar menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat | * Sosialisasi pentingnya sadar wisata dan Sapta Pesona pada masyarakat |  |  | |  | Disbudpar Kota Bontang | | Kecamatan dan kelurahan setempat |
| * Pembinaan lemba­ga masyarakat/pe­merintah desa ten­tang pentingnya pariwisata |  |  | |  | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| **STRATEGI 2**  Meningkatkan motivasi masyarakat setempat untuk mengunjungi dan mengenali daya tarik wisata setempat | * Promosi antar pelaku usaha untuk menggerak­kan kunjungan wisatawan pada ODTW |  |  | |  | Disbudpar Kota Bontang, PHRI, ASITA | |  |
| * Pengembangan kemudahan perjalanan wisata berupa paket wisata bagi masyarakat |  |  | |  | ASITA | | Disbudpar Kota Bontang |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBIJAKAN 9:**  **PENGELOLAAN PENGUNJUNG SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR DAMPAK POTENSI PARIWISATA MASSAL** | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Merumuskan strategi pengelolaan pengunjung untuk menjaga daya dukung kawasan, ekosistem setempat, sekaligus menciptakan kenyamanan bagi wisatawan | * Pemetaan dan identifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, diantaranya dg metode penghitu­ngan *carrying capacity* pada berbagai kawasan wisata, khususnya kawasan yang mempunyai kerentanan tinggi |  | |  | |  | BLH Kota Bontang, Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang |  | |
| * Penyusunan studi pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan yang mempunyai daya dukung terbatas (kawasan konser­vasi, termasuk diantaranya taman nasional, kawasan pemanfaatan terbatas di perairan, dan kawasan inti di perairan ) |  | |  | |  | Pengelola kawasan/ daya tarik wisata | Disbudpar Kota Bontang, BLH Kota Bontang | |
| * Penyusunan studi modifikasi waktu pemanfatan bagi kegiatan wisata |  | |  | |  | Pengelola kawasan/ daya tarik wisata | Disbudpar Kota Bontang | |
| * Penyusunan studi pembatasan jumlah kunjungan dan lama tinggal di tempat tertentu yang mempunyai kerentanan tinggi |  | |  | |  | Pengelola kawasan/ daya tarik wisata | Disbudpar Kota Bontang, BLH Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang | |
| **STRATEGI 2**  Mendistribusikan kunjungan wisata­wan ke wilayah/ daya tarik wisata lainnya/non unggulan | * Pengembangan prasarana dan sarana penunjang kepariwisataan di kawasan wisata lainnya |  | |  | |  | Dinas PU Kota Bontang | Dinas Tata Ruang Kota Bontang, Disbudpar Kota Bontang | |
| * Pengembangan moda transportasi umum ke kawasan wisata non unggulan |  | |  | |  | Dinas Perhubungan Kota Bontang | Dinas Tata Ruang Kota Bontang | |
| **KEBIJAKAN 10:**  **PENGEMBANGAN INVESTASI KEPARIWISATAAN BESERTA PELAYANANNYA YANG MENDUKUNG KONSERVASI LINGKUNGAN DAN BUDAYA** | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif pada usaha pariwisata | * Pengembangan sistem insentif investasi pada investor usaha kepariwisataan di wilayah yang hendak dikembangkan dan kawasan nonunggulan |  | |  | |  | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD Kota Bontang | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang |
| * Pengenaan bebas pajak pada investor usaha pariwisata(hotel,restoran, hiburan) yang mendorong konservasi lingkungan alam dan budaya pada tahun-tahun awal |  | |  | |  | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD Kota Bontang | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang |
| **STRATEGI 2**  Meningkatkan kualitas pelayanan investasi dengan penyederhanaan prosedur investasi pariwisata | * Pengembangan/aplikasi pelayanan OSS (One stop service) untuk perijinan usaha pariwisata |  | |  | |  | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD Kota Bontang | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang |
| * Optimalisasi peran SKPD kepariwisa­taan dan pening­katan koordinasi dengan stakehol­der lain dalam perijinan usaha pariwisata |  | |  | |  | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD Kota Bontang | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang |
| **STRATEGI 3**  Meningkatkan promosi peluang investasi kepariwisataan | * Studi penyusunan profil peluang investasi pariwi­sata Kota Bontang (umum) dan kawasan wisata yang diunggulkan |  | |  | |  | Bappeda Kota Bontang |  |
| * Pembuatan website peluang investasi pariwisata |  | |  | |  | Dinas Per­hubu­ngan, Komunikasi dan Infor­matika |  |
| * Pembuatan dan penyebaran buku profil peluang investasi pariwisata |  | |  | |  | Dinas Per­hubungan, Komunikasi dan Informatika |  |
| **KEBIJAKAN 11:**  **PENGEMBANGAN MITIGASI BENCANA DALAM KEPARIWISATAAN** | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Penyusunan dan penerapan upaya mitigasi bencana di destinasi pariwisata Kota Bontang | * Pemetaan karakteristik bencana di destinasi | |  | |  |  | Bappeda Kota Bontang | Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional |
| * Identifikasi kesiapan industri pariwisata, wisatawan, masyarakat, dan instansi pemerintah | |  | |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Bappeda Kota Bontang |
| * Pemetaan permasalahan dan tantangan faktor fisik dan nonfisik dalam upaya mitigasi bencana | |  | |  |  | Bappeda Kota Bontang, | Dinas Tata Ruang Kota Bontang, Dinas Perhubungan Kota Bontang |
| * Penyusunan strategi mitigasi bencana di destinasi | |  | |  |  | Bappeda Kota Bontang, | Dinas Tata Ruang Kota Bontang, Dinas Perhubungan Kota Bontang, Disbudpar Kota Bontang |
| * Penyusunan mekanisme koordinasi antar sektor terkait dan pembentukan badan koordinasi mitigasi bencana | |  | |  |  | Bappeda Kota Bontang | Dinas Tata Ruang Kota Bontang, Dinas Perhubungan Kota Bontang,  Disbudpar Kota Bontang |

Tabel 2.34. Kebijakan Industri Pariwisata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBIJAKAN**  **INDUSTRI PARIWISATA** | **PROGRAM** | **JANGKA WAKTU** | | | **PENANGGUNG JAWAB** | |
| **5 TH PERTAMA** | **5 TH KEDUA** | **5 TH KETIGA** | **UTAMA** | **PENDUKUNG** |
| **KEBIJAKAN 1:**  **PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK WISATA KOTA BONTANG** | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata | * Pelatihan teknologi informasi bagi staf pengelola usaha pariwisata |  |  |  | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang |
| **STRATEGI 2**  Mengadakan sertifikasi usaha pariwisata bertaraf internasional | * Pengadaan akses bagi usaha pariwisata untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata bertaraf internasional |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang |  |
| **STRATEGI 3**  Meningkatkan kemampuan managerial pengelolaan usaha pariwisata bertaraf ineternasional | * Pelatihan managerial bagi staf /SDM pariwisata |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang, ASITA, PHRI | Lembaga pendidikan tinggi |
| **STRATEGI 4**  Mengadakan insentif bagi usaha di kawasan pariwisata yang belum berkembang | * Penerapan tax holiday |  |  |  | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD Kota Bontang |  |
| **STRATEGI 5**  Meningkatkan sistem perizinan usaha pariwisata | * Pengadaan sistem perizinan satu atap untuk pariwisata |  |  |  | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD Kota Bontang |  |
| * Penyusunan kebijakan berupa sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak memenuhi regulasi perizinan dan peraturan |  |  |  | Badan Pelayanan Perijinan dan PMD Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang |
| **STRATEGI 6**  Menerapkan standar keamanan dan perlindungan konsumen dalam usaha pariwisata | * Penerapan standar keamanan, pemberian ganti rugi bagi konsumen, dan sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar yang telah ditentukan |  |  |  | Asosiasi usaha pariwisata |  |
| * Pengadaan sistem asuransi perjala­nan wisata/paket wisata yang terjangkau oleh wisatawan |  |  |  | ASITA, bank |  |
| **KEBIJAKAN 2:**  **PENGEMBANGAN KEMITRAAN** | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan kemitraan antar usaha pariwisata | * Pengembangan skema kerjasama antara usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata dan menjual produk wisata lainnya |  |  |  | Asosiasi usaha pariwisata (mis.ASITA) |  |
| **STRATEGI 2**  Meningkatkanan kemitraan antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat | * Sosialisasi penggunaan sumber daya lokal (misal SDM lokal, bahan baku lokal) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata |  |  |  | Disperindagkop Kota Bontang | Asosiasi usaha pariwisata |
| * Pengadaan pelatihan, workshop, seminar, maupun konsultasi oleh stakeholder terkait dalam pengembangan usaha pariwisata |  |  |  | Disperindagkop Kota Bontang | Disbudpar Kota Bontang, |
| * Pemberian insentif pada usaha pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM |  |  |  | Disperindagkop Kota Bontang |  |
| * Penyelenggaraan forum komunikasi secara berkala antara pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang |  |
| **KEBIJAKAN 3:**  **PENINGKATAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PARIWISATA TERHADAP LINGKUNGAN ALAM DAN SOSIAL BUDAYA** | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Memanfaatkan dana CSR untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta penelitian mengenai pariwisata | * Penyusunan proposal peneli­tian, penataan kawasan/objek wisata |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang |
| * Pengembangan pilot project untuk merintis pengembangan daya tarik wisata, penelitian, dll |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Bappeda Kota Bontang, Dinas Tata Ruang Kota Bontang, perusahaan berskala besar (PT PKT, PT Badak) |
| **STRATEGI 2**  Menetapkan pedoman dan peraturan mengenai dampak lingkungan alam dan sosial budaya dari penyelenggaraan usaha pariwisata dan industri lain yang terkait di dalamnya | * Pembuatan standar dan pedoman pengelolaan usaha pariwisata yang berkelanjutan |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Disperindagkop Kota Bontang |
| * Penyusunan perda yang terkait dengan pedoman pengelolaan usaha pariwisata yang berkelanjutan |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang, Bappeda Kota Bontang | Disperindagkop Kota Bontang, BLH Kota Bontang |
| * Penegakan hukum pentingnya penyusunan rencana AMDAL bagi industri dan usaha pariwisata untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pengembangan dan pengopera­siannya |  |  |  | Badan Lingkungan Hidup |  |
| * Pemberian sanksi yang tegas bagi berbagai usaha pariwisata yang melanggar peraturan |  |  |  | Badan Lingkungan Hidup |  |
| **STRATEGI 3**  Meningkatkan pemahaman pelaku industri pariwisata tentang dampak pariwisata (massal) | * Pengadaan pelatihan, workshop, seminar, pertemuan rutin tentang pariwisata berkelanjutan dan dampak pariwisata |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang |
| **STRATEGI 4**  Minimasi *leakage* dan minimasi *ecological footprint* dalam industri pariwisata | * Sosialisasi penggunaan bahan baku (misal bahan makanan) dari wilayah sendiri |  |  |  | Disperindagkop Kota Bontang |  |
| * Sosialisasi penggunaan material lokal untuk mengurangi ecological footprint |  |  |  | Badan Lingkungan Hidup |  |
| **STRATEGI 5**  Meminimalisasi dampak lingkungan negatif terhadap kegiatan pariwisata | * Pengendalian pencemaran udara, kebisingan, dan limbah dari kegiatan usaha dan rumah tangga |  |  |  | Pelaku kegiatan usaha/industri, Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, | Dinas Perindustrian |
| * Pemantauan pencemaran (udara, air, limbah padat, limbah cair, limbah B3) sesuai studi AMDAL dari kegiatan usaha/industri |  |  |  | Pelaku kegiatan usaha/industri, Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, | Dinas Perindustrian |

Tabel 2.34. Kebijakan Pemasaran Pariwisati

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBIJAKAN**  **PEMASARAN PARIWISATA** | | | **PROGRAM** | **JANGKA WAKTU** | | | | | **PENANGGUNGJAWAB** | | |
| **5 TH PERTAMA** | | **5 TH KEDUA** | **5 TH KETIGA** | | **UTAMA** | | **PENDUKUNG** |
| **KEBIJAKAN 1:**  **PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN EKSISTING DAN POTENSIAL** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakte­ristik, pola perjala­nan wisata, dan preferensi wisata­wan eksisting Kota Bontang | | | * Pelaksanaan studi karakteristik, pola perjalanan, persepsi dan preferensi pasar pariwisata eksiting scr lebih mendalam |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | | ASITA |
| **STRATEGI 2**  Meningkatkan target dan memperluas segmen pasar wisatawan | | | * Pengadaan kerjasama dengan sekolah-sekolah dan perusahaan |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | | ASITA |
| **STRATEGI 3**  Penajaman pemasaran untuk segmen wisata minat khusus | | | * Studi karakteris­tik, persepsi dan preferensi pasar wisata minat khusus scr mendalam |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | | ASITA |
| **KEBIJAKAN 2:**  **PENGEMBANGAN PROMOSI** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Peningkatan pemasaran pariwisata yang terkoordinir dan holistik | | | * Pembentukan badan promosi pariwisata Kota Bontang (*Bontang Tourism Board*) |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | | Kantor Walikota Kota Bontang |
| **STRATEGI 2**  Memperluas cakupan wilayah perwakilan promosi pariwisata Bontang | | | * Kerjasama dengan BPW di wilayah lain |  | |  |  | | ASITA | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Perkuatan keberadaan perwakilan PR dan peningkatan efektivitas kegiatannya di wilayah lain |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| **STRATEGI 3**  Pengembangan kegiatan promosi dan kegiatan *event* pada target pasar potensial | | | * Penyusunan buku, buklet, majalah, brosur, leaflet daya tarik wisata Kota Bontang yang lebih estetis |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| * Penyebaran buklet, majalah pariwisata, brosur, leaflet di berbagai jejaring potensial. |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| * Penyelenggaraan *famtrip*, *event* (festival, MICE) dan kegiatan promosi lainnya pada target pasar potensial |  | |  |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| **STRATEGI 4**  Pengembangan pemasaran dan promosi berbasis teknologi informasi | | | * Pembuatan website kepariwisataan Kota Bontang yang inovatif dan interaktif dan terhubung dengan website resmi kepariwisataan Indonesia |  | |  |  | | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Pelaksanaan promosi melalui media internet lainnya (facebook, blog, dll) |  | |  |  | | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | | Disbudpar Kota Bontang |
| **STRATEGI 5**  Pengembangan paket wisata yang kreatif | | | * Penyediaan paket wisata ke berbagai daya tarik wisata di Kota Bontang dengan tema yang kreatif |  | |  |  | | ASITA | | Disbudpar |
| **KEBIJAKAN 3:**  **PENGUATAN CITRA DAN KUALITAS PARIWISATA BONTANG** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Penguatan citra dan posisi pariwisata Bontang pada konstelasi kepariwisataan nasional | | * Penetapan *brand image* Kota Bontang melalui slogan dan logo | | |  |  |  | Kantor Walikota Bontang | |  | |
| * Penataan kawasan wisata unggulan | | |  |  |  | Dinas Tata Kota Bontang | | Dinas PU Kota Bontang Dinas Pertamanan Kota Bontang | |
| * Perencanaan dan pembangunan landmark Kota Bontang | | |  |  |  | Dinas Tata Kota Bontang | | Dinas PU Kota Bontang | |
| **STRATEGI 2**  Penguatan program promosi dengan mengangkat tema khusus dan menggali tema-tema baru | | * Penetapan tema tahun kunjungan | | |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang, Kantor Walikota Bontang | |  | |
| * Sosialisasi tema kunjungan wisata | | |  |  |  | Disbudpar Kota Bontang | | Dinas Perhubu­ngan, Komu­nikasi dan Informatika | |
|  | | * Pengadaan event-event nasional dan internasional | | |  |  |  |  | |  | |
| **KEBIJAKAN 4:**  **PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA YANG BERTANGGUNGJAWAB (RESPONSIBLE MARKETING)** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 4**  Penguatan peran industri dalam pengembangan strategi pemasa­ran pariwisata yang mengapli­kasikan konsep responsible tourism | * Pemberian insentif pada usaha promosi dan pemasaran yang dilakukan industri pariwisata yang mengaplikasikan konsep *responsible tourism* | | |  | |  |  | Disperindagkop Kota Bontang, Asosiasi usaha pariwisata, | | Disbudpar Kota Bontang | |

Tabel 2.35. Kebijakan Kelembagaan Pariwisata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PARIWISATA** | **PROGRAM** | | **JANGKA WAKTU** | | | | | | **PENANGGUNGJAWAB** | | |
| **5 TH PERTAMA** | | **5 TH KEDUA** | | **5 TH KETIGA** | | **UTAMA** | | **PENDUKUNG** |
| **KEBIJAKAN 1:**  **PENGUATAN PERAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPARIWISATAAN KOTA BONTANG** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Pengembangan kelembagaan dan pengelolaannya dalam industri pariwisata dan pemasaran pariwisata | * Pembentukan asosiasi usaha pariwisata (ASITA dll) Kota Bontang | |  | |  | |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| * Pembentukan organisasi masyarakat pariwisata (Kompepar) | |  | |  | |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| **STRATEGI 2**  Peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi antar sektor terkait | * Pengadaan forum koordinasi antar lintas sektor | |  | |  | |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  |
| **STRATEGI 3**  Peningkatan kerjasama antara stakeholder pariwisata | * Kerjasama antara industri pariwisata dengan pemerintah | |  | |  | |  | | Disbudpar Kota Bontang | | Asosiasi usaha pariwisata |
| **KEBIJAKAN 2:**  **PENINGKATAN KUALITAS SDM PARIWISATA** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Peningkatan kualitas SDM pariwisata sektor pemerintah | * Pengadaan program pelatihan dan diklat bagi staf dan kepala dinas |  | | |  | |  | | Dinas PendidikanDisbudpar Provinsi, Kemenbudpar | | Lembaga pendidikan tinggi |
| * Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi |  | | |  | |  | | Bappeda Kota Bontang, Kemenbudpar | |  |
| * Penetapan dan penerapan standar kualifikasi karyawan |  | | |  | |  | | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang | |  |
| **STRATEGI 2**  Peningkatan kualitas SDM industri pariwisata | * Pemetaan kebutuhan SDM pariwisata |  | | |  | |  | | Disbudpar Kota Bontang | | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang |
| * Pengadaan program pelatihan peningkatan skill SDM industri pariwisata |  | | |  | |  | | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Pengadaan program pelatihan kewirausahaan |  | | |  | |  | | Disperindagkop Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi bagi karyawan |  | | |  | |  | | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Penerapan sertifikasi profesi dengan standar internasional |  | | |  | |  | | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| * Sosialisasi sertifikasi profesi |  | | |  | |  | | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang | | Disbudpar Kota Bontang |
| **KEBIJAKAN 2:**  **PENINGKATAN KUALITAS SDM PARIWISATA** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEGI 1**  Pengembangan dan peningkatan kerjasama antara insititusi pendidikan dengan usaha pariwisata | * Pengadaan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata berkualitas |  | |  | |  | | Dinas Pendidikan Kota Bontang, DIKTI | |  | |
| * Pembentukan pusat kajian pengembangan kepariwisataan Kota Bontang |  | |  | |  | | Bappeda Kota Bontang | | Lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian | |
| * Kerjasama dengan pusat kajian/ penelitian pariwisata lainnya |  | |  | |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  | |
| * Kerjasama dengan lembaga pendidikan pariwisata untuk mencetak SDM pariwisata yang berkualitas |  | |  | |  | | Disbudpar Kota Bontang | |  | |

# BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Kepariwisataan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

## A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan pula pengertian kepariwisataan dalah:“Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dan pengusaha”. Pengertian di atas, dengan demikian dapat dijelaskan pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa”.

Sebagaimana yang tertulis mengenai jenis-jenis usaha pariwisata dalam Undang- Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 14 ayat (1)berbunyi;

Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :

a. Daya tarik wisata;

b. Kawasan pariwisata;

c. Jasa transportasi wisata;

d. Jasa perjalanan pariwisata;

e. Jasa makanan dan minuman;

f. Penyediaan akomodasi;

g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan Pameran;

i. Jasa informasi pariwisata;

j. Jasa konsultan pariwisata;

k. Jasa pramuwisata;

l. Wisata tirta; dan

m. Spa.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 15 berbunyi;

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan wajib mendaftarkan usaha terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilaiyang hidup dalam masyarakat setemapat;

b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung ;

c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;

f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha kecil, dan setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dam asri;

l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab dan

n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur pariwisata diatur dalam pasal 30, Undang-Undang Kepariwisataan, berbunyi;

a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;

b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;

c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;

d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata

e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahya;

f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik daya tarik wisata baru;

h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;

i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;

j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan

k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

## B. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

a. Destinasi Pariwisata;

b. Pemasaran Pariwisata;

c. Industri Pariwisata; dan

d. Kelembagaan Kepariwisataan.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS yang memuat:

a. visi;

b. misi;

c. tujuan;

d. sasaran; dan

e. arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010- 2025.

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;

b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan

d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;

b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;

c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan

d. mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah peningkatan:

a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;

b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;

c. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;

d. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan

e. produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan.

Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan:

a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;

b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;

c. dengan tata kelola yang baik;

d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

## C. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pada intinya mengatur tentang perlindungan tentang benda cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Lingkup pengaturan tersebut jelas menyebutkan benda ”tangible” alam dan buatan manusia, situs, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata, dengan demikian jelas bahwa pengaturan Undang-undang Cagar budaya ini hanya sebagian dari lingkup kebudayaan yang lebih menekankan pada benda ”tangible”

## D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi :

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya yaitu menetapkan Peraturan Daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dalam kaitannya dengan salah satu yang menjadi urusan pilihan yaitu mengenai pariwisata. Adapun ketentuan yang menjadi acuan yaitu:

1. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian; dan transmigrasi.

2. Urusan pemerintahan pilihan kabupaten/kota bidang pariwisata meliputi:

Tabel 2.36. Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Kepariwisataan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Urusan** | **Kabupaten/Kota** | **Ket** |
| 1. | Destinasi Pariwisata | a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.  b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.  c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.  d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota. |  |
| 2. | Pemasaran Pariwisata | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya  tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. |  |
| 3. | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di  Daerah kabupaten/kota. |  |
| 4. | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat  dasar. |  |

## F. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalamrangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri. Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan. Menteri, gubernur, dan/ataubupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

a. pencegahan; dan

b. penanggulangan.

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

a. menaati tata ruang;

b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;

c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;

d. melakukan pemantauan lingkungan;

e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan

f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;

b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;

c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau

d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

# BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

## A. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila memberi sebuah keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagian hidup hanya akan tercapai jika hidup itu sendiri didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam kehidupan manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan masyarakat dan hubungan dengan alam serta hubungan dengan Tuhannya.

Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila pada dasarnya adalah ‘kepribadian nasional’. Pancasila menjadikan bangsa Indonesia hidup dalam arti aktif, dinamis, kreatif. Karena itu Pancasila disebut sebagai landasan idiil bangsa Indonesia ke masa depan sesuai tuntutan zaman. Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia tidak dapat disangkal, karena Pancasila adalah obyektifitas dari kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai suatu landasan bagi kehidupan bangsa, karena itu Pancasila pada dasarnya adalah pusat nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditaati. Pancasila juga menjadi ukuran baik buruk, indah-tidak indah, benar salah terhadap kegiatan kenegaraan. Dalam pemahaman yang demikian maka Pancasila sesungguhnya menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang secara utuh ke arah pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya ditujukan ke arah pembangunan material/materi atau lahiriah semata seperti peningkatan produksi pangan, perumahan, kesehatan, atau berbagai infra struktur yang berhubungan langsung dengan kemudahan hidup manusia sehari-hari. Demikian juga tidak semata-mata ditujukan pada pembangunan batiniah yang mengutamakan pentingnya pendidikan, rasa aman, kebebasan berpendapat, keadilan dan sebagainya, melainkan dituntut adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Karena itu pembangunan di sektor kebudayaan di Indonesia, diselenggarakan bukan hanya untuk kepentingan satu golongan, satu etnik, kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat/masyarakat Indonesia. Pancasila memberi jaminan pasti bagi seluruh warga masyarakat Indonesia untuk memperoleh penghargaan yang sama dalam mengekspresikan rasa seni dan format budayanya masing-masing.

Pada saat keberadaan Indonesia dijalur strategis lalu lintas arus-arus deras kebudayaan dengan faktor-faktor positifnya seperti kemajuan-kemajuan; rasionalitas; disiplin profesionalitas; atau pun sisi-sisi negatifnya yaitu pengasingan jati diri karena globalisasi yang melulu ekonomis dan hitungan harga manusia hanya diukur dari fungsi, sebagai alat apalagi dari ukuran kegunaan dan uang; maka di sana tantangan untuk mencapai tata hidup bersama yang lebih merata dalam ketimpangan yang kaya semakin kaya dan yang berpunya kuasa ekonomi, politik dunia semakin meminggirkan yang tidak berdaya disitulah prinsip keadilan dalam ekonomi; kebudayaan dalam hak- haknya dan kewajiban menjadi penentu sosialitas yang dibangun. Inilah prinsip keadilan sosial baik untuk relasi antar keberagaman dalam negara maupun relasi antar negara dalam mencipta perdamaian dunia yang manusiawi karena saling menghormati daulat harkat kemanusiaannya.

Dengan kata lain: prinsip-prinsip dasar atau sila-sila Pancasila merupakan acuan, dasar dan sumber mata air pengembangan proses-proses kebudayaan bangsa Indonesia untuk dicarikan bahasa-bahasa hukumnya untuk ranah “tangible” kebudayaan dan bahasa dialog-dialog peradabannya untuk ranah-ranah yang tidak bisa dibahasakan hukum karena merupakan wilayah “ruh” atau “intangible” dari kebudayaan.

Filosofi Pariwisata Indonesia didasarkan pada salah satu nilai-nilai agama, yang disebut "keseimbangan hidup" (disebut: tiga prinsip kebahagiaan) yang disampaikan Almarhum Joop Ave, pada Kuliah Umum di wisuda STP SAHID, September 2006 yang terdiri dari:

a) Hubungan Keseimbangan antara manusia dan Tuhan,

b) Hubungan *Balance* di antara manusia itu sendiri (individu dengan individu, individu dengan masyarakat, orang-orang dengan orang-orang),

c) Hubungan Keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.

Berdasarkan filosofi ini, beberapa prinsip dasar pariwisata Indonesia yang disusun sebagai berikut :

a) Manusia (*people*) adalah pusat atau menjadi subyek pariwisata, bukan objek.

b) Semua ciptaan orang (*tangible dan intangible*) dan hubungan antar antara orang- orang urusan kebudayaan. Pada dasarnya perkembangan mereka kreasi yang merangsang gerakan (perjalanan) dari orang-orang wisata budaya.

c) Orang (masyarakat) adalah kekuatan (*competitive advantage*) dari wisata budaya.

d) Pariwisata harus berbasis masyarakat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) community-based tourism.

e) Mengambil manfaat (eksploitasi) dari budaya dan alam harus diimbangi dengan pelestarian dan konservasi budaya dan alam itu sendiri. Dengan kata lain; harus ada rasa kontrol diri atau tidak menjadi serakah (hanya mengeksploitasi) prinsip pariwisata berkelanjutan.

## B. Landasan Sosiologis

Pariwisata dapat menjadi suatu tuntutan hasrat seseorang untuk mengenal kebudayaan dan pola hidup bangsa lain dan sebagai suatu upaya untuk mengerti mengapa bangsa lain itu berbeda. Pariwisata menjadi suatu sarana untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan untuk memantapkan kembali keseimbangan emosi seseorang.

Potensi Pariwisata adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan, pelancongan, atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk objek dan daya tarik wisata.

Kepariwisataan mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestrarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Potensi kepariwisataan merupakan suatu hal yang mempunyai kekuatan dan nilai tambah tersendiri untuk dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat dibagi 3, yaitu :

### 1. Potensi Alam

Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.

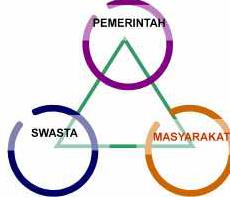
### 2. Potensi Kebudayaan

Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument.

### 3. Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masingmasing. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati. Gambar 1. dibawah ini menunjukkan keterkaitan dan sinergi antar pemangku kepenting dan dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.



Gambar 2.7. Keterkaitan dan sinergi antar pemangku kepentingan dan dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan

Jabaran peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dam pembuat peraturan (*regulator*) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.

2) Kalangan Swasta (pelaku usaha/ industri pariwisata) dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan/atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan;

3) Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah *(host),* namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu dalam kerangka kegiatan pembangunan kepariwisataan dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan.

Dalam kaitan inilah, program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat agar semakin memiliki kapasitas dan kemandirian, serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional dan nasional.

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan *(empowerment),* agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai: *“Upaya penguatan dan peningkatan* ***kapasitas, peran dan inisiatif*** *masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai* ***subjek atau pelaku*** *maupun sebagai* ***penerima manfaat*** *dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan”. (Renstra Dit. Pemberdayaan Masyarakat, 2010)*

Definisi tersebut menegaskan posisi penting masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan; dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat sebagai **subyek atau pelaku** pembangunan*,* mengandung arti, bahwa masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam fungsinya sebagai **subjek atau pelaku** masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Masyarakat sebagai **penerima manfaat***,* mengandung arti, bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kerangka pembangunan kepariwisataan tersebut, salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Iklim atau lingkungan kondusif tersebut terutama dikaitkan dengan perwujudan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata.

**SADAR WISATA** dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:

a) Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah *(host)* yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.

b) Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintaitanah air.

**SAPTA PESONA,** sebagaimana disinggung di atas adalah : ***“****7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung”.* Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah :

1) Aman

2) Tertib

3) Bersih

4) Sejuk

5) Indah

6) Ramah

7) Kenangan

Terwujudnya ketujuh unsur Sapta Pesona dalam pengembangan kepariwisataan di daerah akan bermuara pada:

* Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi
* Tumbuhnya iklim usaha kepariwisataan yang prospektif
* Meningkatnya lapangan pekerjaan dan peluangpendapatan, serta dampak ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat.

Sadar Wisata dan Sapta Pesona sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud secara otomatis tanpa adanya langkah dan upaya-upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten di destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait

lainnya.

Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memilki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Peran dan kontribusi Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam turut menopang perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata, maupun khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah.

## C. Landasan Yuridis

Pada uraian pembahasan pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan konsep kepariwisataan, yakni adanya rangkaian kegiatan pariwisata yang bukan hanya melibatkan setiap orang tetapi juga kebutuhan negara.

Adapun dasar hukum kepariwisataan yang dapat dilihat dari perangkat kaidah, azas-azas, ketentuan, institusi dan mekanismenya, nasional maupun internasional, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, seperti persetujuan UNWTO tentang prinsip-prinsip dalam *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET) yang telah dimasukkan ke dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan pada ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan.

Kegiatan bisnis pariwisata merupakan kegiatan multi-aspek, oleh karena itu pembahasan untuk dasar hukum kepariwisatan tidak cukup didasarkan pada hukum perdagangan dan kepariwisataan, melainkan harus menyertakan bidang-bidang hukum terkait. Kegiatan ini merupakan fenomena perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela, dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan serta eksistensi manusia itu sendiri. Jadi tidak salah apabila dikatakan bahwa pariwisata merupakan perwujudan dari Hak asasi manusia *The Universal Declaration of Human Rights* memuat pernyataan sebagai berikut:

1) Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dan tinggal didalam wilayah setiap negara (*everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state)* (Pasal 13 ayat 1)

2) Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpesiar, termasuk di dalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu liburan dengan tetap digaji (*everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay)* (Pasal 24)

Kedua pasal tersebut diatas menunjukkan secara jelas bahwa adanya suatu hak yang sangat mendasar atas kebebasan untuk bergerak, beristirahat dan berlibur, sedangkan kepariwisataan merupakan alat pelaksana HAM seperti yang dikemukan dalam Pasal 2 *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut: *“everyone is entitled to all the right and freedoms set forth in this declaration, with one destination of any kids, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin property, birth or other status*.

Komitmen negara Indonesia mengakui hak berwisata sebagai hak asasi manusia dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Selanjutnya UU Kepariwisataan menegaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 5 huruf b UU Kepariwisataan) dan hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata merupakan hak setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (a) UU Kepariwisataan. Refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada level konstitusi sebagai manifestasi politik hukum pemerintah, refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada pasal 28 H ayat 4 Undang–undang Dasar Negara Indonesia 1945 tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak milik individu dari pengambilalihan secara sewenang–wenang oleh siapa pun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan kepariwisataan diarahkan sebagai alat pemerataan pembangunan baik secara spasial, sektoral maupun struktural. Pemberdayaan daerah sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat perlu diwujudkan secara nyata, baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan potensi yang berada di daerah melalui perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maupun peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, termasuk usaha nasional beserta lembaga perencanaan dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan oleh daerah tersebut, tentu diperlukan adanya standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur selain perumusan kebijakan dari pemerintah pusat, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama berkaitan dengan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian manajemen pemerintah daerah harus dapat mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, adanya komposisi proporsional peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata daerah yang harus jelas batas-batasnya. Sesuai tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyiapkan penetapan standar pemberian izin oleh daerah dalam kaitan pemberian izin usaha oleh daerah diperlukan adanya suatu pedoman umum perizinan usaha pariwisata.

Izin merupakan sarana yuridis administrative yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi Negara. Dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh pihak yang memperoleh izin. Izin sebagai sarana yuridis dari pemerintah daerah pada hakikatnya ditetapkan untuk mengkonkritisasikan wewenangnya dengan beberapa tujuan (motif) tertentu yaitu :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu ;

2. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu ;

3. Mencegah bahaya bagi lingkungan ;

4. Hendak membagi-bagi benda yang sedikit ; dan

5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dilakukan berdasarkan izin. Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelan memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan. Sementara Fungsi izin usaha dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan, yaitu :

1. Bagi dunia usaha :

a. Sebagai dasar/bukti keabsahan menjalankan usaha ;

b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan ;

c. Meningkatkan citra produk wisata ; dan

d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.

2. Bagi pemerintah daerah :

a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian ;

b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya ;

c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata ; dan

d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingn umum/ konsumen.

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu stakeholder pembangunan pariwisata dan karena itu memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan didalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan pariwisata diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber daya pariwisata.

Terkait dengan masuknya prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan kepariwistaan yang merupakan landasan bagi penyelenggaran pelayanan publik, salah satunya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Karakteristik transparansi atau keterbukaan ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan public mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana public sampai pada tahapan evaluasi, termasuk sector pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *good* *governance* dalam pengembangan kepariwisataan diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan nasional.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkannya kepariwisataan adalah dalam rangka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan, mempererat persahabatan antarbangsa. Pasal ini seharusnya diterjemahkan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kepariwisataan tidak boleh dikembangkan di suatu destinasi pariwisata. Meskipun demikian, ada sebuah isu yang harus menjadi perhatian karena mungkin akan menimbulkan persoalan dalam jangka panjang. Pasal 5 huruf g undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah “mematuhi kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata”.

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di Indonesia dan khususnya para pembuat kebijakan, harus terlibat aktif dalam proses penyusunan kesepakatan- kesepakatan internasional di bidang kepariwisataan, karena mungkin saja di dalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasional yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Ketika kemudian telah ditetapkan bahwa kegiatan kepariwisataan tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang dari masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata, maka masalah berikutnya yang perlu dikelola/diatur dengan baik dan benar adalah penyelenggaraannya. Berbagai aktivitas yang harus diatur di dalam penyelengaraan Pariwisata setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kepariwisataan harus disesuaikan dengan kearifan lokal di destinasi pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan b UU No. 10 Tahun 2009. Jika prinsip ini diabaikan, maka penduduk lokal akan melihat wisatawan sebagai “pengganggu” yang harus diusir dari destinasi pariwisata.

2. Penyelenggaraan kepariwisataan harus ditujukan untuk membantu perwujudan motivasi berwisata. Wisatawan tidak boleh dilihat sebagai “mangsa” yang akan dikuras habis sumber daya finansialnya dalam jangka pendek. Kesetiaan wisatawan tidak dibangun melalui hubungan “jual beli” tetapi melalui perasaan “diterima” di destinasi pariwisata. Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak-hak sebagai konsumen, seperti: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan sebagainya. Sementara itu, Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 menetapkan hak-hak sebagai seorang wisatawan, yaitu memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di samping itu, Pasal 21 memberikan hak kepada wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk memperoleh fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

3. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) harus sepenuhnya dilindungi dari kemungkinan mengalami kebangkrutan karena kehadiran perusahaan besar dan/atau multi nasional. Namun demikian, istilah “dilindungi” tidak boleh diartikan sebagai upaya menghindarkan UMKMK dari persaingan, melainkan meningkatkan kapasitasnya sehingga suatu saat mampu bersaing dengan perusahaan besar dan/atau multi nasional sekalipun. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 4 huruf d UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di samping itu, Pasal 16 ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi UMKMK dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. Sementara itu, Pasal 17 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan pencadangan UMKMK dan memfasilitasi kemitraan dengan usaha skala besar.

4. Pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata dan penataannya. Penataan destinasi pariwisata yang tidak memperhatikan aspek artistik dapat mengurangi kualitas daya tarik destinasi dimaksud. Hal ini merupakan salah satu keunggulan destinasi pariwisata di negara maju dibandingkan dengan yang ada di negara sedang berkembang. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah tantangan yang harus dapat dijawab yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan peningkatan kesejahteraan dengan perlindungan warisan budaya.

5. Perlindungan kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hal-hal seperti tingkat kejernihan air laut dan kebersihannya, nilai-nilai budaya yang luhur, jumlah wisatawan yang boleh berkunjung dalam suatu waktu tertentu, dan sebagainya.

6. Perlindungan keamanan, stabilitas politik dan penyediaan skema fasilitasi pendanaan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

7. Jaminan mengenai kelangsungan usaha, tidak hanya di sektor pariwisata, namun juga sektor-sektor pendukung lainnya seperti sektor penerbangan. Sebagaimana diketahui, kelangsungan hidup sektor pariwisata sangat bergantung kepada sektor- sektor usaha lainnya. Di samping itu, jika suatu Negara memiliki maskapai penerbangan yang mampu bersaing di tingkat internasional, maka secara otomatis maskapai yang bersangkutan akan mempromosikan destinasi pariwisata di negaranya.

8. Persaingan usaha yang sehat. Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

9. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil-hasil karya/kerajinan yang menjadi sector pendukung kepariwisataan, termasuk yang merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Khusus berkaitan dengan PT dan EBT, persoalan dapat muncul ketika tidak adanya perlindungan hukum terhadap kedua jenis warisan budaya tersebut, yang kemudian dapat menyebabkan penduduk lokal tidak bersedia menunjukkan hasil-hasil karya mereka karena khawatir akan ditiru/dibajak.

10. Standarisasi diberbagai bidang. Standarisasi menjadi sangat penting apalagi dalam kaitannya dengan pariwisata internasional, karena berfungsi sebagai “jembatan” antara persepsi wisatawan mengenai destinasi pariwisata dan barang dan jasa yang dikonsumsi, dengan destinasi pariwisata sebagai produsennya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa standarisasi tidak dapat dilakukan dalam segala hal, karena pariwisata mengandung hal-hal yang bersifat unik (tidak ada di tempat lain). Untuk hal-hal demikian, standarisasi hanya dapat dilakukan terhadap aspek-aspek umum yang relevan, misalnya berkaitan dengan standar kesehatan atau keselamatan.

11. Mendorong agar perusahaan jasa pariwisata terhindar dari tuntutan hukum. Tuntutan hukum karena kerugian yang diderita oleh wisatawan, baik dari segi finansial, fisik dan mental, mengandung resiko dapat menurunkan daya saing destinasi pariwisata.

# BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

## A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun arah dan jangkauan pengaturan berdasarkan uraian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

2. Upaya penguatan dan peningkatan **kapasitas, peran dan inisiatif** masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai **subjek atau pelaku** maupun sebagai **penerima manfaat** dalam pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan.

## C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda Kota Bontang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan terdiri atas:

1. BAB I mengatur ketentuan umum yang memuat batasan istilah dari materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

2. BAB II mengatur tentang Pembangunan Kepariwisataan Daerah

3. BAB III mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Keparawisataan.

4. BAB IV mengatur tentang Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata

5. BAB V mengatur tentang Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan

6. Bab VI mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

7. BAB VII membahas tentang Pembiayaan

8. BAB VIII membahas tentang Ketentuan Penutup

# BAB VI PENUTUP

## A. Kesimpulan

Industri pariwisata bukan suatu industri yang berdiri sendiri melainkan terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling terkait. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya. Komponen -komponen kepariwisataan yang berperan dalam penyelenggaraan sistem industri pariwisata secara garis besar terdiri dari tiga komponen, yaitu, pemerintah, jasa-jasa kepariwi-sataan dan masyarakat di sekitar obyek dan atraksi wisata. Kewajiban pemerintah daerah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata. Pemerintah daerah berserta instansi- instansinya, industri jasa dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk duduk bareng bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengemas paket-paket wisata.

Tindakan itu patut dilakukan karena aktivitas pariwisata tidak dapat dilakukan hanya pada satu area saja dan tersekat-sekat. Aktivitas pariwisata memerlukan ruang gerak dan waktu yang fleksibel. Adanya kerjasama dan komitmen akan terbentuk kemitraan yang saling meng isi, maka aktivitas berwisata yang memiliki mobilitas tanpa batas itu tidak akan mengalami kendala karena jalur-jalur yang menghubungkan antar atraksi wisata yang satu dengan yang lainnya sudah tertata, terhubung dengan baik dan dari segi keamanan dapat dikoordinasikan bersama. Kegiatan promosi dapat dilakukan bersama -sama antara pemerintah daerah dan swasta.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata haus dipandang sebagai suatu system. Dalam system tersebut tercakup berbaga ikomponen yang saling berinteraksi dan saling mempengamhi meliputi: pasar, perjalanan, destinasi dan pemasaran. Oleh karena itu perlu adanya sinergi kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata yang multi-sektor dan multi-disiplin itu akan berhasil apabila di dalam penyelenggaraannya didasari oleh berbagai perangkat kebijakan yang terpadu baik yang terkait langsung maupun tidak.

## B. SARAN

1. Dengan pemberlakuan otonomi daerah seharusnya para investor atau pengusaha pariwisata lebih dijamin oleh pemerintah daerah terutama untuk kesederhanan prosedur dan keringanan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi pemerintah daerah harus transparan dalam pembiayaan urusan investasi dan kesederhanaan prosedur dalam pengurusan ijin.

2. Pemerintah daerah harus proaktif dalam penanganan masalah-masalah investasi agar iklim investasi di Kota Bontang menjadi nyaman dan aman. Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan perijinan investasi khususnya dalam bidang kepariwisataan agar para pengusaha dan investor tidak diperberat dan dipungut biaya berlebihan dalam kegiatan investasi.

3. Perlu adanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan kepriwisataan di Kota Bontang melalui Peraturan Daerah.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU-BUKU**

\_\_\_\_\_, 2002. ***Ilmu Pariwisata; Sebuah Pengantar Perdana***, Pradya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2000. ***Pengantar Ilmu Pariwisata***, Angkasa, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002. ***Pemasaran Pariwisata****.,* Angkasa, Bandung.

Bagir Manan, 2001 dalam Supardan Modoeng, ***Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah***, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta.

Bagir Manan, 2002, ***Menyongsong Fajar Otonomi Daerah***, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.

Hestu Cipto Handoyo, 2008, ***Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik***, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1998. ***Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan Wisata Ekologi Alam*** (draft IV).

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2002. ***Pengelolaan Lingkungan,*** Yayasan Obor, Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup. ***Agenda 21 Tourism***, Jakarta

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2002, ***Pengelolaan Sumberdaya Alam Dengan Strategi Kemitraan. Naskah Kebijakan.***

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2002. ***Kajian Pengembangan Ekowisata diIndonesia.***

Pendit, Nyoman, S. 2000. ***Pariwisata, Sebuah Studi, Analisa dan Informasi****,* Pradya Paramita, Jakarta.

Solly lubis M, 2001, ***Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah***, Alumni Bandung.

Yoeti, Oka A, Drs. BA. 1996. ***Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata****.* Pradya Paramita, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan.

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.